Rauf A. Hatu
Dewinta Rizky R. Hatu

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

(Suatu Tinjauan Prespektif Teori dan Empirik)

Rauf A. Hatu
Dewinta Rizky Hatu

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

(Suatu Tinjauan Prespektif Teori dan Empirik)

CV. Mitra Ilmu
2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tampa hak melakukan perbuatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sdikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah.*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00; (lima ratus juta rupiah).*

Judul Buku : SOSIOLOGI PEMBANGUNAN
(Suatu Tinjauan Prespektif Teori dan Empirik)
ISBN : 978-623-5323-36-7
Penulis : 1. Rauf A. Hatu
2. Dewinta Rizky Hatu
Cetakan : Pertama April 2022
Ukuran Buku : 15 x 23 cm
Layout oleh : Sulaiman

Diterbitkan Oleh
Penerbit CV. Mitra Ilmu
Divisi Publikasi dan Penelitian
Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang
Kecamatan Makassar Kota Makassar

KATA PENGANTAR

Sosiologi Pembangunan secara umum banyak mengkaji persoalan-persoalan pembangunan di negara-negara berkembang atau lebih banyak kalangan akademis menggunakan istilah pembangunan Dunia Ketiga. Menurut Budiman (1995) istilah Dunia Ketiga lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomis masih miskin, atau negara-negara yang masih berkembang, tanpa melihat idiologinya.

Buku ini sebagai pengembangan dari bahan ajar bagi mahasiswa Jurusan Sosiologi dan didasarkan pada hal-hal: *Pertama*, kurikulum Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, *Kedua,* kajiannya lebih terpokus pada teori-teori yang berkaitan dengan masalah pembangunan di negara-negara berkembang yang meliputi teori modernisasi, teori ketergantungan, teori dependensi yang kesemuanya itu menjadi unit analasis terhadap kajian sosiologi pembangunan. K*etiga;* buku ini diharapakan menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan secara sadar berusaha meningkatkan kemampuan dan kualitas analisis keilmuannya, sehingga dimasa-masa datang mahasiswa dapat memberi kontribusi serta pembobotan terhadap peningkatan keilmuannya khususnya dalam mempelajari, mengkaji dan mendalami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan dari perspektif teoei dan empirik.

Buku ini juga lebih banyak mengadopsi dari tulisan berbagai ahli terutama tulisan Arief Budiman dan Andre Gunder Frank. Dalam bab terakhir buku ini dibahas sebuah Studi Kasus Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sebagai salah satu tema kajian dalam sosiologi pembangunan. Penulis menyadari sistematika, kajian materi serta analisisnya belum sesempurna dengan apa yang menjadi harapan bagi

yang membaca buku ini, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan pendapat dalam rangka penyempurnaannya atau perbaikan dikemudian hari. Amien. Terima kasih.

Gorontalo, Mei 2022
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv

Bagian Pertama
PENDAHULUAN 1

Bagian Kedua
BEBERAPA KONSEP TENTANG PEMBANGUNAN 7

Bagian Ketiga
TEORI MODERNISASI DALAM PEMBANGUNAN 15

Bagian Keempat
TEORI PERUBAHAN SOSIAL (SOCIAL CHANGE) 32

Bagian Kelima
TEORI DEPENDENSI 70

Bagian Keenam
TEORI PEMBANGUNAN KONTEMPORER 78

Bagian Ketujuh
KEMISKINAN PEDESAAN 82

Bagian Kedelapan
STUDI KASUS: POTRET KEMISKINAN PEDESAAN PADA KEHIDUPAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DI GORONTALO) 110

KEPUSTAKAAN.....158

Bagian Pertama

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya sebuah ilmu akan senantiasa terjaga apabila memiliki manfaat bagi peningkatan serta kecerdasan dan kesejahteraan bagi umat manusia guna memperoleh pengetahuan sesuai dengan perkembangan dan perubahan sebuah zaman[1]. Sehingga dengan demikian manusia pada akhirnya senantiasa mampu mengkomunikasikan serta mengaktualkan pengalamannya kepada orang lain demi untuk mencapai kelangsungan dan kesejahteraan serta perkembangan ilmu pengetahuan dalam memahami dinamika kehidupan umat manusia, terutama dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dibendung oleh siapapun dan kapanpun, sebab ilmu pengetahuahn tersebut terjadi secara kumulitaif, baik melalui sebuah realitas maupun dalam sebuah gagasan. Khun memandang tujuan utama ilmu pengetahuan adalah untuk menantang asumsi yang berlaku umum di kalangan ilmuan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Kalangan ilmuan pada umumnya perpendirian bahwa perkembangan atau

[1] Koentjaraningrat, suatu ciri khas pada manusia adalah bahwa ia selalu ingin tahu; dan setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka segera kepuasanya disusul lagi dengan kecenderungan untuk lebih tahu lagi. Begitu seterusnya, hingga tak sesaat pun ia sampai pada kepuasan mutlak untuk menerima realitas yang dihadapinya. Metode Penelitian Masyarakat, Penerbit Gramedia Persada utama Jakarta 1994.hal.1. Lihat pula tulisan Jujun Suriasumantri, Ilmu Dalam perspektif Penerbit Yayasan Obor 1995 hal.9.

kemajuan ilmu pengetahuan itu terjadi secara kumulatif.[2] Paradigma yang demikian mendapat dukungan antara lain melalui tulisan baik melalui jurnal, buku maupun penelitian-penelitian yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. Thomas melihat ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh satu paradigman tertentu, yakni suatu pandaangan yang mendasar tentang apa yang menjasi suatu problem yang dihadapi dalam situasi tertentu.

Thomas Khun membedakan tiga paradigma tersebut, akan tetapi dalam buku ini, dalam buku ini penulis hanya membahas tentang paradigma sosiologi yang memiliki hubungan erat dengan sosiologi pembangunan. Ritzer membahas paragdima sosiologi tersebut menyamakan pardigman sosiologi sangat mirip dengan konsep exemplar dari Khun. Dalam edisi pertama bukunya Khun mendiskusikan keaneka ragaman fenomena yang tercakup dalam pengertian kebiasaan-kebiasaan nyata, keputusan-keputusan yang diterima, hasil-hal pertimbangan ilmu pengetahuan serta hasil-hasil penemuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian paradigma sosiologi lebi menekankan pada konsep hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuannya terutama berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadap oleh masyarakat seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakatnya.

Selanjutya berbicara masalah pembangunan merupakan salah satu kajian ilmu sosioligi, terlihat bahwa konsep tentang pembangunan telah banyak mengalami pergeseran, terutama pada beberapa dekade terakhir, pada mulanya pembangunan yang nyaris identik dengan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, pada intinya hanya berkisar pada persoalan ekonomi, akan tetapi hal tersebut belum dapat menjamin tingkat pertumbuhan dan perubahan masyarakatnya, oleh sebab itu pembangunan tetap pula harus memperhatikan bahkan

[2] Khun Thomas, *The Struktur of Scientific Revolution*, d*ikutif* Retzer Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Rajawali Pres, Jakarta, 1992, hal.4

menitikberatkan pada masalah yang berkaitan dengan sosial budaya kemasyarakatan.

Perkembangan dan perubahan umat manusia dipengaruhi oleh berbagai dimensi diantaranya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketajaman dalam melakukan analisis dari setiap perubahan yang berlangsung dalam dinamika kehidupannya. Untuk memahami semua ini, maka sangat diperlukan sebuah ilmu sosiologi pada umumnya khususnya sosiologi pembangunan dalam melakukan kajian tentang perubahan dan perkembangan yang berlangsung dalam masyarakat tanda mengenal batas, ruang dan waktu.

Adapun manfaat dari pembelajaran sosiologi pembangunan agar mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan dan analisis dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan terutama yang berhubungan dengan konsep dasar pembangunan, dimensi pembangunan, pendekatan pembangunan dan teori-teori yang dijadikan sebagai unit analisis dalam setiap perubahan dan perkembangan pembangunan, terutama pembangunan di negara-negara berkembang, seperti teori modernisasi (modernisasi menurut Domar dan Harrod, Weber, McClelland, Rostow, Hoselitz, Inkeles dan Smith), teori struktural, teori dependensi, serta teori-teori pembangunan kontemporer.[3]

Kajian Dalam Sosiologi Pembangunan

Kajian tentang Sosiologi pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek atau multi analisis, sebab pandangan serta pemikiran dalam kehidupan masyarakat seharusnya disesuaikan dengan sebuat realiats. Oleh sebab itu dalam kagian tulisan ini penulis berupaya untuk mereduksi komponen-komponen tersebut baik dalam tinjauan teoritik maupun empirik. Walaupun dalam kajian buku ini belum semua teori yang mencakup permasalahan sosiologi

[3] Teori modernisasi lebih banyak diadopsi dari tulisan Arif Budiman tentang Teori Ketergantungan Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995 hal.16.

pembangunan di bahas. Penulis hanya mengambil kajian dari beberapa pemilkiran ilmuan sosial yang turut memberikan pembobotan terhadap kajian sosiologi pembangunan.

Dalam buku ini para pembaca yang menggeluti keilmuan sosial terutama bagi para mahasiswa bagimana menjelaskan dan memahami, konsep dasar pembangunan, dimensi pembangunan, pendekatan pembangunan dan teori-teori yang dijadikan sebagai unit analisis dalam setiap perubahan dan perkembangan pembangunan terutama pembangunan di negera-negara berkembang, seperti teori modernisasi (modernisasi menurut Domar dan Harrod, Weber, McClelland, Rostow, Hoselitz dan Inkeles dan Smith), teori struktural, teori dependensi, serta teori-teori pembangunan kontemporer serta dapat membedah salah kasus Perubahan sebagai implikasi dari pembangunan masyarakat yang berlangsung dalam dinamika kehidupannya."

Deskripsi Kajian Dalam Tulisan

Permasalahan pembangunan sebagai suatu fenomena yang tidak habis-habisnya dibahas dalam kerangka kajian keberlangsungan hidup manusia dalam menjalani kehidupannya. Fenomena ini melekat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang kerap mengalami perubahan menurut berbagai dinamika maupun dimensi yang ada. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan[4]. Dengan demikian pembangunan tidak sekedar

[4] Pembangunan tidak dapat dianalisis dari satu komponen yang mempengaruhinya, akan tetapi multi kompleks dalam memahami tentang proses pembangunan terutama dalam kajian teoritis dalam tatanan kehidupan masyarakarat terutama masyarakat yang sedang berkembang. Baca Tulisan Selo Soemardjan tentang Perubahan Sosial di Jogyakarta, Penerbit Komunitas Bambu Beji Timur Depok, 2009 hal.xiv

memenuhi hasrat atau keinginan individu maupun kelompok masyarakat, akan tetapi pembangunan harus melalui proses perencanaan yang baik. Proses perencanaannya sebaiknya mengikutsertakan semua lapisan masyarakat. Hal ini diharapkan agar tujuan pembanguan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan maupun dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat berkembang atau masuk dalam kategori Dunia Ketiga tidak terlepas dari fenomena pembangunan. Keaneka ragaman etnik, ras, kelompok, dan agama dengan bentuk dan tingkat kehidupan yang berbeda dalam masyarakat secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya perubahan dalam masyarakat sendiri atau menurut orientasinya ke luar masyarakat. Kurangnya komunikasi yang terjadi antara para penentu kebijakan dengan rakyak kebanyakan, menyebabkan model atau bentuk pembangunan yang diterapkan lebih memperlihatkan suatu model "*top-down planning*" yang menurut satu kondisi dianggap lebih baik, namun dari sisi yang lain memberikan dampak yang kurang diharapkan; sejauh perkembangan masyarakat yang ada, ternyata sisi ke dua inilah yang dirasakan lebih memperlihatkan substansinya dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan lebih lanjut, suatu proses pembangunan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai sejauhmana nilai-nilai dasar masyarakat yang terlibat dalam proses ini bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dari dinamika masyarakatnya. Terpaan dari faktor-faktor ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi misalnya, gunjangan politik dalam negeri serta berbagai perubahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang kemudian mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Gambaran yang jelas bahwa selama ini belum ada konsep atau bentuk pembangunan yang jelas dalam masyarakat. Gambaran ini juga menunjukkan bahwa sedemikian rapuhnya nilai-nilai dasar tentang konsep pembangunan di Indonesia.

Fenomena inilah yang dijadikan dasar untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana peranan teori modernisasi dan teori dependensi dalam melakukan pendekatan terhadap proses pembangunan yang terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang atau Negara Dunia Ketiga. Sebagai sebuah negara bekas jajahan tidak dapat dihindari terdapat berbagai kekurangan dan kelemhan. Misalnya masalah yang berhubungan dengan kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan bahkan komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Permasalahan kemiskinan yang menjadi kajian yang lebih difokuskan dalam proses sosiologi pembangunan yang akan di lakukan kajian dalam bab tersendiri yang berkaitan dengan kemiskinan pedesaan. Berbagai konsep tentang kemiskinan pedesaan tergantung pada sisi mana orang memandangnya sesuai dengan masalah-masalah dipedesaan. Masalah kemiskinan pedesaan di negara yang sedang berkembang merupakan masalah yang cukup rumit, meskipun negara-negara tersebut sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi.

Masalah kemiskinan pedesaan *(rural Poverty*), menjadi topik yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pembangun pedesaan, karena sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan, dan semua ini menjadi bagian dari kajian sosiologi pembangunan Kajian kemiskinan dalam buku ini lebih banyak difokuskan pada kajian kemiskinan terhadap Komunitas Adat Terpencil di wilayah Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua

BEBERAPA KONSEP TENTANG PEMBANGUNAN

Pengertian Pembangunan

Secara terminologis, pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa terminologi lain yang berlainan arti.[5] Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

Kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharpakan bagi 'sebagian orang tersingkir' dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah

[5] Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal.7

yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya[6]

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya[7]. Dalam konsep pembangunan yang demikian terlihat bahwa pembangunan tidak sekedar berbasis fisik, akan tetapi bagaimana pembangunan tersebut dapat bermanfaat bagi semua manusia. Sejalan dengan hal itu setiap pembangunan seharusnya memperhatikan kondisi maupun karakteristik dari setiap wilayah yang dijadikan obyek pembangunan itu sendiri.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembanganmasyarakat (Djojonegoro, 1996: 7).

Dalam konteks Indonesia, makna *developmentalisme* mengalami perkembangan dari konsep ideal tentang sebuah tatanan kesejahteraan masyarakat yang diformulasikan oleh negara-negara Barat. Format kesejahteraan ini kemudian mengalami perdebatan ketika developmentalisme sedikit banyak dipraktekkan ketika zaman Orde Baru berkuasa. Perdebatan ini terjadi karena pada dasarnya makna developmentalisme dan kesejahteraan sangat tergantung dari

[6] Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1995 hal 1-2

[7] Ibid, 1995:13

konteks dimana istilah tersebut digunakan dalam melihat keadaan[8]

Modernization bermakna melakukan formulasi ulang atas sesuatu yang asalnya primitif atau tradisional, menuju kondisi yang lebih baik secara fisik. Pengertian ini menekankan adanya perubahan atau pertambahan bentuk fisik dari kondisi asalnya. *Empowering* bermakna upaya memberdayakan sesuatu untuk lebih berdaya lagi dari kondisi sebelumnya, dimanan seseorang atau kelompok tidak memiliki skil. Titik tekan istilah ini ada terletak pada penambahan kemampuan yang dimiliki oleh obyek proses *empowering*. Jika ada seorang manusia yang asalnya hanya mampu membaca dan memahami sepuluh lembar tulisan dalam satu jam, lalu melalui proses tertentu kemampuan tersebut bertambah menjadi seratus lembar tulisan dalam satu jam, maka ilustrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai akibat *empowering*.

Industrialization identik dengan istilah industrialisasi. Term ini bermakna perubahan atau peralihan orientasi mata pencaharian dari yang bersifat agraris atau bercocok tanam menuju bentuk pekerjaan industri. Manusia tidak lagi memposisikan dirinya untuk tergantung penuh pada produk jadi alam dalam memenuhi kebutuhannya, namun lebih pada pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendapatkan kebahagiaan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki manusia. *Economic growth* dapat diartikan dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika berbicara tentang pembangunan, maka tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kemampuan ekonomi dari manusia yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Muara dari *economic growth* adalah kemakmuran yang juga dapat menjadi tanda bahwa pembangunan telah berhasil dilakukan.

Term *europanization* muncul sebagai dampak konsep pembangunan yang diterapkan di Indonesia, bahwa kiblat kemajuan adalah negara-negara Eropa. Jika Indonesia ingin

[8] Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002) hal. 12-13

mencapai kemajuan atau kemakmuran yang diinginkan, maka Indonesia harus meniru negara-negara Eropa, karena disanalah letak kemajuan tersebut. Jadilah upaya imitasi gaya hidup tersebut menjadi bagian dari terminologi *europanization* di Indonesia. Istilah ini juga dekat dengan *westernization* atau kebarat-baratan. *Political change* adalah perubahan politik. Artinya, perubahan kondisi politik sebuah negara akan membawa dampak pada arah pembangunan yang dilakukan di negara tersebut, sehingga sekecil apapun pengaruhnya, perubahan politik akan ikut mewarnai orientasi, langkah dan model pembangunan yang sedang berjalan di sebuah negara tertentu. Sebab sarana politik dapat mempeganruhi semua tatanan baik yang berhubungan dengan kebijakan maupun berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan yang akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakatnya.

Dari beberapa penelusuran makna pembangunan secara kebahasaan maupun secara konseptuak tersebut, dapat ditentukan beberapa konsep maupun nilai dasar dari konsep pembangunan meliputi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pembangunan mengandung makna proses dan mekanisme yang harus dilalui. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Daur proses itupun dapat dimulai melalui satu titik dan berakhir pada titik lain, lalu dimulai lagi dari titik awal dimana sebelumnya telah dimulai.[9] *Kedua*, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada pertambahan nilai (*value*) dan guna (*utility*) dari obyek pembangunan. Dalam hal ini, dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangunan. *Ketiga*, terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan. Ada subyek yang

[9] Meminjam istilah Thomas Kuhn dalam pemikiran ilmu-ilmu sosial yang mengibaratkan bahwa ada daur paradigma yang lebih dapat dikatakan sebagai siklus dalam khazanah teori-teori sosial. Siklus paradigma tersebut suatu saat akan berubah dan berhenti pada satu format, untuk selanjutnya memulai kembali rotasi perubahannya. Lihat George Ritzer, *Sociologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) h. 15

melakukan pembangunan, ada rangkaian langkah yang menjadi panduan, dan terdapat juga obyek atau sasaran pembangunan.

Beberapa Aspek Dalam Model Pembangunan

Dimensi pembangunan adalah *subject matter* yang menjadi kawasan garapan dari pembangunan. Sebagai sebuah upaya menambah nilai dan guna sesuatu menjadi lebih baik, pembangunan memiliki sekian banyak bidang garapan yang saling terkait, namun tidak dapat disatukan dalam sebuah kawasan kajian secara makro semata-mata. Dimensi-dimensi inilah yang menjadi rel dan bidang garapan dari sekian banyak upaya peningkatan kemakmuran masyarakat sebuah negara yang menerapkan pembangunan. Ada *grand goal* yang dicanangkan tiap pelaku pembangunan dalam melakukan aktifitasnya, namun ada juga *spesific goal* dalam pembangunan yang berada dalam dimensi atau kawasan tertentu.

Kesemuanya memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, namun keterkaitan tersebut tidak secara langsung menafikan spesifikasi orientasi masing-masing dimensi. Pelaku pembangunan seringkali menentukan standar keberhasilan dari aktifitas yang mereka lakukan untuk mencapai *goal of development*. Standar tersebut akan dapat di-*breakdown* dari sekian banyak indikator pertambahan kemajuan dari dimensi-dimensi pembangunan yang telah dicanangkan sebagai sasaran. Keberhasilan sebuah pembangunan akan dapat dilihat dan diukur dari indikator-indikator tersebut, sehingga pembangunan memiliki kejelasan orientasi dan target yang dapat dinilai secara riil. Adapun dimensi pembangunan dapat dikategorikan dalam wilayah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumberdaya manusia, hukum, politik, sarana, dan keadilan masyarakat secara umum.

Pembangunan dalam dimensi ekonomi. Dalam berbagai literatur dapat bibedakan anatara model yang ditarik dari berbagai abstraksi dari kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang dijumpai dalam pembangunan masyarakat dengan model pembangunan yang ditarik dari teori-teori pembangunan. Dalam kepustakaan Ilmu-Ilmu sosial (bidang ekonomi, politik

dan sosiologi) kita sering menjumpai istilah "Model Yugolavia, Korea dan Cina atau model Tanzania.

Salah Pemikiran J.A Ponsioen dalam bukunya *National Development A Sociological Contribusion dikutif* Rahardjo Dawam (1985) menyebut adanya beberapa model pembangunan yang terpenting yaitu model Rostow, model W. Athur, Model Evertt Hagen dan model Feter Heinz. Ponsioen berusaha untuk mengabstrasikan dengan jalan mengambil unsur-unsur tertentu yang dianggap merupakan gagasan pokok dan dapat dipakai untuk membentuk model yang dibayangkannya. Selanjutnya Dari pikiran Ponsioen tersebut terlihat bahwa model pembangunan yang di tawarkan dalam rumusannya yakni "Komponen-komponen tujuan (*goals*), komponen faktor dan komponen dimensi waktu" yang semuanya itu dianggap sangat relevan dengan dimensai pembangunan ekonomi.

Kajian tentang tentangt dimensi atau model pembangunan, seharusnya harus dilihat dalam kompnen tingkatan (level) dari model itu sendiri. Pada tingkat pertama; model idiologi, misalnya model pembangunan kapitaslis, sosioalis, fasis (kapitalis negara) atau sosialisme atau demokrasi. Model ini dapat disebut model model-model baru yang diusulkan atau sedang dicoba di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sesauai dengan tafsiran bagi negara-negara berkembang. Model ini seolah-olah identik dengan idiologi suatu negara atau pola idiologi tertentu. Dalam kenyataannya model pada tingkat-tingkat idiologi itu walaupun sama akan tetapi berbeda-beda untuk suatu negara[10]

Pada tingkat selanjutnya terdapat model teori ekonomi dalam pengertian ekonomi politik (*political economi*) Bjon Hettne dalam artikelnya *Current Issues In Develofment Theory*[11] menyenut beberapa varian model pembangunan Barat yang berasal dari dari tradisi inteketual dan kultur yang

[10] Dawam Rahardjo Esei-Esesi Ekonomi Politik.(Jakarta LP3ES.1985 hal.70)

[11] Ibid (1985 hal.70)

sama yaitu model liberal, model kapitalis negara (*state capitalism*), Model Sovyet. Disamping itu kita bisa melihat pada tingkat teori ekonomi pembangunan yang lebih spesifik, seperti model Rostow atau lewis. Model ini tergantung pada pada penialain seseorang, apakah seseorang tertentu dapat memandang teori cukup koprehensif dalam memandang dan melalukan ketajaman analisis, terhadap setiap permasalahan pembangunan, baik darisi perencanaan, pelaksanaan maupun manfaat bagi masyarakatnya.

Model Patisipasi Dalam Pembangunan

Konsep utama pertaisipasi adalah "keikutsertaan salam suatu kelompok dalam program-program pemerintah" Konsep ini secara umum sudah dikenal oleh masyarakat luas terutamabagi pelaksana pembangunan, walaupun demikian apakah konsep ini tersebut dapat membantu prosespembangunan secara universal?. Seorang peneliti Dwight V. King, dalam usaha mencari ketenangan mengenai hubungan antara urbanisasi, industrialisasi dan partisipasi telah mendefinisikan variable partisipasi dalam pengertian tersebut adalah keikutrertaan mastyarakat dalam pembangunan[12]

Dalam berbagai literatur sering dijumpai istilah *"sosial partisipation"* yaitu suatu keadaan, dimana sesorang ikut melaksanakan bernbagai kegiatan baik kegiatan fisik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, semua orang saling bantu membantu dan berinteraksi diantara sesamnya. Dalam kelompok tersebut seseorang menemukan identifikasi pribadinya karena bersama-sama orang lain merasakan saling berinteraksi, kesetiaan, bertanggung jawab bersama serta dalam suasana tradisi persahabatan. Oleh Henry Pratt dikonotasikan dengan seseorang yang melakukan atau mengalami partisipasi (*participant*) berarti mengambil bagian

[12] Dwight Y King, "Urbanisasi, Isdustrialisasi dan Partisipasi: , dalam Prisma.No. 4 Agustus 1974.

dalam kegiatan suatu kelompok, mamainkan suatu peran dan menjadi anggota yang aktif dalam suatu kelompok fungsional[13]

Setiap orang selalu melakukan partisipasi sosial, hanya saja caranya yang berbeda. Partisipasi yang terjadi pun dapat dilihat dari partisipasi yang dilakukan kelompok. Terdapat perbedaan dari apa yang disebut dengan *primary group* (kelompok utama) dan *second group* (kelompok sekunder). Kelompok primer merupakan kelompok yang saling mengenal secara pribadi, hubungannya erat, dan sering melakukan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang, hubungannya tidak berdasarkan mengenal secara pribadi dan melakukan kerjasama. Kelompok primer terdiri dari masyarakat yang bercirikan masyarakat tradisional dan kelompok sekunder bercirikan masyarakat perkotaan dimana hubungan terjalin berdasarkan perhitungan *reward* dan *punnishment* yang didapat berdasarkan perhitungan maupun pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok.

Berbicara mengenai partisipasi sosial tentu tidak akan terlepas dari interkasi sosial. Antara individu, anggota masyarakat, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan masyarakat sebagai unsur-unsur struktur masyarakat, yang kesemuanya itu saling beinteraksi untuk baik dalam sebuah pengambilan keputusan maupun hal-hal yang memiliki hubungan dengan kepenntingan masyarakat secara keseluruhan. Konsep interaksi dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk pokok, yaitu "kerjasa sama" (*co-operation*), "persaingan" (*competition*) dan "pertentangan" atau "pertikaian" (*conflik*).

[13] Henry Partt Fairchild dan 100 Authorities, *Dictionary of Sociology and Reated Sciennse*, Little Adam & Co, 1996, hal,283

Bagian Ketiga

TEORI MODERNISASI DALAM PEMBANGUNAN

Teori Modernisasi

Teori modernisasi lahir sebagai produk pasca perang dunia II. Teori ini dirumuskan untuk menjawab permasalah baru yang terkait dengan pembagian masyarakat dunia ke dalam tiga dunia yang berbeda. Dunia pertama; adalah masyarakat industri maju yang meliputi Eropa Barat, Amerika Serikat yang kemudian disusul dengan Jerpang dan negara-negara industri baru Timur Jauh. Dunia kedua meliputi masyarakat sosialis totaliter yang didominasi oleh Uni Sovyet, yang menempuh industrialisasi dengan biaya sosial yang besar. Sedangkan dunia ketiga terdiri dari masyarakat post kolonial di Selatan dan Timur yang terbentang dan tenggelam dalam era agraris dan pra industri.

Teori modernisasi klasik memfokuskan perhatian kepada perbedaan antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga. Teori modernisasi dan konvergensi sangat populer pada tahun 1950-an dan pertengahan tahun 1960-an Tokoh-tokoh teori modernisasi antara lain Lirner, Everret Hegen, Talcott Parsons dan Eisenstadt. Boleh dikatakan teori modernisasi dan konvergensi ini merupakan bentuk terakhir Evolusionisme (*teori evolusi*) yang mencoba menjelaskan perubahan "dunia kurang maju" ke "dunia yang lebih maju"[14]

Asumsi kedua teori terori tersebut adalah: (a) perubahan bersifat unilinier, dimana masyarakat yang kurang maju cenderung mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh masyarakat yang lebih maju, (b) arah perubahan tak dapat

[14] Sztompoka, Sosiologi Perubahan Sosial, Predana Media, Jakarta, 2005 hal 23

berubah dan bergerak ke arah modernitas sehingga tujuan akhir dari proses perkembangan seperti halnya dengan masyarakat Barat yang industrialis, kapitalis dan demokratis, (c) perubahan terjadi secara bertahap, meningkat dan relatif tanpa gangguan, (d) proses perubahan terjadi menurut tahap yang berurutan dan tidak ada tahapan yang dilompati, sebagimana tahap perubahan yang digambarkan oleh Rosstow, (e) memusatkan perhatian kepada faktor penyebab internal baik yang berupa diferensiasi struktural dan fungsional maupun peningkatan daya adaptasi, (f) perubahan bersifat progresif dengan keyakinan bahwa proses modernisasi mampu menciptakan perbaikan kehidupan sosial secara universal dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Teori modernisasi menganggap bahwa pada umumnya negara-negara terkebelakang akan menempuh jalan yang sama dengan industri maju di Barat sehingga kemudian akan menjadi negara berkembang pula melalui proses modernisasi (Light, dkk, 1989). Teori ini berpendapat bahwa pada hakekatnya masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi berbagai kekurangan dan masalahnya sehingga dapat mencapai tahap "tinggal landas" (*take-off*) ke arah suatu perkembangan ekonomi.

Menurut Etzioni-Halevy dan Etzioni (1973) transisi dalam keadaan tradisional ke modernitas melibatkan revolusi demografi yang ditandai menurunnya angka kematian dan angka kelahiran, menurunnya ukuran dan peran dan pengaruh keluarga, terbukanya sistem stratifikasi, peralihan dari struktur feodal atau kesukuan ke suatu birokrasi, menurunnya pengaruh agama, beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal, munculnya kebudayaan massa, dan munculnya perekonimian pasar dan industrialisasi. Moore (David, 1990) memandang modernisasi merupakan transformasi "total" masyarakat tradisional atau pra-modern ke dalam tipe teknologi dan organisasi sosial terkait yang mensiasati bangsa maka sejahtera secara ekonomi, dan relatif stabil secara politik. Pandangan Moore sama dengan

Raillon (1989) bahwa: ”modernisasi merupakan suatu proses dimana berlangsung transformasi di segala bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial kultural dan lain-lain, dimana berbagai perubahan-perubahan yang merombak dasar, susunan dan corak masyarakat lama, yang statis dan terkebelakang yang bersifat tradisional agraris dan sebagai akibat perubahan, lahirlah masyarakat baru, yang dinamis dan progresif yang bersifat industrial rasional".

Bagi ahli seperti Apter (Lauer, 1993) memandang modernisasi sebagai proses non-ekonomi dimulai bila kebudayaan mewujudkan sikap menyelidik dan mempertanyakan tentang bagaimana manusia membuat pilihan moral (atau normatif), sosial (atau struktural) dan personal (atau perilaku). Sedangkan Pool (Lauer,1993) melihat modernisasi sangat luas artinya, mencakup proses memperoleh citra (images) baru seperti citra tentang arah perubahan atau citra tentang kemungkinan perkembangan.

Selain itu Black (dalam David dan Mark, 1990) memandang modernisasi sebagai suatu proses yang dengan proses itu lembaga-lembaga yang berkembang secara historis beradaptasi pada fungsi-fungsi yang berubah dengan cepat yang menggambarkan peningkatan pengetahuan manusia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan manusia mengendalikan lingkungannya dan menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan. Menurut Budiman (1996) modernisasi didasarkan pada faktor non material penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor ini menjelma dalam pikiran psikologi dari setiap individu, atau nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi orientasi dalam memberikan arah kepada tingkah lakunya.

Faktor non material atau ide yang di anggap sebagai faktor yang mandiri, dan biasa dipengaruhi secara langsung melalui hubungan dengan dunia ide yang lain. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk mengubah psikologi seseorang atau nilai-nilai budaya masyarakat. Meskipun terdapat sejumlah ciri-ciri,

pandangan serta perbedaan ahli terhadap modernisasi, namun pandangan yang demikian itu pada akhirnya tetap bermuara pada arti modernisasi. Lirner (Lauer, 1993) memadang ciri-ciri kemoderenan sebuah masyarakat tersebut meliputi komponen-komponen (1) Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut sendiri, setidaknya tingkat pertumbuhan yang cukup untuk meningkatkan produksi mauoun konsumsi secara tetap; (2) Kadar partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang memadai;(3) Difusi norma-norma sekuler-rasional dalam kebudayaan; (4) Peningkatan suatu mobilitas dalam masyarakat dan (5) Tranformasi keperibadian individu, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam tatanan sosial yang sesuai dengan tuntutan komodernan.

Selanjutnya Halivaland (1988) mengemukakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan kuttural dan sosio-ekonomis dimana masyarakat-masyarakat sedang berkembang memperoleh sebagian karakteristik dari masyarakat industri barat. Ada asumsi bahwa proses modernisasi adalah proses pembaratan masyarakat atau menjadikan masyarakat Timur sama dengan masyarakat barat, dan apabila tidak mengikuti pola pemikiran barat berarti ketinggalan zaman dan kuno, sesungguhnya anggapan yang demikian itu terlalu etnosentrisme.

Modernisasi berdampak pada sebagian atau seluruh sektor kehidupan masyarakat. Lauer (1993) memandang paling tidak berdampak nyata pada perubahan beberapa aspek yakni aspek: demografi, sistem stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, serta nilai sikap dan keperibadian. *Pertama*; Perubahan di bidang demografi akibat modernisasi misalnya terjadi pertumbuhan penduduk sebagai akibat menurunnya angka kematian, meningkatnya arus mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota (dari sektor agraris ke sektor industri) serta meningkatnya usia harapan hidup. *Kedua*; Perubahan dalam sistem statifikasi sosial juga terjadi selama berlangsungnya proses modernisasi. Menurut Kanto (2006) tanda-tanda perubahan tersebut tampak dalam

hal-hal seperti (a) pembagian kerja menjadi semakin kompleks bersamaan dengan meningkatnya spasialisasi, (b) status sosial yang dulunya berorientasi pada askripsi atau keturunan (*ascribed status*) cenderung berubah berdasarkan atas prestasi (*achieved status*), (c) alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang-orang yang terlibat dalam proses produksi menjadi perhatian utama, (d) peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan ke peran sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan (e) imbalan (*reward*) yang tersedia untuk didistribusikan meningkat, (f) imbalan (*reward*) didistribusikan dengan cara lebih adil, (g) terjadi pergeseran peluang kehidupan berbagai strata sosial, (h) terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial, (i) pergeseran dalam masalah serupa juga terjadi dalam distribusi kekuasaan.

Ketiga; Perubahan dalam sistem pemerintahan juga terpengaruh oleh modernisasi. Kepentingan dan loyalitas kedaerahan hingga taraf tertentu digantikan kepentingan dan loyalitas nasional. Juga terjadi perkembangan demokratisasi dalam politik, kekuasaan politik cenderung terdistribusi semakin luas diberbagai lapisan masyarakat, kendatipun tingkatanya tidak sama baik antara negara maupun antar masyarakat.

Keempat; perubahan dibidang pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kanto melihat (2006) perubahan pendidikan secara kuantitatif terjadi perkembangan jumlah lembaga pendidikan dan jumlah pelajar dan mahasiswa sedangkan secara kualitatif, diantaranya pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan profesinalitas agar masuk ke pasar kerja yang semakin terspesialisasi. *Kelima*; perubahan dalam kehidupan keluarga. Pengaruh kehidupan diperkotaan yang modern berpengaruh nyata terhadap perubahan kehidupan keluarga pedesaan yang tradisonal dan agraris. Hal ini dimungkinkan karena interaksi antara desa dengan kota semakin intensif. *Keenam*; Modernisasi juga

memberi kontribusi terhadap terjadinya perubahan berbagai pranata sosial di pedesaan. Pranata sosial yang dulunya bersifat solidaritas sosial dan kekeluargaan cenderung berubah ke arah orientasi individual dan efisiensi.

Jika asumsi ini yang dipakai, maka akan terjadi penafsiran yang keliru dalam melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebab perubahan dalam masyarakat diharapkan pada proses perubahan orientasi berpikir ke arah yang lebih maju atau adanya perubahan pola hidup dari kehidupan sebelumnya. Untuk tidak menimbulkan berbagai tafsiran yang keliru terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari proses modernisasi, maka Haviland (1988) mengemukakan beberapa sub-proses terhadap modernisasi yaitu: (1); perkembangan teknologi dalam proses modernisasi, pengetahuan dan teknik tradisional yang sederhana terdesak oleh penerapan pengetahuan ilmiah dan teknik yang pada intinya dipinjam dari barat. (2), pengembangan pertanian, yang berupa pergeseran dari pertanian untuk keperluan sendiri menjadi pertanian untuk pemasaran. Orang tidak membudi dayakan tanaman dan hewan untuk keperluan sendiri, tetapi mereka makin lama banyak mengadakan budi daya untuk dipasarkan, dengan Iebih banyak bersandar kepada ekonomi uang dan pasar untuk mengadakan pembelian-pembelian. (3); ialah industrialisasi, dengan lebih mengutamakan bentuk energi non hewani (*inanimate*), khususnya bahan bakar fosil. Tenaga manusia dan hewan menjadi kurang penting, seperti halnya dengan kerajinan. (4) urbanisasi, yang ditandai oleh perpindahan penduduk dari pemukiman pedesaan ke kota-kota

Teori Rostow tentang tahapan proses pembangunan dalam masyarakat ini dipaparkan dalam bukunya yang berjudul: *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto*, yang terbit pada tahun 1960. Seperti halnya pendapat para ahli ekonomi pada masa itu, Rostow berpendapat bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak secara linier, dari masyarakat terbelakang menuju

masyarakat maju dan modern. Menurut Rostow, proses pembangunan melalui lima tahap, secara ringkas dikemukakan sebagai berikut:

1. Masyarakat Tradisional
   Bagi masyarakat tradsional pada umumnya ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang secara maksimal. Hal ini sangat berimplikasi pada ruang gerak masyarakatnya untuk berkembang. Dengan demikian, penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat terbatas, sesuai dengan kondisi kehidupan yang dijalani sehari-hari. Bagi masyarakat tradisional pemikirannya lebih dipengaruhi oleh kekuatan--kekuatan di luar kekuasaan manusia. Masyarakat bersifat statis sehingga perubahan sosial berjalan sangat lambat. Produksi cenderung habis untuk konsumsi, persediaan modal terbatas sehingga sedikit atau hampir tak ada investasi.
2. Prakondisi Lepas Landas
   Perubahan mulai terjadi dengan adanya pengaruh ekstemal, misalnya ikut campur tangannya masyarakat yang lebih maju. Ide-ide pembaharuan mulai masuk, masyarakat mulai berkembang dan bergerak menuju tahap prakondisi untuk lepas landas. Syarat-syarat yang diperlukan untuk proses industrialisasi mulai tampak. Kegiatan meningkatkan tabungan mulai terjadi yang selanjutnya dapat dipakai untuk investasi pada sektor-sektor produktif, termasuk investasi untuk pendidikan. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas berkembang secara signifikan. Kondisi sosial-politik semakin stabil dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat yang kuat.
3. Lepas Landas
   Periode ini ditandai dengan berkurangnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi meningkat, demikian juga sektor industri mulai berkembang pesat. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh diinvestasikan untuk industri dan pabrik-pabrik baru. Di pihak lain, terjadi

perkembangan teknologi pertanian. Usaha pertanian bukan sekedar untuk tujuan konsumtif, tetapi juga bermotif komersiil untuk memperoleh keuntungan. Pengembangan sektor pertanian mutlak dilakukan pada periode lepas landas karena sangat diperlukan untuk mendukung sektor industri dan proses modernisasi.

4. Bergerak ke kedewasaan
   Penerapan teknologi modern terjadi di seluruh sektor perekonomian. Periode ini ditandai dengan proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, kendatipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Sebagian kecil pendapatan nasional diinvestasikan kembali untuk mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Sektor industri dan jasa berkembang pesat. Negara memantapkan posisinya dalam perekonomian global/intemasional
5. Era konsumsi massa yang tinggi
   Pendapatan masyarakat terus meningkat. Konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, melainkan sudah meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama. Pada tahap terakakhir ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan paling utama. Surplus ekonomi cenderung dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pasca periode ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan mampu menopang kemajuan secara berkelanjutan.

Sebagaimana teori-teori modernisasi lainnya, teori Rostow ini juga didasarkan atas dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Titik terpenting dalam gerak kemajuan ini adalah periode lepas landas. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam proses modemisasi diperlukan kelompok wiraswastawan yang berani melakukan tindakan pembaharuan kendatipun ada risikonya. Menurut Rostow, terdapat dua kondisi sosial yang mampu melahirkan wiraswastawan, yaitu: ada elit baru dalam masyarakat yang merasa diingkari haknya oleh

masyarakat tradisional untuk mendapatkan prestise dan kekuasaan. masyarakat tradisional cukup fleksibel untuk memberi peluang kepada warganya mencari kekayaan atau kekuasaan politik sebagai cara untuk meningkatkan status sosialnya.

Dari beberapa konsep tentang modernisasi di atas, bagaimana konsep tersebut dengan konsep pembangunan pedesaan khususnya pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan serta mensejahterakan kualitas hidup petani. Dalam usaha tersebut diperlukan adanya partisipasi petani dan masyarakat, sehingga peningkatan produksi komoditas pertanian dapat dicapai lebih efisien dan dinamis dengan diikuti pembagian surplus ekonomi antar pelaku secara adil. Sehubungan dengan hal ini, Kasryno (2002) mengidentifikasikan bahwa strategi pembangunan pertanian merupakan peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (*human capital*) masyarakat pertanian, meningkatkan penguasaan aset produktif pertanian, inovasi baru dan menata kembali kebijakan pembangunan ekonomi dan pengembangan kelembagaan pertanian dalam arti yang lebih luas.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah produktivitas tenaga kerja dan penguasaan aset produktif yang rendah disertai adanya dualisme antara pertanian rakyat yang tradisional dan perusahaan besar yang maju dan modern serta dualisme antara kota dan desa. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan, oleh karena itu, pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan.

Jika mengkaji tentang pembangunan di Indonesia, maka teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembanguan di Indonesia. Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori Modernisasi, yaitu teori

evolusi dan teori fungsional. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana asumsi teoretis teori Modernisasi dan implikasinya bagi pembangunan di Indonesia. Asumsi teori modernisasi merupakan hasil dari konsep dari metafora teori evolusi. Menurut teroi teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitive menuju ke tahapan yang lebih maju. Berdasarkan asumsi tersebut, maka para toretikus perspektif modernisasi membuat kerangka teori dan tesis dengan cirri-cir sebagai berikut:

Pertama, modernisasi merupakan proses bertahap. Teori Rostow tentang tinggal landas membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh masyarakat, diawali dengan masa primitif dan sederhana menuju masyarakat menuju dan berakhir pada tatanan yang maju dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Indonesia, pada saat teori modernisasi digulirkan, Indonesia masih dalam suatu kondisi yang sangat memprihatinkan sebagai produk jajahan. Masyarakat yang tradisional dan belum bersentuhan dengan dunia teknologi dan tatanan hidup yang kompleks. Pada saat awal negara Indonesia merdeka, kondisi Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang primitive. Kemudian pada saat Indonesia memulai dengan babak baru, yaitu pada masa Orde Baru, maka pada saat inilah adopsi terhadap konsep modernisasi dimulai. Seperti sudah dipahami oleh banyak pihak, bahwa pembangunan di Indonesia memang sangat bernuansa teori modernisasi,hal ini tidak mengheranakan karena sebagian besar konsultan pembangunan Indonesia merupakan ahli di bidang teori Modernisasi. McClelland merupakan salah satu contoh konsultan pembangunan Indonesia yang banyak mewarnai proses pembangunan di Indonesia.

Kedua, modernisasi sebagai proses homogenisasi. Tidak terbantahkan bahwa proses modernisasi merupakan sebuah proses yang menuntut kesamaan dan kemiripan, dan hal ini menjadi indikator bahwa proses pembangunan dikatakan berhasil. Proses homogenisasi ini terjadi dalam beberapa

tingkat, yang pertama homogenisasi internal, yaitu homogenisasi yang terjadi di dalam negara tersebut. Artinya, diantara masyarakat sudah tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial. Sedangkan tingkat yang kedua adalah homogenisasi eksternal yaitu kemiripan dan kesamaan antara negara maju dan negara berkembang. Watak homogenisasi ini merupakan salah satu target para pemikir teori Modernisasi untuk melaksanakan pembangunan secara efektif. Walaupun dengan watak tersebut, modernisasi menghadapi kritik yang besar, bahwa ternyata ide homogenisasi ini hampir tidak mungkin untuk bisa terwujud. Karena proses transfer budaya antara negara maju dan negara berkembang, merupakan transfer yang evolutif sehingga hal ini membutuhkan waktu yang relative lama untuk dapat mewujudkan target homogenisasi.

Ketiga, modernisasi merupakan proses *Eropanisasi* dan *Amerikanisasi* atau yang lebih populer bahwa modernisasi itu sama dengan barat. Hal in terlihat bahwa keberhasilan itu merupakan sesuatu yang bersifat barat. Negara barat merupakan negara yang tak tertandingi dalam kesejahteraan ekonomi dan politik. Dan negara maju ini dijadikan mentor bagi negara berkembang. Dalam hal yang lebih nyata, kebijakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi sepenuhnya mencontoh hal-hal yang dilakukan negara maju tanpa memperhatikan factor budaya dan sejarah local negara berkembang. Walaupun, saat ini negara maju sedang mengalami krisis ekonomi yang dahsyat dan kenyataannya negera berkembang masih belum terimbas secara besar-besaran. Hal ini menunjukkan bahwa teori Modernisasi sedang menghadapi kritik yang hebat. Perbaikan terhadap teori Modernisasi terutama praktek-praktek pembangunan di negara berkembang perlu dilakukan.

Keempat, modernisasi merupakan proses yang tidak mundur. Proses modernisasi merupakan proses yang tidak bisa dihentikan ketika sudah mulai berjalan. Dengan kata lain ketika sudah melakukan kontak dengan negara maju maka dunia ketiga tidak mampu menolak proses selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dalam proses bagaimana negara berkembang terus

menerus meminta bantuan negra maju untuk dapat membantu baik secara financial maupun intervensi kebijakan politik. Hanya sedikit dari negara dunia ketiga yang melakukan penolakan terhadap asumsi yang keempat dari teori Modernisasi ini, yaitu Korea Utara dan Iran yang secara tegas menolak intervensi yang dilakukan negara maju.

Kelima, modernisasi merupakan perubahan progresif. Hal ini memang diterima oleh para pemikir pembangunan, namun demikian efek samping dari proses ini merupakan suatu proses yang memakan banyak korban yang secara sosial tentu saja berbiaya mahal. Sebagai contoh pada saat pembuatan waduk Kedungombo, maka masyarakat sekitar Kedungombo merupakan elemen yang paling dikorbankan dan ongkos sosial yang juga semakin mahal. Belum lagi contoh-contoh proses modernisasi yang melibatkan atau mengorbankan banyak orang, paling mudah dilihat adalah proses pembuatan jalan tolo di Jawa yang tentu saja akan mengeluarkan ongkos sosial yang tidak sedikit.

*Keenam,*modernisasi memerlukan waktu panjang. Karena modernisasi merupakan proses evolusioner, sehingga perubahan yang dapat dilihat juga tidak serta merta cepat. Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang lama untuk melihat perubahan yang dialami, bahkan membutuhkan waktu antar generasi untuk melihat seluruh proses yang dijalankan modernisasi, termasuk akibat yang dialami proses modernisasi.

Jika tilikan modernisasi didasarkan atas teori fungsional, maka teori modernisasi mengandung asumsi bahwa modernisasi merupakan proses sistematik, transformasi, dan terus-menerus. *Pertama*, sebagai proses sistematik. Proses modernisasi merupakan proses melibatkan seluruh aspek kehidupan bernegera, termasuk industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi. Dan hal ini membentuk wajah modernisasi sebagai sebuah bentuk yang teratur disbanding sebuah proses yang tidak beraturan. *Kedua,* sebagai proses transformasi. Proses ini memberi arti atau makna bahwa modernisasi merupakan proses yang membentuk dari sebuah kondisi tradisional menjadi modern dalam segala aspek sosial

budaya. Ketiga, sebagai proses yang terus-menerus. Proses modernisasi melibatkan perubahan sosial yang terus-menerus. Sekali perubahan sosial terjadi, maka aspek sosial yang lainnya juga akan ikut terpengaruh. Selanjutnya, akan dibahas tentang teori-teori pilihan yang termasuk dalam teori Modernisasi.

Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi

Teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori yang terus dipakai dan terus dikemabangkan. Teori ini dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, yang bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang, masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi yang tinggi yang diwujudkan dalam saham, danareksa, indeks, dan bentuk investasi yang lain. Contoh paling dekat dapat dilihat bagaimana masyarakat Singapura memiliki tingkat investasi yang tinggi dibanding negara-negara di Asia Tenggara.

Asumsi yang mendasari teori ini bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah investasi modal. Jika investasi model sudah berkembang baik, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. Maka, salah satu implikasi dalam pembangunan yang dilaksanakan pada Negara-negara berkembang seperti di Indonesia, pemerintah mendorong penanaman investasi dan hal membuat investasi tumbuh subur di Indonesia. Pemerintah Indonesia berpijak dari teori Harrod-Domar, sampai membuat suatu lembaga Penanaman Modal Nasional, karena langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Walaupun demikian, terjadi suatu ironi yang terjadi di Indonesia, ketika penanaman modal dilakukan secara masal oleh negara asing dan membeli asset startegis yang dimiliki oleh bangsa. Alih-alih menjaring investasi agar besar, yang terjadi adalah penggerogotan asset negara. Maka dari itu, salah

satu kritik terhadap teori ini bahwa teori sangat mengedepankan pertumbuhan ekonomi.Salah satu aspek yang tidak dibahas adalah aspek manusia, karena menurut Harrod-Domar yang penting adalah menyediakan modal, masalah manusia setiap negara sudah memilikinya. Implikasinya, pengembangan kualitas manusia tidak menjadi perhatian Harrod-Domar. Dalam pikirannya kualitas manusia merupakan wilayah tersendiri dalam analisisnya. Domar lebih memfokuskan pada wilayah penyediaan modal dalam membangun suatu wilayah.

Max Weber: Etika Protestan

Teori Weber tertarik untuk membahas masalah manusia yang dibentuk oleh budaya di sekitarnya, khususnya agama. Weber tertarik untuk mengkaji pengaruh agama, pada saat itu adalah protestanisme yang mempengaruhi munculnya kapitalisme modern di Eropa. Pertanyaan yang diajukan oleh Weber adalah mengapa beberapa negara di Eropa dan Eropa mengalami kemajuan yang pesat di bawah system kapitalisme. Setelah itu, Weber melakukan analisis dan mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebabnya adalah Etika Protestan.

Kepercayaan atau etika protestan menyatakan bahwa hal yang menentukan apakah mereka masuk surge atau masuki neraka adalah keberhasilan kerjanya selama di dunia. Apabila dia melakukan karya yang bermanfaat luas maka dapat dipastikan bahwa dia akan mendapatkan surga setelah mati. Semangat inilah yang membuat orang protestan melakukan kerja dengan sepenuh hati dan etos kerja yang tinggi. Dengan demikian, seluruh pekerjaan yang dilakukan akan serta-merta menghasilkan surga dan agregat semangat individual inilah yang memunculkan kapitalisme di Eropa dan Amerika.

Hasil penelitian Weber ini merupakan penelitian pertama yang menghubungkan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Dan jika diperluas, maka agama bisa menjadi sebuah kebudayaan dan hal ini kemudian merangsang penelitian mengenai bagaimana hubungan antara kebudayaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, istilah Etika Protestan ini

menginspirasi Robert Bellah yang menulis tentang agma Tokugawa yang ada di Jepang dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Jepang, hal itu bisa dilihat bagaimana tingginya pertumbuhan ekonomi di Jepang. Hal ini tentu saja relevan jika diterapkan diIndonesia, bahwa semangat agama di Indonesia dapat mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

David McClelland: Dorongan Berprestasi

Pertanyaan besar yang dimunculkan oleh McClelland adalah apakah yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan pada banyak masyarakat di dunia. McClelland sangat terpengaruh oleh pandangan Weber dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang memandang bahwa semangat kapitalisme sangat dipengaruhi oleh nilai individual yang dimiliki oleh seseorang. Dasar ini menajdi sangat penting dalam pengembangan teorinya tentang dorongan berprestasi. McClelland berpendapat bahwa pada dasarnya jika sebuah masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka yang perlu diubah adalah dorongan berprestasi individu yang ada dalam masyarakat.

McClelland kemudian melakukan penelitian terhadap dokumen kesusasteraan dari jaman Yunani seperti puisi, drama, pidato, epic dan sebagainya. Karya tersebut dinilai oleh para ahli independen, apakah di dalam karya tersebut terdapat n-ach atau dorongan berprestasi atau tidak. Jika karya tersebut mengandung optimisme yang tinggi, keberanian untuk mengubah nasib, tidak cepat menyerah. JIka tidak, maka nilai n-ach nya rendah. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi didahului oleh n-ach yang tinggi, demikian pula sebaliknya.

McClelland menyimpulkan bahwa n-ach merupakan semacam virus yang perlu ditularkan kepada orang-orang dimana masyarakatnya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu implikasi praktis yang terjadi di Indonesia adalah diadakannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan n-ach ini yaitu dengan achievement motivation

training (AMT) yang sering diselenggarakan di Indonesia. Sampai saat ini metode pelatihan untuk meningkatkan motivasi berprestasi sering dilakukan dan tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

W.W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan

Rostow adalah seroang ahli ekonomi. Perhatian terhadap pembangunan yang dilakukan Rostow adalah pengkajian terhadap proses pembangunan, dimana Rostow menjabarkan menjadi Lima Tahap Pembangunan, yaitu: (a) Masyarakat Tradisional; (b) Prakondisi untuk Lepas Landas; (c) Lepas Landas; (d) Bergerak ke Kedewasaan dan (e) Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi

Melalui lima tahap pembangunan itu, maka dapat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat apakah kesemua proses tersebut sudah dijalankan oleh suatu negara. Dan dasar pembedaan lima tahap ini merupakan pembedaan dikotomis antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Rostow menyebutkan bahwa negara yang melindungi kepentingan usahawan untuk melakukan akumulasi modal maka, negara sudah mulai menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini nampak bahwa Rostow sangat terpengaruh teori Harrod-Domar tentang tabungan dan investasi.

Bert F. Hoselitz: Faktor-faktor Non-ekonomi

Hoselitz mengkaji faktor-faktor non-ekonomi yang tidak dikaji oleh Rostow. Faktor tersebut sebagai factor kondisi lingkungan yang penting dalam proses pembangunan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa factor ekonomi sangat penting dalam proses pembangunan, namun factor kondisi lingkungan seperti perubahan kelembagaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat mempersiapkan kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Faktor non ekonomis yang penting antara lain pemasokan tenaga ahli dan terampil. Bahwa salah satu factor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, diperlukan sebuah penyediaan tenaga terampil yang memadai, karena jikadidukung oleh modal dan investasi saja, maka proses pembangunan juga tidak berjalan lancar.

Salah satu hal menarik dari pemikiran Hoselitz ini adalah penekanannya pada aspek kelembagaan yang menopang pembangunan seperti lembaga pendidikan, mobilisasi modal. Dri factor-faktor individual dan budaya, Hoselitz bergerak untuk mengkaji masalah lebih nyata yaitu lembaga politik dan sosial.

Inkeles-Smith: Manusia Modern

Inkeles dan Smith juga mengkaji tentang pentingnya faktior manusia sebagai factor penting dalam penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar masalah pemasokan modal dan teknologi saja. Aspek manusia penting sekali sebagai pelaksana teknologi atau pelaku utama proses pembangunan yang berlangsung. Maka Inkeles dan Smith kemudian memberikan ciri-ciri manusia modern, antara lain: keterbukaan terhadap terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi pada kehidupan masa sekarang dan kehidupan masa depan, memiliki kesanggupan dalam merencanakan,serta memiliki kepercayaan bahwa manusia bisa menguasai alam.

Berdasarkan kajiannya, Smith-Inkeles menemukan bahwa pendidikan adalah lembaga paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan dipandang tiga kali lebih efektif dibanding pendekatan yang lain. Jika melihat kondisi Indonesia, salah satu yang krusial untuk dkembangklan adalah pendidikan, jika negara ingin modern dan peertumbuhan ekonomi tinggi, maka perhatian terhadap pendidikan harus besar.

Bagian Keempat

TEORI PERUBAHAN SOSIAL (SOCIAL CHANGE)

Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial secara teoritik meliputi beberapa hal penting, menyangkut dimensi perubahan sosial serta kondisi dan faktor-faktor perubahan sosial. Perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat, dan dengan adanya interaksi sosial juga akan menimbulkan proses perubahan masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi tatanan perubahan masyarakat lainnya dalam norma, nilai-nilai, pola-pola perilaku, organisasi sosial, dan lembaga sosial. Perubahan sosial seringkali mengacu kepada perubahan dalam struktur sosial dan hubungan sosial.

Perubahan sosial menurut Soemardjan (2009) merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik disebabkan kondisi geografis, kebudyaan material, komposisi penduduk, ideologi, difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial juga merupakan segala perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat, perubahan tersebut tidak hanya bersifat material tetapi imaterial.

Ogburn (Soelaiman, 1998) memandang perubahan teknologi misalnya, dapat menyebabkan perubahan lingkungan material, sehingga menimbulkan perubahan atau terjadi modifikasi kebiasaan-kebiasaan dan kelaziman yang umum dalam masyarakat serta pada lembaga sosial. Dalam kebudayaan, aspek material dan non-material merupakan

faktor yang selalu terlibat. Lebih lanjut Ogburn menawarkan suatu konsep analisis kebudayaan dengan konsep "*cultural lag*", Ogbum menjelaskan bahwa kebudayaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material.

Keduanya mendorong terjadinya perubahan dan saling berpacu dalam proses terjadinya perubahan. Biasanya yang lebih dahulu adalah pada perubahan material, sementara kebudayaan non-material perubahannya mengiringi kemudian. Perubahan kebudayaan material adalah penyebab perubahan non-material, perubahan non-material lebih lambat dalam penyesuaian bentuknya, atau pertumbuhan tidak selalu sama cepatnya dalam keseluruhannya, akan tetapi ada bagian yang tumbuh cepat dan ada bagian lain yang tumbuh lambat, bagian yang berkembang cepat dan bagian lain yang berkembang lambat tersebut saling berhubungan kebergantungan, keadaan yang demikianlah oleh Ogburn dinamakan dengan "*cultural lag*" (dalam Wallis, 1960). Berbagai macam kebudayaan dan tingkat kecepatan perkembangannya saling berbeda-beda, ada yang lebih cepat dan ada yang lambat prosesnya. Perubahan cepat pada suatu kebudayaan menimbulkan kebutuhan penyesuaian melalui perubahan lain, melalui berbagai macam korelasi hubungan setiap kebudayaan.

Kajian sosiologi yang menjelaskan tentang perubahan sosial berbasis teori evolusi (*evolution theory*), antara lain: (a) Pandangan Comte (1798-1857) tentang "tahap-tahap perkembangan manusia dan masyarakat" yang dikenal dengan hukum tiga tahap perkembangan, yaitu: Tahap teologik (fiktif); Tahap metafisik (abstrak); dan Tahap positif (riil) (Wibisono, 2005; Laeyendecker, 1991). Pandangan Comte inilah yang menjadi acuan para teoritisi evolusionis berikutnya (lnkeles, 1964; Giddens, 1985); (b) Pandangan Spencer (1820-1903) tentang evolusi masyarakat dari pola sederhana menuju yang limit dan kompleks, dari homogen (*homogeneity*) ke heterogen *(heterogeneity*) (Etzioni, 1973; Rossides, 1978); (c) Marx (1818-1883), tentang evolusi masyarakat menuju masyarakat

komunis tanpa kelas dengan padangan historis materialism; (Rose, 1963; Mutahhari, 1986); (d) Weber (1864-1920), tentang "*the role of ideas in history*".

Bagi Weber setiap individu terdapat potensi rasional untuk meraih tujuan, yang terdiri dari empat macam yaitu: traditional rationality, *value oriental rationality, effective rationality*, dan purposive rationality atau *rationality instrumental.* Keempatnya dapat berdiri sendiri, tetapi juga simultan yang secara bersama menjadi acuan perilaku masyarakat, dan tindakan yang paling utama adalah tindakan *rationality* instrumental (Wrong, 1970; Johnson, 1981; Laeyendecker, 1991); (e) Sorokin (1889-1968), bahwa: Perubahan sosial bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal; Pendekatan historis (*historical approach*) dalam studi perubahan sosial adalah sangat penting; dan Metode logika penuh arti yang terintegrasi dalam budaya (logico *meaningful integration of culture)* akan menghasilkan tiga sistem sosiokultural (*supersistem*), yaitu: sistem ideasional; sistem inderawi; dan sistem campuran. Sejarah sosiokultural merupakan siklus yang bervariasi antara ketiga supersistem yang mencerminkan kultur "agak" homogen (Green, 1972; Campbell, 1994).

Dimensi perubahan sosial menurut Himes dan Moore yang dikutip Soelaiman, (1998) ada tiga bentuk: dimensi struktural, kultural, dan dimensi interaksional. *Dimensi perubahan struktural* lebih mengacu pada perubahan-perubahan bentuk struktur dalam kehidupan masyarakat, perubahan dalam peranan dalam masyarakat, munculnya suatu peranan-peranan baru, serta perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga-lembaga sosial, atau perubahan dapat dijelaskan pula secara lebih praktis perubahan struktural meliputi; bertambah atau berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, adanya peningkatan atau penurunan jumlah peranan atau pengkategorian peranan, terjadinya pergeseran wadah atau kategori peranan, terjadinya modifikasi saluran komunikasi diantara peranan-peranan atau kategori peranan, terjadinya

perubahan dari sejumlah daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur.

Adapun dimensi kultural (Soelaiman, 1998) dalam perubahan mengacu pada perubahan-perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan (*discovery*), kemajuan berpikir dalam ilmu pengetahuan (*science*), pembaharuan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan proses peminjaman kebudayaan (*cultural borrowing*). Kesemuanya itu meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru dalam kebudayaan, bentuk-bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang secara tidak langsung menimbulkan difusi kebudayaan.

Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodifikasi secara terus menerus. Inovasi, difusi, dan integrasi kebudayaan melibatkan proses perubahan sosial dalam dimensi kultural. Inovasi kebudayaan melahirkan penemuan, peniruan, atau peminjaman alat-alat, difusi dikategorikan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan kebudayaan dan difusi secara benar, sedangkan integrasi meliputi, penolakan atau penerimaan terhadap bentuk-bentuk baru, duplikasi, cara hidup lama dan baru secara bersama-sama dan terpola, penggantian bentuk-bentuk lama dengan bentuk-bentuk yang baru.

Perubahan sosial menurut dimensi interaksional mengacu kepada perubahan sosial di dalam masyarakat, yang diidentifikasikan dalam lima dimensi, yaitu; *pertama*, perubahan dalam frekuensi, seperti; frekuensinya, jumlah atau kontinuitas sampai pada hal-hal yang bertentangan. *Kedua*, perubahan dalam jarak sosial, seperti; hubungan intim, hubungan formal dan informal, dan perubahan dalam arah yang berlawanan. *Ketiga*, perubahan perantaraan (saluran) seperti; perlakuan partisipan di dalam suatu hubungan mempribadi sebagai tujuan akhir, berubah maknanya menjadi impersonal atau perubahan yang arahnya bertentangan.

Keempat, perubahan dari aturan atau pola-pola, seperti; hubungan antara status yang sama dengan arah yang horisontal menjadi pergaulan status yang tidak sama dan arah hubungannya vertikal atau berubah dalam arah berlawanan. *Kelima,* perubahan dalam bentuk, seperti dari pola hubungan solidaritas, meskipun perangkat struktur lengkap, maka akan terpecah melalui sikap pengalaman yang bermusuhan, ataukonflik, atau berubah dalam arah berlawanan (Soelaiman, 1998).

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat terdiri dari dalam dua bentuk, yaitu perubahan dari dalam (internal) dan perubahan dari luar (external). Perubahan dari dalam meliputi aspek demografi (bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk), penemuan-penemuan baru (inovasi), pertentangan atau konflik dan pemberontakan atau revolusi. Faktor demografi yang berhubungan dengan kelahiran dan kematian penduduk, migrasi akan berpengaruh langsung terhadap struktur masyarakat terutama lembaga kemasyarakatannya. Pertumbuhan penduduk yang pesat menuntut adanya pengaturan kelembagaan agar terjadi tertib sosial, perpindahan penduduk akibat migrasi akan menyebabkan perubahan sistem kelembagaan sosial dalam bentuk lembaga kemasyarakatan yang baru.

Faktor dari luar (external) yang mendorong terjadinya perubahan masyarakat adalah adanya penetrasi kebudayaan yang masuk dari luar masyarakat yang telah lama tumbuh dan berkembang, sehingga terjadi penyerapan budaya baik melalui interaksi sosial kemasyarakatan, dari pemerintah maupun pengaruh teknologi. Benturan kebudayaan seringkali terjadi jika terdapat dua kebudayaan yang bertemu, dalam prosesnya kemudian muncul peniruan atau imitasi budaya, misalnya dalam mode, life style, dan lain-lainnya. Faktor lain penyebab terjadinya proses perubahan ialah, terjadinya peperangan dan invasi atau penaklukan dalam suatu daerah kekuasaan, yang terjadi kemudian adalah sang pemenang akan memaksakan

kebudayaannya kepada suatu daerah taklukan, misalnya dalam aturan pemerintahan, lembaga sosial kemasyarakatan, tata nilai dan lain-lain.

Dalam prosesnya perubahan sosial dapat diketahui dengan ciri-ciri tertentu (Soekanto, 1994) yaitu; *pertama*, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat. *Kedua*, perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, dan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga sosial lainnya. Karena sifat kelembagaan tadi yang independen, maka sulit untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu, karena keseluruhannya merupakan mata rantai. *Ketiga,* perubahan yang cepat biasanya diikuti dengan disorganisasi yang bersifat sementara, karena berada dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi ini akan diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru. *Keempat,* perubahan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena kedua bidang itu mempunyai kaitan timbal balik.

Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan dimensi waktu, dampak dan prosesnya, yaitu: *Pertama;* Dari dimensi waktu dapat dibedakan antara perubahan lambat dan perubahan cepat. Tidak ada ukuran waktu yang baku tentang lambat dan cepatnya perubahan yang terjadi. Sifatnya relatif, artinya perubahan yang satu lebih lambat atau lebih cepat dibandingkan perubahan lainnya. Sebagai contoh, perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat pedesaan cenderung lebih lambat dibandingkan masyarakat perkotaan. Lazimnya, perubahan yang lambat disebut evolusi, dan perubahan cepat terkait dengan konsep revolusi.

Kedua; Dari dimensi dampak yang ditimbulkan, dibedakan antara perubahan kecil dan perubahan besar. Dikatakan perubahan kecil bilamana tidak menimbulkan dampak perubahan yang mendasar pada berbagai aspek sosial kehidupan masyarakat, misalnya perubahan dalam

mode pakaian, sistem kekerabatan (kinship), masuknya budaya minoritas dalam masyarakat. Sebaliknya, perkembangan komunikasi serta industrialisasi cenderung berdampak besar dan signifikan pada pola kehidupan masyarakat, karena berpengaruh terbadap perubahan kelembagaan/pranata sosial, interaksi sosial, hubungan kerja dan lain-lain.

Ketiga; Dari dimensi proses, dapat dibedakan antara perubahan yang dikehendaki (*intended change*) atau yang direncanakan (*planned change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned change*). Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan ini memang sengaja direncanakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan (*agent of change*) untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebaliknya perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan berlangsung di luar jangkauan pikiran masyarakat dan *agent of change*. Ada kemungkinan kedua bentuk perubahan yang berlawanan ini berlangsung bersama-sama sehingga perubahan yang tidak dikehendaki ini dapat berpengaruh negatif terhadap perubahan yang dikehendaki. Dilihat dari proses dampaknya, seringkali muncul hasil suatu perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan fenomena seperti ini sulit dihindari. Sebagai contoh pengembangan industrialisasi dapat menimbulkan dampak sampingan berupa pencemaran lingkungan serta perubahan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Inovasi program yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ternyata dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan seperti timbulnya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan masyarakat, kecemburuan sosial dan lain sebagainya.

Teori Fungsional Struktural

Perspektif teori struktural-fungsional yang berkembang pada beberapa dakade terakhir ini, sebenarnya

teori ini dipengaruhi dari pengembangan teori oleh sosiolog dan antropolog terdahulu. Tokoh sosiolog diantaranya Comte (1798-1857), Spencer (1820-1903), dan Durkheim (1858-1917). Tokoh antropolog yang banyak menyumbangkan pola pemikirannya untuk bidang atau kajian sosiologi yakni Malinowski (1884-1942) serta Brown (1881-1955) (Paloma,1984). Proses pendekatan Teori struktural fungsional, memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian yang lain. Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Ritzer, 1992).

Auguste Comte yang mencurahkan perhatiannya pada ketertiban dan keharmonisan masyarakat mengatakan bahwa sosiologi studi tentang statika (struktur) atau strata sosial dan dinamika sosial (proses/fungsi). Dalam membahas struktur masyarakat, Comte menerima premis bahwa masyarakat laksana organisme hidup (Paloma, 1984:23). Perspektif organik Comte, memperlakukan atau mengembangkan hukum-hukum sosial sebagaimana halnya suatu organisme hidup. Studi tentang statika sosial (struktur) dari sosiologi adalah penyelidikan hukum-hukum tindakan dan reaksi yang berbeda dari bagian sistem Sosial.

Dinamika sosial adalah mempelajari gerakan (perubahan) masyarakat. Pernyataan Comte tentang statika sosial (struktur) memberikan inspirasi pada terhadap teori struktural-fungsional. Hal ini dipertegas oleh Veeger (1985), bahwa statika sosial melandasi dan menunjang orde, tertib, dan kestabilan masyarakat. Antara lain sistem perundangan, struktur organisasi, nilai-nilai keyakinan, kaidah dan kewajiban yang kesemuanya memberi bentuk yang kongkrit kepada kehidupan bersama. Spencer melhat bahwa masyarakat sama dengan organisme hidup, mereka sama-

sama tumbuh dalam proses evaluasi dengan ciri-ciri khas mereka (Veeger, 1985).

Analisis Spencer tentang perbedaan dan kesamaan antara organisme biologis dan sistem sosial, dengan hati-hati Spencer menegaskan bahwa hanya merupakan sebuah analogi atau model yang tidak seharusnya diterima begitu saja. Hal ini, masyarakat tidak benar-benar mirip dengan organisme hidup, perbedaan di antara keduanya terdapat sebuah perbedaan yang sangat penting. Dalam organisme, mempunyai saling ketergantungan antara bagian-bagian atau saling terkait dalam suatu hubungan yang intim. Sedangkan dalam sistem sosial hubungan yang sangat dekat seperti bagian-bagian organisme tidak begitu jelas terlihat; bagian-bagian yang kadang-kadang sangat terpisah. Makna saling ketergantungan dalam sistem sosial mempunyai arti relatif; banyak variabel-variabel sosial lainnya yang terlibat di dalamnya. Tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis maupun dalam sistem sosial memiliki fungsi dan tujuan tertentu.

Dalam sistem oragnisme maupun sistem sosial, bila terjadi perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya akan terjadi perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Pemikiran Comte dan Spencer tersebut mempertegas asumsi dasar sosiologi, bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain (Paloma,1984). Lahirnya aliran struktural-fungsional dalam sosiologi memperoleh dorongan yang kuat melalui karya-karya Durkheim. Durkheim memandang masyarakat modern adalah merupakan keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggota agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Keadaan normal menunjuk pada keseimbangan (*equilibrium*) atau sebagai suatu sistem yang seimbang.

Bila kebutuhan tertentu tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat "patologis" (ketidakseimbangan atau perubahan sosial) (Paloma, 1984). Sumbangan pemikiran Durkheim terhadap aliran struktural-fungsional cukup besar, dengan menekankan kepada konsep; kesatuan moral dan keseimbangan sistem sosial serta fungsi dari fakta sosial. Sumber utama analisis Durkheim adalah mengenai tipe-tipe yang berbeda dalam solidaritas dan sumber-sumber struktur sosial. Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanik dan organik untuk menganalisa masyarakat keseluruhannya. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu keadaan kolektif bersama, kepercayaan, sentimen-sentimen bersama, ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan (*repressive*). Keadaan tersebut terjadi pada masyarakat yang homogen yang merupakan ciri khas solidaritas mekanik. Sedangkan solidaritas organis adalah merupakan hasil evolusi dari solidaritas mekanis. Di dalam solidaritas organis, setiap anggota masyarakat merasakan adanya saling ketergantungan kompleks, saling ketergantungan fungsional, menganut nilai dan norma umum bersama serta ruang lingkup hukum yang bersifat memulihkan (*restitutive*) (Johnson, 1986).

Sumbangan pemikiran aliran struktural fungsional Durkheim tetap dipertahankan dan dikembangkan oleh dua orang antropolog, yaitu Bronislaw Malinoswki dan Radcliffe-Brown. Malinoswki menggunakan pengertian fungsi untuk pendekatan konsensus. Masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial, unsur-unsur yang saling berhubungan timbul dari kebutuhan dasar setiap manusia. Dasar pemikirannya dari kebutuhan dasar manusia dan respon budaya yang terintegrasi, berkembang dalam kesatuan fungsi. Radcliffe-Brown memberikan konsep mendasar tentang fungsionalisme dalam ilmu-ilmu sosial.

Menurut Radcliffe-Brown, fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti menghukum kejahatan atau dalam proses upacara penguburan, merupakan bagian yang

dilakukan dalam kehidupan sosial. Hal ini merupakan sumbangan atau fungsi bagi pemeliharaan kelangsungan struktural (Paloma, 1984). Perspektif struktural-fungsional dalam membahas struktur, Parsons menggunakan konsep sistem (sistem sosial). Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Sistem sosial ialah struktur atau bagian yang saling berhubungan, atau posisi-posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal-balik yang diharapkan (Paloma, 1984). Karya Parsons, awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan suatu model tindakan sosial yang bersifat voluntaristik yang didasarkan pada sintesanya dari teori Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, Emile Durkheim, dan Max Weber (Johnson, 1986:106). Konsepsi sistem yang dipergunakan untuk menganalisa masyarakat sebagai sistem sosial, yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun secara kolektif dalam suatu kelompok, lembaga dan masyarakat.

Perspektif fungsional Parsons mengenai sistem sosial didasarkan pada teori tindakan sosial dalam sistem sosial sebagai unit analisis. Konsep masyarakat sebagai sistem sosial digunakan Talcot Parsons dan pengikut-pengikutnya melalui pendekatan struktural-fungsional, memberikan pengertian tentang sistem sosial, ialah proses interaksi diantara pelaku sosial (aktor), sedangkan yang merupakan struktur sistem sosial adalah struktur relasi antara pelaku sebagaimana yang terlibat dalam proses interaksi. Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai, memiliki norma, dan memiliki tujuan yang sama (Garna, 1996).

Keluarga yang merupakan lembaga paling kecil dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa sebagaimana menurut pandangan aliran struktural-fungsional. Parsons yang mengembangkan pendekatan struktural-fungsional dalam kehidupan keluarga, mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Parsons

menjelaskan pula bahwa satuan utama dari sistem sosial terdiri atas kolektivitas dan peranan (Garna, 1996). Martin Roderick (1993) menguraikan, pendekatan sistem beranjak dari asumsi bahwa suatu masyarakat sedikit banyak saling memiliki ketergantungan dengan dengan lembaga-lembaga sosial berusaha untuk memenuhi fungsi-fungsi yang penting sama menjamin kelangsungan hidup. Selain itu, pendekatan sistem yaitu menganalisa kehidupan masyarakat dari sudut struktur, fungsi, peranan,dan prosesnya.

Sedangkan pendekatan tindakan sosial secara langsung atau tidak melihat lembaga-lembaga sosial sebagai sarana bagi individu untuk tujuan individu maupun tujuan kelompok. Pendekatan tindakan sosial menganalisa masyarakat dari segi pelakunya. Menurut Nasikun (1984), bahwa sistem sosial pada dasarnya tidak lain adalah suatu sistem daripada tindakan-tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota-anggota dalam masyarakat.

Berbagai standar penilaian umum tersebut adalah norma-norma sosial dan adanya hubungan sosial yang dinamis antara bagian-bagian itu yang sesungguhnya akan membentuk struktur sosial. Max Weber (dalam Jonhson, 1986:), menekankan pada pemahaman subyektif (verstehen) sebagai metoda untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif tindakan sosial. Weber menjelaskan, bahwa tidak hanya mengamati obyek, tetapi juga mengerti menafsirkan tindakan sosial dan melalui tindakan tersebut dapat menjelaskan terjadinya dan dampaknya atau akibat. Prinsip pemahaman subyektif dari Weber ialah menunjuk pada upaya memahami suatu perilaku dengan menjelaskan fenomena tersebut untuk menangkap hubungan di antara perasaan, motivasi, dan pikiran dengan tindakannya.

Perspektif Parsons yang bersifat fungsional itu mengatakan bahwa tindakan individu harus memenuhi

persyaratan-persyaratan fungsional. Pada bagian ini, Parsons menekankan pentingnya pemahaman orientasi individu yang bersifat subyektif, termasuk definisi situasi serta kebutuhan dan tujuan individu. Setiap pola perilaku yang sesuai atau menyimpang, setiap kebiasaan atau norma, setiap keputusan kebijaksanaan yang besar dan setiap nilai budaya dapat dianalisa dengan kerangka fungsional (Johnson, 1986).

Weber menggunakan rasionalitas sebagai konsep dasar dalam mengkalisifikasi mengenai tipe-tipe tindakan sosial, dibedakan antara tindakan rasional dan non rasional. Tindakan rasional menurut Weber meliputi pertimbangan yang sadar dan pilihan yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri, apabila tujuan, serta akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif (Johnson, 1986). Individu atau masyarakat memiliki bermacam-macam tujuan, akan tetapi sangat tergantung pada kondisi atau situasi lingkungan untuk menentukan pilihan dengan pertimbangan yang sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan individu selalu menilai alat yang mungkin dapat digunakan, dilakukannya melalui pengumpulan informasi, atau melalui suatu percobaan.

Parsons mengatakan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh dua macam orientasi, yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai-nilai. Kedua macam orientasi itu sama-sama menunjuk pada pencapaian kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan. akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan di mana orientasi motivasional lebih bersifat individual dan orientasi nilai

lebih bersifat sosial. Orientasi motivasional menunjuk pada keinginan individu yang bertindak demi memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Orientasi nilai menunjuk pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan individu (alat dan tujuan) dan prioritas sehubungan dengan adanya kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda. Hal ini mengandung pengertian bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh kehendak pribadinya dan sekaligus dikontrol nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Johnson, 1986).

Ada tiga tahap refleksi teoritik Parsons, yaitu: (a) tahap *pertama*; ketika dia menyusui teori Tindakan Voluntaristik tahun 1949; (b) tahap *kedua;* ketika dia meninggalkan teori tindakan ke Teori Sistem tahun 1951; dan (c) tahap *ketiga*; tahap terakhir ketika dia menerangkan teori fungsional struktural pada evolusi masyarakat tahun 1966 (Bierstedt, 1974, Priyono, 2002). Hal yang penting dalam memahami teori fungsional struktural Parsons, yaitu: (a) skema AGIL; (b) Konsep sistem; serta (c) adalah konsep fungsional struktural.

Pertama; Skema AGIL. Menurut Parsons empat hal yang berfungsi dan sangat penting yang diperlukan dalam menganalisis semua sistem "tindakan" manusia untuk pemeliharaan pola di masyarakat, yaitu Adaptation (A), Goal attainment (G), Integration (1), dan Latensi (L) (Bachtiar, 2006). Keempat fungsi yang saling berhubungan Adaptation (adaptasi). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Organisme perilaku, merupakan suatu sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi (menyesuaikan dan mengubah lingkungan eksternal). Sedangkan bidang atau sistem ekonomi merupakan subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui: tenaga kerja, produksi, dan alokasi;

Goal attainment (Pencapaian tujuan). Merupakan sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan. Kemudian Sistem kepribadian adalah melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sedangkan sistem pemerintahan (sistem politik) melaksanakan fungsi pencapain tujuan dengan mengejar tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor sumber daya manusia untuk mencapai tujuan.

Integration (Integrasi), merupakan sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian dalam sistem, sistem juga harus mengelola hubungan ketiga fungsi lainnya (A,G,L). Kemudian sistem sosial adalah menanggulangi fungsi integrasi dengan jalan mengendalikan bagian-bagian dalam sistem. Sedangkan komunitas (sistem hukum, aturan) akan menjalankan suatu fungsi integrasi, mengkoordinasi beragam komponen masyarakat;

Latency (pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu atau pola kultural untuk bertindak. Kemudian sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang mendorong individu bertindak. Sedangkan sistem *fiduciari* (contoh lembaga keluarga, sekolah, agama) menangani fungsi pemeliharaan pola dengan menyebarkan nilai, norma pada aktor (individu) untuk diinternalisasikan pada dirinya. Keempat unsur dalam skema AGIL tersebut saling kait-mengkait (Johnson, 1981; Ritzer dan Goodman, 2004)

Kedua; konsep sistem, untuk memahami skema tersebut, beberapa pemikiran kurnci dari Parsons tentang fungsional struktural dapat dipahami dalam konsep-konsep sebagai berikut: (a) sistem kultural, merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai sistem tindakan. Kultur mengatur interaksi antar aktor, menginteraksikan kepribadian dan menyatukan sistem sosial. Kultur, dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur yang

menjadi sasaran orientasi para aktor, aspek-aspek kepribadian yang sudah terinternalisasi dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial. Jadi, kultur akan menjadi faktor eksternal untuk menekan pola tindakan aktor. (Ritzer, 2004); (b) sistem sosial, yaitu terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang mempunyai aspek lingkungan (fisik), aktor mempunyai suatu motivasi untuk "mengoptimalkan kepuasan", yang berhubungan dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam sistem simbol yang terstruktur secara kultural.

Konsep kunci sistem sosial menurut Parsons adalah: aktor; interaksi; lingkungan; optimalisasi; kepuasan dan kultur. Parsons menggunakan status peran sebagai unit dasar dari sistem sosial. Status adalah menyangkut posisi struktural individu dalam sistem sosial, sedangkan peran adalah apa yang harus dilakukan individu dalam posisinya. Aktor dalam pandangan Parsons, bukan dilihat dari sudut pikiran, ide, keyakinan dan tindakan sehari-hari (seperti dalam teori berparadigma definisi sosial), tetapi dilihat sebagai kumpulan beberapa status dan peran yang terpola oleh struktur dalam sistem. Jadi, individu terdeterminasi oleh faktor ekstemal.

Inti pemikiran Parsons tergambar dalam empat sistem tindakan, yaitu: sistem kultural; sistem sosial; sistem kepribadian; dan organisme perilaku, yang keempatnya terkait dengan AGIL (Abraham, 1982). *Ketiga;* Dalam Konsep fungsional struktural, Parsons mengemukakan beberapa asumsi sebgai berikut: (a) sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung; (b) sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan; (c) sistem bergerak dalam proses perubahan yang teratur; (d) sifat dasar bagian suatu sistem be pengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain; (e) sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya; (f) alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara

keseimbangan sistem; (g) sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri meliputi pemeliharaan batas serta pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam (Ritzer dan Goodman, 2004).

Menurut pandangan Parsons, bahwa: (a) antara aktor dan struktur sosial mempunyai hubungan erat; (b) persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi; (c) dalam proses sosialisasi, nilai dan norma diintenalisasikan (norma dan nilai menjadi bagian dari "kesadaran" aktor), sehingga aktor mengabdi pada kepentingan sisters sebagai suatu kesatuan; (d) Aktor biasanya menjadi penerima pasif dalam proses sosialisasi; (e) dalam fungsional struktural Parsons, adalah bagaimana cara sistem mengontrol aktor, bukan mempelajari bagaimana cara aktor menciptakan dan memelihara sistem (Ritzer dan Goodman, 2004).

Substansi pokok teori fungsional struktural Parsons tentang perubahan sosial adalah: (a) proses perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseimbangan (*equilibrium*) dalam sistem sosial, apabila ada konflik internal, perlu dicari upaya-upaya untuk tetap terjaga keseimbangan dalam sistem; (b) proses diferensiasi struktural akan menimbulkan perubahan baru di dalam subsistem, tetapi tidak mengubah struktur sistern sosial secara keseluruhan. Nilai-nilai pokok dianggap tetap tidak berubah; (c) perubahan evolusi masyarakat adalah mengarah kepada "peningkatan kemampuan adaptasi", menuju keseimbangan hidup; dan (d) apabila terjadi perubahan dalam struktural, maka akan teradi perubahan dalam kultur normatif sistem sosial bersangkutan (perubahan sistem nilai-nilai terpenting). Hal ini akan mempengaruhi perubahan unit-unit lain dalam sistem (Lauer, 1978; Harper, 1989; Johnson and Hunt, 1984).

Berdasarkan pra survai tentang realitas sosial kehidupan masyarakat petani pada lokasi penelitian yakni di

desa Tamaila, desa Lakeya, desa Bina Jaya dan desa Molohu Kecamatan Tolangohula, nampak ada kesesuaian apabila peneliti menganalisis fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula dengan menggunakan teori fungsional struktural Parsons sebagai orientasi teoritik. Letak kesesuaiannya menurut peneliti antara lain. Pada dasarnya tindakan petani menerima ganti rugi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu dapat dianalisis dari skema fungsional AGIL, yaitu Adaptation (A), Goal attainment (G), Integration (I), dan Latensi (L). AGIL berfungsi untuk pemeliharaan pola di masyarakat.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu tidak bisa terlepas dari sistem kultural yang berkembang saat itu, baik di keluarga atau masyarakat. Kultur dalam keluarga atau masyarakat akan mengatur (*mendeterminasi*) proses alih fungsi lahan pertanian untuk lahan perkebunan tebu. Tindakan masyarakat petani sangat berkaitan dengan unsur-unsur struktur sosial pada masyarakat desa, yaitu: lembaga sosial; kekuasaan; interaksi sosial; nilai dan norma-norma sosial. Keterkaitan hubungan tersebut sangat erat atau merupakan suatu kesatuan sistem, hal ini sesuai dengan pandangan teori fungsional struktural. Bentuk perubahan sosial yang terjadi pada level kehidupan masyarakat petani sebagai akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu adalah berlangsung secara evolusi dan perubahan evolusi keluarga petani tersebut mengarah kepada "peningkatan kemampuan adaptasi" Kemampuan adaptasi yang dimaksudkan adalah petani ketika tidak memiliki lahan pertanian sebagai sumber kehidupan dan sumber pendapatannya, mereka berupaya bekerja di luar sektor pertanian guna menuju pada keseimbangan dalam dinamika kehidupann masyarakat dan hal ini sesuai dengan pandangan teori fungsional struktural.

Teori Konflik

Teori konflik adalah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem

sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. (Raho, 2007). Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat sebetulnya tidak banyak berbeda dari pandangan teori struktural fungsional, karena keduanya sama-sama melihat bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara keduanya terletak dalam asumsi mereka yang berbeda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu.

Banyak definisi konflik yang dkemukakan para pakar. Dari berbagai definisi dan berbagai sumber yang ada istilah konflik dapat dirangkum sebagai berikut: (1) konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, serta kebutuhan; (2) hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan; (3) pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motifasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya; (4) suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan serta fisiknya terganggu; (5) bentuk pertentangan yang bersifat fungsional karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan memperbarui tampilan, namun disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok yang sudah ada; (6) proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan pesaing; (7) suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis; (8) kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu (Liliweri, 2005).

Adapun perbedaan mendasar tentang teori fungsionalisme dan teori konflik pada tabel berikut ini:

Perbedaan (Antitesis)
Antara Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik

Teori Fungsionalisme	Teori Konflik
• Masyarakat cenderung statis, dan proses perubahan menunju pada keseimbangan • Menekankan pada suatu keteraturan masyarakat • Setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga kestabilan • Masyarakat diikat oleh nilai, norma dan moral • Memusatkan perhatian pada kohesi sosial yang diciptakan oleh nilai kebersamaan dalan masyarakat	• Masyarakat pada setiap saat tunduk pada perubahan • Menekankan pada pertikaian dan konflik dalam masyarakat • Setiap elemen dalam masyarakat berpotensi menyumbang terjadinya disintegrasi dan perubahan • Keteraturan dalam masyarakat karena adanya pemaksaan dari golongan yang lebih berkuasa • Menekankan peran kekuasaan dalam mepertahankan ketertiban dalan masyarakat.

Sumber: Ritzer dan Goodman (2004), Kanto (2006)

Menurut Dahrendorf (Kanto, 2006) teori sosiologi dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori konsensus dan teori konflik. Teoritisi konsensus cenderung mengkaji

nilai integrasi dalam masyarakat, sedangkan teoritisi konflik lebih memusatkan perhatian kepada kepentingan dan penggunaan kekerasan. Dalam masyarakat pasri dijumpai konsensus dan konflik, yaitu pada prinsipnya dapat memiliki hubungan timbal balik. Tidak akan ada konflik tanpa di dahului dengan konsensus oleh konsensus sebelumnya, sebaliknya, konflik bisa menimbulkan konsensus dan integrasi sosial. Perumusan teori konflik sangat dipengrahui oleh fungsional struktural. Konsep kuncinya adalah perbedaan otoritas dan kepentingan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Otoritas yang melekat pada posisi individu atau kelompok adalah unsur utama dalam analisis konflik. Otoritas membedakan antara kelompok-kelompok superordinal (berkuasa) dan subordinasi (yang dikuasai). Bila teori ini dikaitkan dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu pabrik, terlihat bahwa antara superordinal (berkuasa) dalam hal ini kepala desa memaksa masyarakat menjual tanah milik masyarakat petani (subordinal) kepada perusahan menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula. Selanjutnya pengaruh teori konflik dalam studi sosiologi berada dalam rentang waktu yang sangat panjang (1318 sampai awal tahun 1960-an).

Para tokoh teori konflik antara lain; (a) Marx dan Park, yang dikenal dengan pendekatan "Sistemik Konvensional" (Revolusionis); (b) Pareto dan Veblen, yang dikenal dengan "Tipe Naturalistik Konvensional Teori Konflik" (Revolusionis); (c) Dahrendorf dan Mills, yang dikenal penganut pendekatan maupun aliran "Sistemik Modern" (Revolusionis); dan (d) Coser dan Reisman, yang dikenal penganut model "Naturalistik Moaern" (fungsionalis-evolusionis) (Kinloch, 2005). Banyak teoritisi konflik yang masuk dalam kelompok Neo-Marxis, antara lain; (a) Lukacs, sumbangan besar Lukacs terhadap teori Marxian adalah berupa gagasan tentang “Reifikasi dan Kesadaran Kelas”; (b) Garamsci, dia tetap mengakui faktor ekonomi sebagai penyebab konflik dan revolusi, tetapi ada

juga faktor lain yaitu massa perlu mengembangkan "ideologi revolusioner", dan dalam membangkitkan ideologi revolusioner, massa harus ada "tokoh intelektual".

Baik Lukacs dan Garamsci sama-sama memusatkan perhatian pada aspek "Gagasan Kolektif dari pada aspek "Struktur Ekonomi" seperti yang dikemukakan oleh Marx; (c) Lefebvre, dia mengatakan bahwa teori Marxian perlu menggeser fokusnya dari "cara-cara produksi ke produksi ruang" (dari produksi ke reproduksi). Ruang berfungsi dengan berbagai macam cara untuk mereproduksi sistem kapitalis, struktur kelas di dalam sistem ekonomi. Menurut Lefebvre, setiap aksi evolusioner harus berhubungan dengan "restrukturisasi ruang" (Ritzer dan Goodman, 2004); (d) Menurut Coser; Konflik meningkatkan penyesuaian sosial; Konflik bermula dari tuntutan rasio penghargaan; Struktur sosial bisa berbentuk tertutup dan terbuka; Tipe-tipe masalah menyangkut pengaruh konflik dan konflik akan menjadi fungsional bagi sistem sosial (Coser and Rosenberg, 1969); dan (e) Reisman, dia menjelaskan relevansi "perubahan demografi" sebagai fundasi dari proses konflik sosial.

Dalam posisi penelitian ini, teori Neo Marxian yang dipilih sebagai theoritical orientation adalah teori konflik Coser yang oleh sebagian ahli dianggap sebagai 'teori konflik modern yang bersifat "aturalistik dan Evolusioner". Hal ini bukan berarti hanya teori Neo Marxian Coser saja yang cocok untuk dijadikan orientasi teori dalam suatu kajian fenomena sosial. Berikut beberapa substansi pokok pikiran atau asumsi teori konflik Coser, antara lain; *Pertama;* Konflik akan cenderung meningkatkan dari pada menurunkan penyesuaian sosial adaptasi dan memelihara bahas kelompok; Konflik bersifat fungsional dan tidak fungsional. Konflik muncul ketika ada akses dari penuntut untuk memperoleh imbalan sesuai dengan kerjanya; Struktur sosial berbeda-beda bentuknya. Ada yang berbentuk mobilitas sosial, eksistensi institusi katup keselamatan (*savety-valve institutions*), konflik institusional, dan toleransi, yang pada tingkatan tertentu memiliki hubungan

erat, tingkat berpartisipasi kelompok, dan panjangnya konflik. Jadi, semakin erat sistem stratifikasi, semakin sedikit pulalah institusi katup keselamatan; Semakin rendah institusionalisasi toleran konflik institusional, semakin lebih dekat merajut kelompok, partisipasi kelompok dan apabila perjuangan dalam kelompok lebih lama, lebih intens akan berpotensi menjadi konflik sosial.

Kedua; Konflik yang realistis dalam sebuah struktur sosial yang terbuka memberikan kontribusi penyesuaian struktur yang lebih hebat, fleksibilitas dan integritas sosial. Sebaliknya konflik yang tidak realistis dalam lingkungan yang fleksibel dan tertutup akan menimbulkan kekerasan dan disintegrasi. Pada dasarnya perspektif fungsional struktural dan perspektif konflik adalah "saling kait mengkait" dalam memahami masyarakat secara holistik tentang proses sosial. Baik teori fungisional maupun teori konflik, adalah sama-sama teori parsial dalam melakukan analisis fenomena sosial.

Kehidupan sosial memang memerlukan keserasian fungsi (teori fungsional), tetapi untuk melakukan proses perubahan dan dinamika hidup, maka kehidupan sosial memerlukan adanya konflik antar unsur sosial atau sub sistem (teori konflik), sehingga konflik dan konsensus (fungsional), perpecahan dan integrasi adalah proses fundamental (sesuatu yang mesti ada) dalam masyarakat, meski porsinya beragam antar kelompok. Atau konflik dan integrasi merupakan bagian integral dalam sistem sosial (Coser and Rosenberg, 1969; Cambel, 1981); Fungsi konflik adalah: (a) konflik antar kelompok dalam rnemperkokoh solidaritas ingroup, atau bisa juga menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain; (b) konflik dapat mengaktifkan peran individu, yang semula terisolasi menjadi tidak terisolasi, semula pasif menjadi aktif; (c) konflik juga membantu fungsi komunikasi (artinya fungsi, peran dan batas-batas musuh dengan konflik semakin jelas). fungsi konflik yang lebih positif, tetapi konflik juga mempunyai disfungsi (Ritzer dan Goodman, 2004).

Menurut Kinloch (2005), ada beberapa konsep penting dari pandangan Coser dalam menganalisis tentang konflik dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, antara lain: (a) terdapat hubungan yang erat antara struktur sosial masyarakat dengan konflik dan kekuasaan; (b) bahwa bentuk perubahan sosial lebih bersifat evolusi daripada revolusi; (c) bahwa konflik yang mempunyai suatu fungsi tentang kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidupnya (makna fungsional konflik); dan (d) kerangka konflik yang terjadi tidak semata-mata berbasis ekonomi (seperti pandangan Marx), tetapi juga berbasis pada pandangan non ekonomi.

Berdasarkan observasi tentang kehidupan petani di sekitar pabrik di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo misalnya, bahwa penggunaan teori Neo-Marais yang dikemukakan oleh Coser sebagai orientasi teori dalam penelitian ini adalah proporsional, dengan alasan sebagai berikut: (1) Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo (situs penelitian) berlangsung dalam bentuk evolusi (bukan revolusi). Hal ini sesuai dengan analisis Coser tentang proses perubahan sosial di masyarakat bersifat makroskopik; organik-naturalis; evolusioner dan struktural (Kinloch, 2005). (2) Penyebab konflik masyarakat petani di Kecamatan Tolangohula terutama yang bermukim di sekitar lokasi perkebunan tebu tidak hanya semata-mata di pengaruhi oleh kepentingan ekonomi (pandangan Marx). tetapi juga didorong oleh "kondisi struktur sosial masyarakat" (Coser and Rosenberg, 1969) yang oleh sebagian masyarakat dianggap kurang berpihak untuk mendukung kepertingan masyarakat petani, misalnya pada saat pembelian lahan pertanian atau ganti rugi lahan tahun 1989 (era orde baru) pengaruh kekuasaan elit lokal atau struktur politik lokal begitu kuat "mengkooptasi" para petani desa yang rata-rata tingkat pendidikannya sangat rendah, sehingga petani tidak dapat melakuan penolakan.

Berdasarkan pra survai, fenomena struktur sosial di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa: (a) pengaruh elit sosial di pedesaan, misalnya tokoh masyarakat atau aparat desa ikut barperan dalam proses-proses sosial masyarakat desa; (b) pada proses awal terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu untuk kepentingan perusahaan pabrik gula, pengaruh elit politik desa (aparat pemerintah desa) dan para "makelar" tanah, relatif besar peranannya dalam proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan tebu; (3) meskipun pola komunikasi dan pengambilan suatu keputusan di desa terjadi atau secara musyawarah dan mufakat, namun pola dan nuansa musyawarahnya terasa adanya "penekanan" dari pihak eksternal (misalnya makelar dan aparat desa). Ketika pemerintah Orde Baru tumbang dan lahirnya era reformasi, rasa ketidak puasan warga desa muncul dalam bentuk protes, demo, baik langsung ditujukan kepada pengelola perusahaan serta kepada Kepala Desa terutama desa-desa yang memiliki lahan yang luas untuk kepentingan pertanian dan telah beralih menjadi lahan perkebunan tebu. Menurut Coser adalah, dalam melakukan analisis sosial perlu melakukan "analisis hubungan antara struktur sosial yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat dan model konflik serta kekuasaan".

Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat petani (situs penelitian) bisa bersifat "fungsional" dan disisi lain "tidak fungsional" (disfungsi) bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Konflik muncul ketika warga desa merasa ada akses untuk menuntut memperoleh imbalan pada perusahaan pabrik gula sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada saat alih fungsi lahan. Fungsi konflik antara petani dengan perusahaan pabrik gula adalah: (1) konflik yang terjadi di desa dapat memperkokoh solidaritas ingroup (para petani dasa); (2) konflik yang terjadi di desa ternyata dapat mengaktifkan peran individu, terutama tokoh-tokoh tua dan muda, yang semula tidak nampak berperan kemudian muncul untuk menggalang persatuan; (3) konflik yang

terjadi dapat meningkatkan fungsi komunikasi antar status dan peran warga desa.

Fungsi konflik yang lebih positif (fungsional), tetapi konflik di desa juga dapat mengakibatkan "disfungsi", yaitu pada era reformasi terjadi demo penurunan secara paksa para kepala desa atau elit kekuasaan di desa serta orang-orang yang dahulu "mendukung" alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan tebu, disamping itu tidak menutup kemungkinan alih fungsi lahan menyebabkan konflik dalam keluarga karena berebut warisan, sehingga hubungan keluarga bersifat disintegratif.

Berdasarkan uraian di atas bukan berarti pandangan Neo-Marxian Coser adalah "paling cocok" untuk dijadikan sebagai theoritical orientation dalam kajian alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan tebu, sebab menurut peneliti masih ada teori-teori neo-Marxian lain yang bisa digunakan. Jadi, pemilihan teori Neo-Marxian Cocer ini semata-mata atas pertimbangkan kemampuan peneliti dalam rnemahami teori konflik Neo-Marxian, disamping itu juga didasarkan pada pertimbangan untuk membatasi ruang lingkup kajian.

Teori Tindakan Rasional Weber

Teori tindakan rasional Weber. sangat berbeda dengan teori tindakan sosial Parsons. Perbedaan yang mendasar, antara lain: (a) orientasi filosofis teori Parsons adalah positivisme, sedangkan Weber adalah idealisme-Historisisme; (b) tindakan sosial individu menurut Parsons adalah ditentukan oleh struktur sosial yang telah baku atau faktor eksternal mendeterminasi individu, sedangkan tindakan sosial rasional Weber adalah, bahwa individu bebas memilih, semua tindakan ditentukan faktor internal (jiwa, pikiran) manusia itu sendiri bukan lingkungan (Denzin, 1978; Johnson, 1981).

Berikut ini beberapa substansi pokok pikiran Weber dalam memahami fenomena perubahan sosial antara lain: *Pertama;* Weber melihat pola dan bentuk perubahan sosial sama seperti para teoritisi fungsional struktural, yaitu

perubahan sosial dalam bentuk evolusi, tetapi paradigma yang dianut Weber bukan paradigma fakta sosial (positivistis) tetapi paradigma definisi sosial (interpretatif) (Ritzer, 2001; Giddens, 1987).

Oleh karena itu pandangan Weber terhadap makna motivasi dan arti subyektif dalam melakukan proses analisis sosial adalah sangat penting. *Kedua;* Weber memilih konsep rasionalitas sebagai titik pusat perhatian utamanya. Konsep rasionalitas bagi Weber adalah sama pentingnya dengan konsep "solidaritas" bagi Durkheim.Tindakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu tindakan tidak rasional dan tindakan rasional. Tindakan rasional inilah yang membawa ke arah perubahan sosial secara kualitatif-akumulatif (Wrong, 1970; Johson, 1981).

Ketiga; Bagi Weber, kenyataan sosial (social reality) secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosialnya. Jadi, makna 'tindakan sosial' bagi Weber adalah "apabila semua individu dalam bertindak itu memberikan arti subyektif kepada tindakan itu". Karena arti subyektif tadi dihubungkan dengan individu yang bertindak dan memperhitungkan reaksi tindakan orang lain serta diarahkan, pada suatu tujuan tertentu (Wrong, 1970; Ritzer, 2001). Jadi, kenyataan sosial menurut Weber adalah sesuatu yang didasarkan pada motivasi dan tindakan sosial tersebut.

Keempat; Dunia sosial-budaya tidak dipandang sebagai sesuatu yang sesuai dengan hukum-hukum ilmu alam saja dan manusia terdeterminasi oleh norma sosial dan struktur sosial (seperti pandangan kaum positivis), tetapi dunia sosial-budaya bagi Webe dilihat sebagai suatu dunia kebebasan dan terkait dengan pemahaman internal (rationalitas) individu dimana arti-arti subyektif itu ditangkap (Wrong, 1970; Laeyendecker, 1991), *Kelima;* Bagi Weber pemikiran yang menekankan pada Verstehen (pemahaman subyektif mendalam) sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif tindakan sosial adalah sangat penting. Setiap peneliti sosial harus menganalisis perilaku aktual manusia

individual menurut orientasi subyektif mereka sendiri (Campbell, 1981).

Keenam; Weber menilai bahwa "Konsep Rasionalitas" merupakan kunci bagi suatu analisis obyektif mengenai arti-arti subyektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. "Analisis obyektif mengenai arti subyektif", sering dipahami secara salah. Menurut Weber, "tindakan obyektif" adalah pengalaman subyektif yang dapat dimengerti orang lain atau kelompok masyarakat yang lain, karena dialami bersama secara meluas, sedangkan "tindakan subyektif" adalah pengalaman subyektif yang tidak dapat dikomunikasikan atau dimengerti oleh kehidupan bersama, meskipun hal itu sangat riil dalam setiap pelaksanaan upacara tradisi.

Ketujuh; Menurut Weber, hal yang penting perlu diperhatikan dalam memahami tindakan sosial individu adalah: (1) dalam tindakan sosial tersebut di atas, bisa terjadi tindakan satu mengkait pada tindakan yang lain, misalnya tindakan tradisional mengkait tindakan rasional yang berorientasi nilai; (2) pola perilaku khusus yang dilakukan beberapa individu, bisa berbeda karena orientasi, motivasi, dan tujuan subyektif clan individu yang berbeda; dan (3) tindakan sosial dapat dimengerti hanya menurut arti subyektif (verstehen) dan pola-pola motivasional individu (Wrong, 1970; Gidderis, 1985).

Kedelapan; Perubahan secara evolusi lebih berbentuk rasional dalam tindakan sosial (aksi sosial). Hal ini berakar dari proses persaingan yang menghasilkan seleksi atas individu yang berkualitas. Weber memandang rasionalitas sebagai hasil dari berbagai tipe birokrasi (struktur dalam tindakan sosial yang didefinisikan dengan teliti oleh peranan sistem aturan, norma dan sanksi). Oleh karena itu proses evolusi masyarakat dalam hal ini dapat dikontrol, dikendalikan dan bersifat impersonal (birokratik) dalam merespon kebutuhan efisiensi ekonomi dengan industrialisasi. Jadi, ada dua tipologi utama pandangan

Weber, yaitu tipe tindakan sosial dan model birokrasinya (Rossides,1978; Kinloch, 2005). *Kesembilan;* struktur sosial dalam pandangan Weber adalah didefinisikan dalam istilah-istilah yang bersifat probabilistik dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik atau realitas berlansung dan terlepas dari individu (seperti pemahaman kaum positivis).

Teori Pilihan Rasional Coleman.

Meski dipengaruhi perkembangan teori pertukaran, teori pilihan rasional umumnya berada di pinggiran aliran utama teori sosiologi (Hechter dan Kanazawa, 1997). Melalui upaya Coleman, teori ini menjadi salah satu teori hebat" dalam sosiologi masa kini (Chriss, 1995; Lindenberg, 2000; Tilly, 1997). Dikatakan demikian karena tahun 1989 Coleman mendirikan jurnal *Rationality and Society* yang bertujuan menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Selain dari itu, Coleman (1990) menerbitkan buku yang sangat berpengaruh, *Foundations of Social Theory* berdasarkan perspektif pilihan rasional itu.

Sebelum memahami teori pilihan rasional, maka perlu memahami komtentar pendahuluan Coleman (1989) atas edisi pertama jurnal *Rationality and Society*. Jurnal itu bersifat interdisipliner karena teori pilihan rasional (Coleman menyebutnya *"paradigma tindakan rasional"* (1989) adalah satu-satunya teori yang mungkin dapat menghasilkan proses integrasi berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan keyakinannya menyatakan bahwa pendekatannya beroperasi mulai dari dasar metodologi individualisme dan dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro.

Karya yang secara metodologis adalah holistis, mengambang di tingkat sistem tanpa bersumber pada aktor yang bertindak menciptakan sistem itu. Pandangan tentang tindakan sebagai murni ungkapan perasaan belaka, tak rasional, dan sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan dari luar tanpa diantarai maksud atau tujuan aktor. Ia

mengesampingkan karya empiris yang umumnya dikerjakan dalam ilmu sosial yang memandang perilaku individu "dijelaskan" oleh determinan atau faktor tertentu tanpa model tindakan apa pun (Coleman, 1989).

Menurut Coleman sosiologi seharusnya memusatkan kepada sistem sosial. Tetapi, fenomena makro itu harus dijelaskan oleh faktor internalnva sendiri, khususnya oleh faktor individual. Alasan *Pertama;* Coleman lebih menyukai bekerja di tingkat individual ini karena berbagai alasan, termasuk kenyataan bahwa data biasanya dikumpulkan pada tingkat individual dan kemudian disusun untuk menghasilkan data pada tingkat sistem sosial. Sedangkan alasan *kedua;* perhatian di tingkat individual biasanya adalah karena "intervensi" dilakukan untuk menciptakan perubahan sosial.

Inti perspektif Coleman adalah gagasan bahwa teori sosial tak hanya merupakan latihan akademis, tetapi harus dapat memengaruhi kehidupan sosial melalui "intervensi" tersebut. Dengan memusatkan perhatian pada individu ini, Coleman mengatakan bahwa ia adalah individualis secara metodologis, meski ia melihat perspektif khusus, sebagai varian khusus dari orientasi individual itu. Pandangannya adalah khusus dalam arti bahwa ia menerima gagasan yang muncul dan masih memusatkan perhatian pada faktor internal sistem sosial, faktor internal itu tak mesti selalu orientasi dan tindakan individual. Artinya, fenomena tingkat mikro selain yang bersifat individual pun dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya.

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa "tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi) Tetapi Coleman selanjutnya menyatakan bahwa secara teoritis memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial: Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan dalam sistem tindakan. Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan suatu perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung terhadap suatu tindakan mereka. (Coleman, 1990)

Pemusatan perhatiannya pada tindakan rasional individu ini dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem. Meski Coleman memprioritaskan masalah ini, Coleman juga memperhatikan hubungan makro ke mikro atau bagaimana cara sistem memaksa orientasi aktor. akhirnya ia memusatkan perhatian pada aspek hubungan mikro-mikro atau dampak tindakan individual terhadap tindakan individu lain. Dengan menggunakan suatu pendekatan pilihan rasionalnya, Coleman menerangkan serentetan fenomena tingkat makro. Dasar pendirian adalah bahwa teoritisi perlu memelihara gambaran mereka mengenai aktor terus-menerus dan gambaran fenomena mikro ini muncul berbagai kesan mengenai fenomena tingkat makro. Dengan cara ini, perbedaan dalam fenomena makro dapat dirunut dari perbedaan struktur hubungan di tingkat makro dan bukan pada perbedaan tingkat mikro.

Satu langkah kunci gerakan dari mikro ke makro itu adalah mengakui wewenang dan hak yang dimiliki oleh seorang individu terhadap individu lain. Tindakan ini cenderung menyebabkan subordinasi seorang aktor terhadap

aktor lain. Lebih penting lagi, pengakuan ini menciptakan fenomena makro paling mendasar, yakni satu unit tindakan yang terdiri dari dua orang, ketimbang dua orang aktor yang bebas. Akibatnya, struktur berfungsi terbebas dari aktor, dibandingkan dengan memaksimalkan ketertarikannya, dalam kasus ini, seorang aktor malah berusaha merealisasikan ketertarikan aktor yang lain atau unit kolektif independen. Ini bukan saja merupakan realita perbedaan sosial, tetapi jug merupakan salah satu yang memiliki defisiensi. (Coleman,1990). Menimbang orientasi aplikanya Coleman menunjukkan ketertarikan dalam diagnosa dan solusi dari berbagi permasalahan.

Colemen melihat tindakan rasional ini dalam beberapa komponen masing-masing: Perilaku kolektif. Salah satu contoh pendekatan Coleman dalam menganalisis fenomena makro adalah kasus perilaku kolektif (Zablocki, 1996). Ia menjelaskan perilaku kolektif karena cirinya yang sering tak stabil dan kacau itu sukar dianalisis berdasarkan perspektif pilihan rasional. Namun, menurut pandangan Coleman, teori pilihan rasional dapat menjelaskan semua jenis. fenomena makro, tak hanya yang teratur dan stabil saja. Apa yang menyebabkan perpindahan dari aktor rasional ke berfungsinya sistem yang disebut "perilak kolektif yang liar dan bergolak adalah pemindahan sederhana dan pengendalian atas tindakan seorang aktor ke aktor lain, yang dilakukan secara sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran" (Coleman, 1990).

Mengapa secara sepihak orang memindahkan segala kontrol atas tindakannya kepada orang lain? Jawabannya, menurut teori pilihan rasional, bahwa mereka berbuat demikian dalam upaya memaksimalkan berbagai kepentingan mereka. Biasanya upaya memaksimalkan sesuatu kepentingan individual itu menyebabkan keseimbangan kontrol antara beberapa aktor, dan ini menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus perilaku kolektif, karena terjadi pemindahan kontrol secara sepihak, upaya memaksimalkan kepentingan

individu-individu tidak selamanya menyebabkan keseimbangan sistem norma.Fenomena tingkat makro lain yang menjadi sasaran penelitian adalah norma. Meski kebanyakan sosiolog menganggap norma dapat digunakan untuk menerangkan perilaku individu, namun mereka tak menerangkan mengapa dan bagaimana cara norma itu terwujud.

Coleman ingin mengetahui bagaimana cara norma muncul dan dipertahankan dalam sekelompok aktor yang rasional. Menurutnya norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari pengamalan terhadap norma dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma itu. Orang ingin melepaskan pengendalian terhadap perilaku mereka sendiri, tetapi dalam proses, mereka memperoleh pengendalian (melalui norma) terhadap perilaku orang lain. Coleman meringkas pendapatnya tentang norma yakni: Unsur sentral penjelasan ini adalah melepaskan sebagian hak untuk mengendalikan tindakan diri sendiri seseorang dan menerima sebagian hak untuk mengendalikan tindakan orang lain dan itulah yang memunculkan norma. Hasil akhirnya adalah bahwa pengendalian yang dipertahankan setiap orang sendirian akan terdistribusikan secara luas ke seluruh kumpulan aktor yang melaksanakan kontrol itu (Coleman, 1990).

Coleman mengakui bahwa norma saling berkaitan, tetapi masalah makro, hal seperti itu berada di luar cakupan karyanya tentang landasan sistem sosial. Di sisi lain ia ingin membahas masalah mikro mengenai internalisasi norma. Ia mengakui, dalam membahas internalisasi norma ia memasuki "perairan yang berbahaya bagi teori yang berlandaskan pilihan rasional" (1990). Coleman melihat iternalisasi norma memapankan sistem sanksi internal; aktor memberikan sanksi terhadap dirinya sendiri bila ia melanggar norma. Coleman melihat bahwa pemikiran seorang aktor atau sekumpulan aktor berupaya keras untuk mengendalikan aktor lain dengan mengingatkan norma yang

diinternalisasikan ke dalam diri mereka. Jadi, sekumpulan aktor berkepentingan untuk menyuruh dan mengatur aktor lain menginternalisasikan norma dan mengendalikan mereka. Ia merasa bahwa rasional "karena upaya seperti itu dapat efektif yang masuk akal" (1990).

Coleman melihat norma dari sudut tiga unsur utama teorinya dari mikro-makro, tindakan bertujuan di tingkat mikro dan dari makro ke mikro. Norma adalah fenomena tingkat makro yang ada berdasarkan tindakan bertujuan di tingkat mikro. Begitu muncul, norma, melalui sanksi atau ancaman sanksi, mempengaruhi tindakan individu. Tindakan tertentu mungkin membesarkan hati sedangkan tindakan lain mengecilkan hati. Aktor Korporat. Dengan kasus norma ini Coleman beralih ke tingkat makro dan melanjutkan analisisnya di tingkat makro dalam membahas aktor kolektif (Clark, 1996).

Di dalam kolektivitas seperti itu, aktor tak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi mereka, tetapi harus bertindak menurut kepentingan kolektivitas. Ada bermacam-macam aturan dan mekanisme untuk beralih dari pilihan individual ke pilihan kolektif (sosial). Aturan yang paling sederhana adalah dalam kasus pemungutan suara dan prosedur untuk menabulasikan suara pemilih individu dan memajukan keputusan kolektif. Inilah dimensi dari mikro ke makro, sedangkan sesuatu seperti daftar calon-calon yang diusulkan oleh kolektivitas menyangkut hubungan dari makro ke mikro.

Coleman menyatakan, baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan. Dalam struktur kolektif, seperti sebuah organisasi, aktor individual dapat mengejar tujuan pribadi mereka masing-masing yang mungkin berbeda dari tujuan kolektif. Konflik kepentingan ini membantu kita memahami sumber pemberontakan terhadap otoritas perusahaan. Hubungan dari mikro ke makro di sini meliputi berbagai cara di mana orang melepaskan otoritas dari struktur kolektif dan memberikan legitimasi kepada orang yang terlibat dalam pemberontakan. Tetapi, juga ada

hubungan dari makro ke mikro dalam kondisi tingkat makro tertentu yang menyebabkan orang bertindak seperti melepas dan menanam modal.

Sebagai teoritisi pilihan rasional, Coleman bertolak dari individu dan gagasan bahwa semua hak dan sumber daya ada di tingkat individual ini. Kepentingan individu menentukan jalannya peristiwa. Tetapi ini tidak benar terutama dalam masyarakat modern di mana bagian terbesar hak dan sumber daya dan karena itu kedaulatan terletak di tangan aktor kolektif (Cole 1990). Dalam kehidupan modern aktor kolektif mengambil peran yang penting. Aktor kolektif dapat bertindak demi keuntungan atau kerugian individu. Bagaimana cara kita menilai aktor kolektif dalam hal ini? Coleman berpendapat "bertolak secara konseptual dari titik di mana semua kedaulatan terletak di tangan manusia individual terbuka peluang untuk melihat seberapa baiknya kepentingan utama mereka disadari oleh sistem sosial yang ada. Dalil yang menyatakan bahwa manusia individu berdaulat telah membukakan bagi ilmu sosiolog untuk menilai pelaksanaan fungsi sistem sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat" (1990)

Menurut Coleman, perubahan sosial terpenting adalah munculnya korporat, sebagai pelengkap aktor "pribadi natural". Keduanya dapat dianggap sebagai aktor karena keduanya mempunyai "pengendalian terhadap sumber daya dan peristiwa, kepentingan terhadap sumber daya dan peristiwa, dan mempunyai kemampuan mengambil tindakan untuk mencapai kepentingan mereka melalui pengendalian itu" (1990). Memang selalu ada aktor korporat, tetapi aktor kolektif lama, seperti keluarga, terus-menerus digantikan oleh yang baru, aktor kolektif yang sengaja dibentuk.

Menurut Coleman, ini dapat dilakukan dengan mengadakan reformasi internal atau dengan mengubah struktur eksternal seperti peraturan hukum yang me-mengaruhi aktor kolektif itu atau agen yang dapat mengaturnya. Coleman membedakan antara struktur

primordial berdasarkan kekeluargaan, seperti pertentangan serta kelompok keagamaan, dan struktur yang berdasarkan tujuan tertentu, seperti organisasi ekonomi dan pemerintahan. Ia melihat kemajuan dalam "kebebasan" aktivitas yang pernah terikat bersama dalam keluarga.

Struktur primordial terlepas karena fungsinya diambil alih oleh sederetan aktor kolektif. Coleman (1990) sangat menaruh perhatian kepada kebebasan tersebut sebagaimana perhatiannya kepada fakta bahwa saat ini kita dipaksa untuk berhadapan dengan posisi dalam struktur purposif dari pada berhadapan dengan mereka yang mendiami struktur primordial. Karena itu kemudian, dia menyimpulkan bahwa tujuan dari kerjanya ini adalah "menyediakan pondasi untuk membangun struktur masyarakat yang luwes sebagai struktur primordial yang menghilangkan unsur "orang" di dalamnya".

Coleman (1990) mengecam kebanyakan teori sosial yang menyetujui pandangan yang ia sebut *homo sosiologicus*. Perspektif ini memusatkan perhatian pada proses sosialisasi dan keserasian antara individu dan masyarakat. Karena itu homo sosiologicus tak mampu menjelaskan kebebasan individu untuk bertindak seperti yang mereka inginkan walaupun paksaan dikenakan terhadap mereka. Lagi pula perspektif ini terbatas kemampuannya untuk mengevaluasi tindakan sistem sosial. Sebaliknya, homo economicus, menurut Coleman, memiliki semua kemampuan ini. Coleman menyerang teori sosial tradisional karena tak relevan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tak mampu membantu kita mengetahui ke mana arah perubahan masyarakat. Teori sosiologi (maupun riset sosiologi). Teori sosial dan ilmu sosial umumnya dibutuhkan untuk membangun masyarakat baru (Coleman, 1993, Bulmer, 1996). Tujuannya bukanlah untuk menghancurkan struktur purposif, tetapi lebih untuk mendapatkan peluang dan menyingkirkan masalah struktur purposif itu. Masyarakat baru memerlukan ilmu sosial baru pula. Kaitan antara bidang institusional yang telah berubah

dan ilmu sosial tentu akan dapat melintasi batas-batas ilmu tradisional.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran teori Max Weber dan Coleman tentang tindakan rasional individu dapat disimpulkan bahwa pemakaian teori Weber dan Coleman sebagai *theoritical orientation* dalam memahami pandangan (perspektif mikro) masyarakat petani yang tanah pertaniannya terjadi alih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu pabrik gula adalah kurang proporsional, dengan alasan sebagai berikut: *Pertama;* Pola tindakan petani dalam menerima ganti rugi lahan dari pihak perusahaan tidak lepas dari pertimbangan keterpaksaan individual, yang bersifat obyektif maupun subyektif. Tindakan petani menerima ganti rugi lahan pertanian dari pihak perusahaan juga didasarkan pada suatu pertimbangan rational intrumental, yaitu, (1) berdasarkan tujuan tertentu yang hendak dicapai; (2) ada skala prioritas atau kriteria-kriteria dalam mencapai tujuan; (3) sebelum melakukan tindakan dipikirkan aspek positif atau negatif yang akan muncul dari tindakan tersebut; dan (4) kemampuan meramalkan atau memprediksi ke depan dari tindakan tersebut. Kualitas kemampuan individu (kepala keluarga) dalam merumuskan berbagai tujuan sampai dengan memprediksi bagaimana dampak dalam menerima ganti rugi lahan pertaniannya.

Kedua; Memahami pola pandangan dan tujuan yang melekat dalam pikiran masyarakat petani yang tanah pertaniannya terjadi alih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu akan diperoleh hasil secara maksimal apabila mengunakan suatu metode verstehen (memahami subyek/individu secara mendalam), melalui penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara takterstruktur dan observasi partisipatif.

Ketiga; Memahami pola tindakan kepala keluarga petani yang tanah pertaniannya terjadi alih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu, tidak cukup dilihat dari satu macam tindakan tetapi bisa terkait pada tindakan yang lain, misalnya tindakan tradisional mengkait tindakan rasional

yang berorientasi nilai; Pola perilaku khusus yang dilakukan beberapa kepala keluarga yang mengalami alih fungsi lahan untuk perumahan bisa berbeda-beda karena perbedaan pandangan subyektif dari masing-masing individu; dan tindakan para kepala keluarga tersebut hanya dapat dimengerti menurut arti subyektif (verstehen) dan pola pandangan dan motivasional individu atau perorangan (Rossides, 1978; Giddens, 1985).

Bagian Kelima

TEORI DEPENDENSI

Asumsi Dasar Teori Dependensi

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan jilid dua di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga. Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri.

Salah satu pemikir utama yang sampai saat ini masih mendapatkan tempat dalam gugusan ilmu pengetahuan terkemuka adalah Karl Marx. Ketertarikan banyak orang akan pemikiran Marx terutama dalam masalah ekonomi dan kelas sosial menyebabkan pemikirannya relatif diminati dan dilestarikan. Kelompok intelektual yang merujukkan pendapatnya kepada Marx disebut dengan kaum Marxis. Ada dua hal utama dalam masalah pembangunan yang menjadi karakter kaum Marxis Klasik. *Pertama*, negara pinggiran yang pra-kapitalis adalah kelompok negara yang tidak dinamis dengan cara produksi Asia, tidak feodal dan dinamis seperti tempat lahirnya kapitalisme, yaitu Eropa. *Kedua*, negara pinggiran akan maju ketika telah disentuh oleh negara pusat yang membawa kapitalisme ke negara pinggiran tersebut. Ibaratnya, negara pinggiran adalah seorang putri cantik yang sedang tertidur, ia akan bangun dan mengembangkan potensi kecantikannya setelah disentuh oleh pangeran tampan. Pangeran itulah yang disebut dengan negara pusat dengan ketampanan yang dimilikinya, yaitu kapitalisme. Pendapat inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi.

Bantahan teori Dependensi atas pendapat kaum Marxis Klasik ini juga ada dua hal. *Pertama*, negara pinggiran yang pra-kapitalis memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan dinamika negara kapitalis. Bila tidak mendapat sentuhan dari negara kapitalis yang telah maju, mereka akan bergerak dengan sendirinya mencapai kemajuan yang diinginkannya. *Kedua*, justru karena dominasi, sentuhan dan campur tangan negara maju terhadap negara Dunia Ketiga, maka negara pra-kapitalis menjadi tidak pernah maju karena tergantung kepada negara maju tersebut. Ketergantungan tersebut ada dalam format "neo-kolonialisme" yang diterapkan oleh negara maju kepada negara Dunia Ketiga tanpa harus menghapuskan kedaulatan negara Dunia Ketiga.

Teori Dependensi juga lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang. Aliran neo-marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori

Dependensi ini. Tentang imperialisme, kaum Marxis Klasik melihatnya dari sudut pandang negara maju yang melakukannya sebagai bagian dari upaya manifestasi Kapitalisme Dewasa, sedangkan kalangan Neo-Marxis melihatnya dari sudut pandang negara pinggiran yang terkena akibat penjajahan.

Dalam dua tahapan revolusi, Marxis Klasik berpendapat bahwa revolusi borjuis harus lebih dahulu dilakukan baru kemudian revolusi proletar. Sedangkan Neo-Marxis berpendapat bahwa kalangan borjuis di negara terbelakang pada dasarnya adalah alat atau kepanjangan tangan dari imperialis di negara maju. Maka revolusi yang mereka lakukan tidak akan membawa perubahan di negara pinggiran, terlebih lagi, revolusi tersebut tidak akan mampu membebaskan kalangan proletar di negara berkembang dari eksploitasi kekuatan alat-alat produksi kelompok borjuis di negara tersebut dan kaum borjuis di negara maju.

Marxis Klasik percaya bahwa jika terjadi revolusi sosialis, maka hal itu sebaiknya dilakukan oleh kelompok proletar industri yang ada di kota-kota tempat berlangsungnya industrialisasi. Sedangkan Neo-Marxis berpendapat bahwa revolusi sosial sebenarnya kekuatan potensialnya terletak pada para petani di pedesaan dan rakyat yang ada di pinggiran perkotaan.

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank. Theotonio Dos Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang. Artinya, positif-negatif dampak pembangunan di negara maju

akan dapat membawa dampak pada negara berkembang. Dalam perkembangannya, teori Dependensi terbagi dua, yaitu Dependensi Klasik yang diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos, dan Dependensi Baru yang diwakili oleh F.H. Cardoso.

Pembangunan Menurut Theotonio Dos Santos

Ketergantungan adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara tertentu dipengaruhi oleh ekspansi dari ekonomi negara lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Dos Santos dalam mengkritisi pendapat kaum Marxis Klasik yang berpendapat bahwa kapitalisasi negara maju akan dapat membawa kemajuan pada negara-negara sedang berkembang.

Hubungan yang terjalin antara negara maju dan negara terbelakang adalah hubungan yang tidak sehat karena negara maju melakukan eksploitasi sumberdaya pada negara berkembang untuk kepentingan pembangunan di negaranya sendiri. Eksploitasi sumberdaya tersebut dilakukan melalui simpul-simpul industri yang ada di negara berkembang namun atas investasi negara maju, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh industri tersebut banyak yang ditarik ke negara maju, sedangkan beban dampak industrialisasi dilimpahkan ke negara berkembang yang menjadi tempat industrialisasi.

Keterbelakangan ekonomi negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh tindakan terintegrasinya mereka ke dalam tata ekonomi kapitalisme di negara maju. Namun disebabkan karena tindakan pengawasan ketat dan monopoli modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat internasional dan nasional. Pada gilirannya hal tersebut menjadikan negara Dunia Ketiga mereproduksi keterbelakangan, kesengsaraan, dan marginalisasi sosial dalam batas wilayahnya sendiri. Semakin tergantung satu negara Dunia Ketiga dengan negara maju, maka kondisi tersebut akan semakin berpotensi membawa keterbelakangan dan kesengsaraan pada negara Dunia Ketiga.

Pembangunan Menurut Andre Gunder Frank

Bagi Frank, teori Modernisasi memiliki kekurangan karena ia hanya memberikan penjelasan tentang faktor internal sebagai penyebab utama dari keterbelakangan di negara Dunia Ketiga. Teori Modernisasi mengesampingkan faktor eksternal yang juga tidak kalah penting dalam memberikan andil keterbelakangan di negara Dunia Ketiga. Frank menyangkal bahwa tradisionalisme dan feodalisme yang selama ini dituding sebagai akar penyebab gagalnya pembangunan di negara Dunia Ketiga.

Teori Modernisasi juga mengesampingkan konteks sejarah lahir dan berkembangnya negara Dunia Ketiga dengan sepenuhnya menggunakan sejarah negara Eropa sebagai ukuran historis dari pembangunan. Negara Barat dan negara Dunia Ketiga memiliki sejarah lahir dan berkembang yang berbeda. Negara Barat tidak pernah merasakan kolonialisasi sebagaimana yang terjadi di negara Dunia Ketiga. Perbedaan ini membawa dampak yang berbeda pada pembangunan yang dilakukan pada dua jenis negara tersebut.

Penjajahan dalam bentuk apapun telah merubah struktur politik-ekonomi di negara Dunia Ketiga karena mereka menjadi negara yang pernah dijajah oleh negara maju. Perubahan struktur politik-ekonomi inilah yang menuntut arah alternatif pembangunan yang sama sekali berbeda dengan pembangunan yang dilakukan di negara maju yang pernah menjajah negara Dunia Ketiga. Perubahan arah pembangunan ini menurut Frank sangat penting dilakukan karena sebenarnsebenarnya keterbelakangan bukan sesuatu yang alami, melainkan seperti barang ciptaan dari panjangnya sejarah kolonial di negara-negara Dunia Ketiga.

Secara agak radikal, Frank yang pernah bekerja di *Economic Commission in Latin America* menyebutkan bahwa dalam bentuk apapun juga, kapitalisme telah menyebabkan keterbelakangan di negara Dunia Ketiga, terutama secara politis. Dibawah pengaruh pendapat Presbich, Frank secara tegas menyatakan bahwa keterbelakangan di negara

berkembang adalah karena dampak pembangunan yang terjadi di negara maju.

Salah satu bukti dari pendapat ini adalah dengan melihat pembentukan kota atau negara satelit oleh negara maju di kawasan Dunia Ketiga. Kota atau negara satelit ini pada masa kolonial berfungsi sebagai wilayah yang memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi dari negara satelit ke negara maju. Kota-kota ini dipimpin atau diawasi oleh petugas yang memiliki otoritas penuh dari negara maju, sehingga mampu memlakukan determinasi kebijakan yang sangat luas kepada birokrat di negara Dunia Ketiga.

Krisis Pembangunan di Indonesia

Masalah yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada pertengahan tahun 1998, yang pertama dipicu dari krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi berbagai krisis lainnya, sehingga akhirnya sampai pada krisis kepercayaan. Fenomena ini memuat dua dimensi permasalahan : secara internal orang tidak lagi percaya kepada berbagai bentuk penguasaan atas diri dan masyarakatnya, dan secara eksternal orang tidak percaya lagi kepada masyarakat Indonesia. Demikian merosotnya harga diri bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini sendiri bertanya: siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana masyarakat Indonesia ini ?.

Clyde Kluckhohn (1961) membuat suatu kerangka orientasi sistem nilai budaya, yaitu sebagai konsep yang menerangkan dasar-dasar sistem nilai budaya tentang masalah pokok dari kehidupan manusia yang sifatnya universal. Secara umum Kluckhohn menggambarkan bahwa dari masalah dasar sistem nilai budaya itu sekurangnya mencirikan tiga bentuk masyarakat, (1) masyarakat tradisional, (2) masyarakat transisional, dan (3) masyarakat modern.

Pada masa sebelum terjadinya berbagai krisis yang menimpa masyarakat Indonesia, tidak sedikit orang Indonesia yang menyatakan bahwa secara umum masyarakatnya telah modern, hal ini terlihat dengan banyaknya intelektual dikalangan masyarakat yang menyatakan bahwa pendidikan

tringgi bukan lagi barang asing untuk masyarakat Indonesia, sarana dan prasarana yang memadai untuk kehidupan orang modern, juga tingkat hidup yang mencirikan orang modern (Inkeles, dalam : Weiner, 1976).

Namun pandangan itu ternyata sirna begitu saja pada saat era reformasi digaungkan, dalam banyak hal ternyata orang Indonesia bagaikan orang 'primitif' yang sedang mencari bentuk; dalam kenyataannya, bentuk masyarakat Indonesia belum sampai pada bentuk yang modern, mungkin masih transisional, bahkan mungkin masing tradisional. Pada bentuk hakekat tentang *karya* misalnya, orientasi nilai budayanya cenderung menganggap bahwa karya itu untuk mencapai suatu kedudukan, kehormatan, atau jabatan tertentu saja; bahkan ada kecenderungan bahwa karya itu hanya sekedar untuk mencari nafkah hidup saja, kenyataan mana tidak saja berlakku pada lapisan bawah atau menengah masyarakat, tetapi juga lapisan atas.

Kecenderungan orientasi tentang karya ini ternyata paralel dengan persepsi manusia tentang waktu, hanya sebagian kecil manusia Indonesia dan hanya sebagian aspek kehidupan saja yang berorientasi ke masa yang akan datang; menyimpan padi di lubung (*leuit* : komunitas Baduy) adalah perwujudan dari orientasi manusia ke masa yang akan datang, namun tidak menunjukan orientasi yang bersifat menyeluruh dari aspek kehidupannya. Jabatan atau kedudukan tertentu dalam masyarakat sifatnya tidak kekal, maka untuk menjaga kehidupan setelah lepas masa jabatannya, orang dengan segala upaya berusaha mengumpulkan segala sesuatu selagi masih berkuasa atau menjabat tanpa menghiraukan nilai-nilai, kaidah dan norma yang berlaku

dalam pengertian manusia modern berarti adanya penilaian yang tinggi dari masyarakat terhadap berbagai usaha diri sendiri sehingga menuntun manusia untuk mandiri, bukan dalam arti hidup sendiri tanpa menghiraukan keberadaan manusia lain. Faham ini kurang berkembang pada masyarakat Indonesia yang lebih menilai tingginya kebersamaan, gotong royong (orientasi *kolateral*) dan ketergantungannya kepada

figur atasan atau senior (orientasi *vertikal*). Dengan nilai-nilai luhurnya, manusia Indonesia seolah-olah digiring untuk tidak saling bersaing satu sama lain, bahkan mentabukan pertentangan dan labih menilai tinggi nilai keharmonisan; bentuk mana kalau dilihat dari sudut perubahan dan perkembangan masyarakat sangatlah tidak menguntungkan

Bagian Keenam

TEORI PEMBANGUNAN KONTEMPORER

Teori Sistem Dunia

Secara historis, program-program modernisasi pada tahun 1960-an di negara-negara Dunia Ketiga banyak mengalami kegagalan, sehingga mendorong munculnya teori Dependensi dengan aliran madzhab neo-Marxis yang mendasarinya. Teori Dependensi ini kemudian melakukan kritikan terhadap teori Modernisasi dan menuduhnya sebagai bentuk rasionalisasi dari imperialisme. Perdebatan antara dua kelompok teori ini menghangat pada tahun 1970-an. Pada saat inilah Immanuel Wallerstein menilai bahwa tata ekonomi kapitalis dunia tidak dapat dijelaskan hanya oleh dua perspektif teori yang telah mapan tersebut. Dalam hal ini Wallerstein mengajukan beberapa fakta yaitu:

1. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, Malaysia dan Singapura telah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa melakukan teori Modernisasi sebagaimana yang dipropagandakan oleh AS. Mereka juga tidak mengalami ketergantungan sebagaimana diusulkan oleh teori Dependensi.Ini merupakan tantangan serius bagi kekuatan ekonomi AS.
2. Adanya krisis di berbagai negara sosialis yang diawali dengan perpecahan di Republik Rakyat Cina dan runtuhnya Uni Soviet.
3. Fenomena krisis di Amerika Serikat akibat keterlibatannya dalam perang-perang di beberapa negara Dunia Ketiga, krisis Watergate, embargo minyak tahun 1975, inflasi dan stagnasi ekonomi Amerika Serikat akhir tahun 1970-an, adalah merupakan tanda mulai robohnya hegemoni ekonomi Amerika Serikat atas negara Dunia Ketiga.

Tiga hal pokok tersebut menjadi latar belakang historis kemunculan teori world empire yang diusulkan oleh Immanuel Wallerstein. Dengan menggunakan kerangka pemikiran neo-Marxis, ia dan beberapa sosiologi lainnya melakukan kajian terhadap pembangunan di negara Dunia Ketiga dengan perpektif yang berbeda dengan teori Modernisasi dan Dependensi.

Asumsi dasar dari teori ini menyatakan bahwa dunia awalnya dikuasai oleh kekuatan lokal dengan sistemnya masing-masing, lalu kekuatan ini saling menjalin hubungan walaupun terpisahkan lokalitasnya. Kemudian terjadi penggabungan sistem baik oleh penaklukan. Sebuah Kerajaan Dunia (*World Empire*) kemudian muncul dan mengendalikan sistem ekonomi-politik dari sistem-sistem negara dibawahnya, walaupun tidak secara yuridis. *World Empire* inilah yang sekarang mengendalikan negara-negara di dunia. Dengan tinjauan teoritik tersebut, muncul tiga klasifikasi negara dan fungsi ekonominya antara satu dengan lainnya, tiga klasifikasi tersebut adalah: (1) *Negara Pusat*, mengambil keuntungan dari: (2) *Negara Pusat-Pinggiran*, mengambil keuntungan dari: (3) *Negara Pinggiran*, pihak yang paling dieksploitir.

Wallerstein tidak sepakat dengan pendekatan Dependensi yang melihat bahwa dalam ketergantungan yang terjadi, hanya ada dua jenis negara yaitu negara pusat dan negara pinggiran. Dalam kata lain ada negara metro dan ada juga negara satelit. Ketidaksepakatan ini berangkat dari anggapan bahwa dunia, negara dan pembangunan yang sedang dan akan terjadi ini tidak begitu kompleks. Tidak sesederhana seperti yang dijelaskan oleh teori Dependensi dengan penggolongan tersebut. Untuk itulah kemudian ia mengusulkan adanya tiga klasifikasi negara yang kini sedang muncul di dunia.

Lebih lanjut, tiap negara dilihat dalam bingkai sistem dunia secara utuh dan tidak dapat berdiri sendiri. Tiap negara dalam kasta tersebut naik status menuju negara dengan tingkat kemakmuran lebih baik. Menurut Immanuel Wallerstein, ada

tiga strategi bagi sebuah negara untuk dapat menaikkan kastanya dalam konsep *world empire*, yaitu:

1) Berani merebut kesempatan untuk berspekulasi melakukan industrialisasi substitusi barang impor oleh negara pinggiran. Ketika hal ini berani dilakukan oleh negara pinggiran, maka ia akan dapat menyiapkan ancang-ancang untuk tidak tergantung oleh negara pusat dalam hal pasokan barang-barang baku industri di dalam negerinya sendiri;
2) Menarik investasi perusahaan luar negeri untuk mendirikan perusahaan multinasional dan menggandeng pengusaha lokal. Dalam hal ini, peran negara menjadi sangat vital karena institusi yang bernama negara yang mampu melakukan koordinasi dan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil domestik yang pada umumnya memiliki modal, tenaga ahli dan wilayah pemasaran produksi terbatas. Jenis industri domestik dalam skala internasional jelas memerlukan dana yang tidak sedikit karena ia akan bersaing dengan produk unggulan negara-negara maju yang sudah memiliki pangsa pasar jelas dengan kualitas yang telah teruji. Yang dapat mengawal hal ini adalah negara yang menjadi institusi politik tertinggi dalam sebuah kawasan;
3) Negara menjalankan kebijakan internal untuk memandirikan perekonomian negaranya sendiri dan terbebas dari dominasi negara pusat. Salah satu kebijakan internal tersebut dapat berupa politik dumping atau proteksi atas produk-produk industri dalam negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. Proteksi ini juga menuntut perlindungan dari sisi kebijakan ekonomi yang merupakan otoritasa pemerintah negara pinggiran dan pasokan modal yang juga harus diperbantukan untuk mampu meningkatkan industri tersebut menjadi usaha yang lebih besar dan mampu bersaing dengan industri luar negeri lainnya. Selain itu, pemerintahan negara pinggiran juga harus mulai menyiapkan tenaga ahli dalam negeri untuk pada saatnya nanti mereka dapat mengembangkan

teknologi industri domestik. Dengan peningkatan penguasaan teknologi industri domestik, maka produk industri dalam negeri akan dapat bersaing ditengah pasar global yang sedang berjalan. Dengan survive-nya industri domestik, maka pendapatan nasional sebuah negara akan berpotensi mengalami surplus pertumbuhan ekonomi. Surplus pertumbuhan ekonomi dapat membawa kesejahteraan dan kemakmur

Bagian Ketujuh

KEMISKINAN PEDESAAN

1. Konsep Kemiskinan Dalam skala Global

Satu pemikiran mutakhir mengenai debat penghapusan kemiskinan berfokus pada cara memahami kemiskinan dalam skala global. Belakangan kemiskinan pun mencuat kembali di negara-negara maju. Kemiskinan bukan khas hanya terjadi di negara-negara berkembang, melainkan juga di negara-negara maju. Dua dasawarsa terakhir ini, menyusul dijalankannya kebijakan neoliberal, telah pula memerosotkan kondisi kehidupan warga di belahan Utara atau negara-negara industri di Barat.

Berakhirnya era perang pada 1970-an telah menjadikan para pembuat kebijakan di negara-negara maju mengabaikan pendekatan Keynesian dan menggantikannya dengan kebijakan yang menganut *"ortodoksi neoliberal*" yang menganggap pertumbuhan akan bergerak maju bila korporasi lebih fokus pada aspek persaingan. Memang dalam rentang dua dasawarsa itu telah terlihat kemajuan ekonomi dan produktivitas yang cukup positif, namun hal ini tidaklah tanpa masalah. Reformasi stuktural, istilah yang dikenal dari kelompok neoliberal ini, telah meroketkan tingkat persaingan dan menurunkan keuntungan perusahaan dan pelaku usaha. Korporasi-korporasi pun bereaksi memecat pekerja, memotong gaji karyawan, dan mengurangi kesejahteraan mereka.

Pemerintah yang ditekan untuk melakukan pengurangan defisit juga akhirnya mengurangi nilai pengeluaran belanjanya untuk kesejahteraan publik.

Jika tidak segera ditemukan satu solusi global penghapusan kemiskinan yang disetujui bersama, kemiskinan dan pengangguran tidak akan terbendung menerpa belahan bumi, baik Utara maupun Selatan. Lebih lanjut juga penting untuk memikirkan pemecahan kemiskinan dalam kerangka global karena dalam beberapa kasus kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang ternyata diakibatkan oleh pengaruh kebijakan internasional yang membuat pemerintah di negara-negara berkembang tak memiliki pengaruh, sulit untuk mengakses pasar negara-negara maju.

Penghapusan kemiskinan mensyaratkan upaya global yang disepakati bersama untuk menghapus utang, mengelola korporasi dan keuangan internasional, dan mendukung kebijakan sistem perdagangan global yang adil. Kesepakatan dan tindakan secara internasional ini pun harus memfasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan internal pembangunan di dalam negeri seperti korupsi, kepentingan-kepentingan sekelompok kecil elite domestik, atau pengelolaan layanan publik yang buruk di tingkat nasional. Singkatnya, agenda penghapusan kemiskinan bukanlah hanya dengan berupaya mengurangi derita manusia melainkan juga bagaimana ia berperan utama dalam melestarikan pembangunan dan menjalankan fungsi pasar dengan baik.

Suatu ciri yang paling penting globalisasi ekonomi yang menjadi kecenderungan dunia saat ini ialah tumbuhnya kepentingan perusahaan multinasional (*Multinational Corporations/MNCs*). Mereka adalah organisasi bisnis yang melakukan operasi lebih dari satu negara. Perusahaan-perusahaan multina-sional sekarang ini telah mendominasi perdagangan hampir semua komoditas penting dunia. Beberapa eksemplar perusahaan multinasional yang dikenal ialah General Motors dan Ford di industri

otomotif; Esso, Shell, British Petroleum di industri minyak; McDonald di rantai makanan cepat saji; AT&T dan International News Corporation di sektor komunikasi; dan bank-bank utama Jepang yang sekitar 23 banknya merupakan 50 bank terbesar di dunia yang melayani jaringan keuangan.

Sulit untuk mengelak dari kesimpulan bahwa korporasi-korporasi multina-sional telah ikut berperan menyumbang angka kemiskinan dunia. Di bumi ini lebih dari 2,8 miliar orang, atau sekitar setengah penduduk dunia, hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan ketetapan internasioanal, yaitu dengan kurang dari 2 dolar AS per hari. Di antara mereka, tak kurang dari 1,2 miliar jiwa hidup dalam kemiskinan yang amat parah (*extreme poverty*) yang hanya mengandalkan kurang dari 1 dolar AS per hari. Kebanyakan mereka adalah penduduk di kawasan Asia dan Afrika. Petaka kemiskinan ini lebih besar menimpa mereka yang perempuan ketimbang laki-laki dan juga lebih tinggi melanda mereka yang di pedesaan daripada di perkotaan.

Kelompok-kelompok yang rentan seperti mereka yang sudah lanjut usia, etnik minoritas, pengungsi, atau penyandang cacat juga lebih besar lagi tertimpa tragedi kemiskinan. Sejak 1987, bencana kemiskinan dikatakan telah mengalami penurunan, dan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemisikinan (hidup di bawah 1 dolar per hari) menurun dari 28 persen hingga 24 persen dari total populasi negara-negara berkembang. Namun sebetulnya kemiskinan sama sekali tidaklah berkurang. Pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi di negara-neggara berkembang, dan banyak mereka yang lahir dalam keadaan papa dalam penjara kemiskinan. Menggunakan data Bank Dunia, jumlah orang miskin sebetulnya meningkat sejak akhir 1980-an. Saat ini, lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia mati tiap

tahunnya karena mereka terlalu miskin untuk bertahan hidup. Setiap hari pemberitaan di media melaporkan puluhan ribu orang meninggal diakibatkan kemiskinan yang amat parah. Orang-orang miskin mati di bangsal-bangsal rumah sakit yang kekurangan obat, di desa-desa yang tak cukup memiliki ranjang berjaring antimalaria, di rumah-rumah yang amat minim air minum sehat. Mereka meninggal dengan tak diketahui khalayak, tanpa komentar masyarakat luas, dan kisah tentang mereka jarang ditulis media. Sebagian dari mereka adalah penduduk Indonesia. Di Indonesia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005 lalu dianggap sebagai pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga Maret 2006 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah tak kurang dari 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,1 juta (15,97 persen), maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

2. Indikator Kemiskinan

Masalah kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat

lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural).

Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi defenisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif.

Badan Perencana Pembangunan Nasional (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Badan Perencana Pembangunan Nasional menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective*

and *subjective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyara-kat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.

Pendekatan ini, menentukan secara *rigid* standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemung-kinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya.

Indikator-indikator tersbut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berikut ini;

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat penda-patan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah (BPS, 2004);
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mandapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin;
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung;

4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga;
5. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai;
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air;
7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian;
8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta ter-batasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan;
9. Lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600

konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik;

10. Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;
11. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya

kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Wacana kemiskinan itu muncul, maka abstraksi dan persepsi awal yang sering terlintas dalam pemahaman banyak orang bahwa kemiskinan tersebut adalah ketidakmampuan orang dalam hal materi (uang dan kebendaan). Walaupun pengertian kemiskinan dalam bentuk seperti ini tidaklah salah, tetapi juga tidak bisa juga dibenarkan. Kemiskinan meliputi berbagai dimensi. Seperi yang disebutkan sebelumnya (latar belakang pemikiran), dimensi seperi kesehatan pendidikan dan masalah sosial lainnya juga merupakan dimensi dari kemiskinan itu sendiri.

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti "tidak berharta-benda" (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan balk secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Berbagai sudut pandangan tentang pengertian kemiskinan, pada dasamya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yakni kemiskinan *struktural,* kemiskinan *relatif* dan kemiskinan *absolut.*

Menurut Nasikun (1995), Kemiskinan adalah: "sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti

akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap".

Menurut Gunawan dan Sugiyanto, (2006) dalam kerangka memahami potensi keluarga miskin, paling tidak terdapat tiga bentuk potensi yang diamati, yakni (1) Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, Tinjauan tentang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan akan dilihat dari aspek (1) pengeluaran keluarga, (2) *human capital* atau kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan (3) *security capital* atau kemampuan menjangkau perlindungan dasar, (4) Kemampuan dalam pelaksanaan peran sosial. Tinjauan tentang kemampuan peran sosial akan dilihat dari (a) kegiatan utama dalam mencari nafkah, (b) peran dalam bidang pendidikan, (c) Peran dalam bidang perlindungan, dan (d) peran dalam bidang kemasyarakatan (e) Kemampuan dalam menghadapi permasalahan. Tinjauan tentang kemampuan dalam menghadapi permasalahan, akan dilihat dari upaya mereka lakukan untuk mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto

dkk, 2006). Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk.,2006).

Dari berbagai definisi-definsi kemiskinan sebagaimana dipaparkan baik oleh para ahli maupun dari Bank Dunia yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpuilan bahwa perlu adanya pemahaman yang sama tentang masalah kemiskinan. Secara umum terdapat satu benang merah pemahaman dasar tentang kemiskinan, yakni: satu kondisi dimana seseorang mengalami ketidakberdayaan dan kekurangan baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Definisi ini dipandang terlalu luas dan universal, hal ini dimaksudkan sebagai upaya mengakomodir berbagai indikator penyebab timbulnya masalah kemiskinan yang multidimensional.

4. Kemiskinan dan Arah Kebijakan Pembangunan

Pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan sering kali menitikberatkan pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumberdaya manusia pembangunan yang harus senantiasa ditingkatkan kualitas dan martabatnya. Pembangunan yang bertumpu pada peran serta masyarakat *(people driven)* dilaksanakan secara merata di semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi, dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadi ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok

atau golongan masyarakat (sosial). Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, masyarakat dan segenap pelaku ekonomi. Keadaan kemiskinan pada umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selain itu, berdasarkan pola waktunya kemiskinan dapat dibedakan menjadi: *persistent poverty, cyclical poverty, seasonal poverty, serta accidenal poverty.*

Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Umumnya menimpa wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang kritis dan atau terisolasi. *Cyclical poverty,* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu *seasonal povery*, yaitu kemiskinan musiman seperti yang terjadi pada usahatani tanaman pangan dan nelayan. Pola yang lain adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Penduduk miskin erat kaitannya dengan wilayah miskin. Wilayah dengan potensi daerah yang tertinggal besar kemungkinan menyebabkan penduduknya miskin. Oleh karena itu pendekatan pemecahan kemiskinan dapat pula dilakukan terhadap pengembangan wilayah atau desa.

Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya merata. Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata pula. Kondisi kemiskian dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan

kerja dan kondisi keterisolasian, motivasi dan kesadaran untuk lepas dari kungkungan kemiskinan yang menghimpit.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, maka kebijaksanaan dituangkan dalam tiga arah kebijaksanaan. Pertama kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua kebijaksanaan langsung yang ditujukan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Saat ini, mengingat pentingnya program kemiskinan, pemerintah telah menyusun lembaga, dan strategi, kebijakan dan program yang mudah dan implemtatif. Untuk pemerintah kabupaten, lembaga yang berkompeten dengan kemiskinan adalah: Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), Departemen Kesehatan, Depdiknas, BPS, PMK, Bagian Sosial, dan sebagainya.

Kemiskinan pula dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih banyak melibatkan faktor sumberdaya manusianya, dimana manusianya tidak mampun berkreaasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-haris misalnya, karena diakibatkan oleh keterbatasan pola pikir serta prilaku. sedangkan faktor eksternal menunjukan kondisi yang lebih kompleks karena satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Oleh karenanya, program akan berjalan efektif apabila memperhatikan unsur kedua-duanya.

1. Paradigma Yang Keliru

Berbicara mengenai kemiskinan, selalu diiringi dengan program-program penanggulangannya. Namun, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hasilnya belum sesuai harapan yang diinginkan semua pihak. Evaluasi yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat beberapa kekeliruan paradigmatik (Hurareh, 2005):

1. Program yang diberikan masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada aspek ekonomi terbukti gagal, karena pengentasan kemiskinan yang selalu direduksi dalam soal-soal ekonomi padahal itu tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Dalam konteks budaya, orang miskin diidentikkan dengan terlembanganya nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistic, ketidakberdayaan, dll. Sementara dalam konteks structural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya disebkan kemiskinan structural dan politis.
2. Cenderung bernuansa karitatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas. Hal ini menyebabkan tidak muncul dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk berupaya mengatasi kemiskinannya. Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan agar mereka menjadi produktif.
3. Masyarakat miskin yang diposisikan sebagai objek bukan sebagai subjek. Seharusnya, mereka dijadikan sebagai subjek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan.
4. Pemerintah sebagai penguasa bukan fasilitator. Pemerintah seharusnya memposisikan diri sebagai fasilitator, yang tugasnya mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

1. Paradigma Lama Penanggulangan Kemiskinan

Aktivitas utama dari penanggulangan kemiskinan selama ini didominasi oleh dua pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pemenuhan konsumsi per kapita (menggunakan garis kemiskinan dan bersifat makro). Pasokan datanya

dikerjakan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/Biro Pusat Statistik (BPS); dan (2) pendekatan yang berbasis keluarga. Pende-katan ini memiliki patokan 8 (delapan) ciri rumah tangga miskin, yaitu: (1) luas lantai rumah kurang dari 8 m^2; (2) jenis lantainya tanah; (3) menggunakan air hujan atau dari sumber air tak terlindung sebagai pasokan air bersih; (4) tidak memiliki jamban; (5) tidak memiliki asset; (6) tidak ada ketersediaan lauk pauk, atau ada sedikit lauk pauk tapi tidak bervariasi; (7) tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosial; dan (8) tidak pernah membeli pakaian. Pendekatan yang kedua ini biasa dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN menggolongkan masya-rakat menjadi pra-sejahtera (miskin), sejahtera I (sedikit diatas ambang garis kemiskinan) dan sejahtera II (jauh di atas ambang kemiskinan).

Kedua pendekatan di atas banyak memiliki kelemahan mendasar, yaitu: ***Pertama,*** kedua pendekatan tersebut di atas tidak membuka peluang bagi suara dan aspirasi orang miskin. Hal itu berarti definisi kemiskinannya bisa bertabrakan dengan definisi kemiskinan dari orang miskin itu sendiri. Akibatnya, definisi dan operasionalisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak cukup layak untuk memahami realitas kemiskinan yang sesungguhnya terjadi. ***Kedua,*** kedua pendekatan tersebut menimbulkan konsekuensi operasionalisasi teknis kegiatan penanggulangan kemiskinan menjadi pendekatan ekonomi yang bersifat kedermawanan (*charity*). Hal itu berarti orang miskin menjadi obyek dari suatu aktivitas yang bersifat proyek dan hanya mampu menjawab masalah dalam jangka pendek. ***Ketiga***, kedua pendekatan tersebut tidak memiliki kepekaan terhadap keragaman konteks wilayah, sektoral

maupun kedalaman kemiskinan. ***Keempat,*** kedua pendekatan itu tidak bisa diharapkan dapat menyumbang proses demokratisasi karena hanya menghasilkan pola hubungan subordinat di mana "pengendali proyek" penanggulangan kemiskinan sebagai "si der-mawan" dan lapisan miskin sebagai "yang terpilih untuk dikasihani". Kelima, kelemahan mendasarnya adalah kedua pendekatan itu gagap dan mengingkari persoalan yang menjadi akar masalah atau sebab-musabab kemiskinan.

Ciri pokok dari penanggulangan kemiskinan di masa lalu, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sendirinya akan membereskan kemiskinan; (2) kemiskinan lebih banyak dilihat sebagai kurangnya pendapatan dan kurangnya konsumsi, dan (3) kemiskinan dianggap sebagai gejala kantong-kantong kemiskinan. Menurut Laode Ida (2002) pembe-rantasan kemiskinan dimasa lalu menganut paham bahwa, perlu ada program khusus yang ditujukan secara langsung untuk mengurangi penduduk miskin. Paham ini tidak memahami penyebab atau akar masalah, tetapi hanya mengobati akibat.

Realitas kemiskinan yang semakin meluas saat ini menunjukkan bahwa, tatanan ekonomi, politik, sosial dan budaya justru berperan besar dalam melanggengkan kemiskinan itu sendiri. Hal ini dapat dicermati dari masalah sistem alokasi sumber daya alam, kecenderungan utama dalam tatanan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menguatkan proses pemiskinan rakyat, antara lain: (1) luasnya ekspansi modal dan permintaannya terhadap ketersediaan tanah murah dalam skala besar; (2) politik hukum agraria yang tidak adil dan (3) sistem politik pemerintahan yang hegemonic. Ketiga kecenderungan utama di atas memberikan kontribusi terhadap membesarnya jumlah petani

gurem (petani dengan pemilikan dan penguasaan tanah tidak lebih dari 0,2 hektar) dan petani tuna kisma (petani tanpa pemilikan dan penguasaan tanah pertanian), serta petani di luar Jawa yang tercerabut dari akar budaya aslinya karena diklaim Pemerintah sebagai perambah hutan dan terasing yang harus "dimodernkan" tapi dengan syarat melepas tanah adatnya (KIKIS, 2003).

Gambaran masalah tersebut merupakan salah satu dari realitas kemiskinan struktural. Kemiskinan tidak dapat ditanggulangi dengan pendekatan atau strategi yang menolak atau mengingkari realitas yang menjadi sumber penyebab kemiskinan itu sendiri. Pendekatan atau strategi yang instrumental, yakni yang mencoba mengurangi ciri-ciri kemiskinan yang ada pada komunitas miskin ternyata hanya mampu menyelesaikan secara jangka pendek dan justru memberi peluang untuk kembali terjebak dalam kemiskinan yang lebih dalam. Hal ini yang sulit dipahami, program penanggulangan kemiskinan justru menghasil-kan penguatan masalah kemiskinan.

Menurut Suharto (2003) hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (modernization paradigm) yang bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi dan model yang berpusat pada produksi (*production centered*). Paradigma tersebut memiliki berbagai kelemahan sehingga diperlukan paradigma baru yang lebih berpusat pada manusia (people centered). Paradigma baru studi kemiskinan, antara lain: (1) kemiskinan sebaiknya tidak hanya dari karak-teristik orang miskin yang statis, melainkan dilihat secara dinamis; (2) indikator untuk mengukur kemiskinanan sebaiknya tidak tunggal, melainkan

komposit; (3) konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap dari pendapatan dalam memotret dinamika kemiskinan; dan (4) pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencarian (*livelihoods capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*assets management*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemam-puan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).

Menurut KIKIS (2003) paham apapun tentang kemiskinan dan pendekatan apapun dalam penanggulangan kemiskinan tidak akan ada manfaatnya jika tidak menyediakan jaminan bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin. Dalam perspektif hak, kaum miskin dilihat sebagai manusia yang bermartabat. Kebijakan yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang memihak mereka (*Not pro-poor policy*), tetapi suatu kebijakan yang berdasar pada kepentingan aktualisasi hak-hak dasar mereka. Memposisikan manusia bermartabat tetapi sebagai obyek kebijakan, berbeda dengan memposisikan manusia bermartabat sebagai subyek kebijakan. Perspektif hak memberi prinsip dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan di masa depan, yakni pendekatan berbasis hak-hak dasar kaum miskin dalam program dan strategi penanggulangan kemiskinan (Dandan dan Rubens, 2001).

Hal ini menjadi insiatif grand-strategy dari paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan yang memiliki nilai dasar: penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin. Realitas kemiskinan saat ini menunjukkan

bahwa, telah terjadi proses penghancuran martabat manusia.

Strategi yang dapat dikembangkan dalam perspektif hak kaum miskin antara lain: pertama, memastikan hak-hak dasar kaum miskin diakui. Tidak cukup hanya dengan dinyatakan dalam konstitusi (secara hukum), tetapi harus dipastikan dalam setiap tindakan bahwa hak-hak dasar kaum miskin tidak akan dikhianati. Kedua, hak-hak dasar kaum miskin tersebut tidak dapat diberikan atau dicabut.

Dengan demikian peran Negara dalam hal ini harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar kaum miskin tersebut. Ketiga, dalam kerangka negara melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kaum miskin, maka negara seyogianya melakukan tindakan politik tanpa diskriminasi. Keempat, wilayah strategis dalam penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada konteks wilayah dan sektor. Kenyatan kemiskinan di perdesaan adalah karena ketiadaan akses terhadap sumber daya yang memberi keamanan bagi keberlanjutan hidup (Gardiner dan Suleeman, 2004).

Mencermati beberapa kelemahan paradigma modernisasi dan realitas tingginya jumlah penduduk miskin walaupun telah banyak dilakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan, maka paradigma yang digunakan merupakan konvergensi paradigma pembangunan berpusat pada manusia (Korten dan Klaus, 1984; Chamber, 1993) dan paradigma pendidikan kritis (Freire, 1968).

Menurut Maksum dan Ruhendi (2004) kesadaran magis dan kesadaran naif berkaitan dengan perspektif berpikir masyarakat di era pra-modern dan modern, sedangkan perspektif beripikir

masyarakat post-modern cenderung berada pada kesadaran kritis. Kemampuan berpikir kritis harus diterima secara politis dalam konteks politik pendidikan dan pelembagaannya harus mengalami penguatan praksis pada tingkat pembelajaran (Danin, 2003). Sebagai contoh, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran kritis akan memandang sistem dan struktur sebagai penyebab kemiskinan, sedangkan mereka yang memiliki kesadaran naif memandang kesalahan diri sendiri sebagai penyebab kemiskinan.

Strategi Penangunggalan Kemiskinan Di Pedesaan

Dilihat dari kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini, strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak kepada rakyat miskin, *option for the poor* menjadi kebutuhan mutlak menanggulangi kemiskinan. Untuk membuat sebuah strategi dan kebijakan alternatif, diperlukan pengetahuan yang memadai tentang penyebab utama kemiskinan masyarakat desa. Dari serangkaian penyebab kemiskinan masyarakat desa yang telah telah disebutkan di depan, maka strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan desa dapat dilakukan dengan cara;

1. Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai, secara gratis dan cuma-cuma. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorentasi keberpihakan kepada orang miskin (pendidikan untuk orang miskin). Pendidikan yang ditawarkan di Indonesia saat ini sangat mahal dan biayanya sulit dijangkau oleh orang-orang miskin. Karenanya, mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka, sebab beban biaya pendidikan yang ada, tidak sebanding dengan kemampuan keuangan mereka. Masya-rakat desa selalu mengatakan bahwa "jangankan

untuk menyekolahkan anak-anak, untuk makan sehari-hari saja, susahnya minta ampun;

2. Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang. Ketimpangan kepemilikan lahan pertanian, memperlebar jurang kemiskinan antara masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sebagian besar tanah-tanah pertanian yang subur dimiliki oleh tengkulak lokal dan tuan tanah. Akibatnya, tanah-tanah pertanian yang ada, tidak memberikan penghasilan yang cukup bagi orang-orang desa yang memiliki tanah dan modal pertanian yang terbatas. Sebagian besar tenaga dan fisik mereka dipergunakan untuk menjadi buruh di tanah-tanah pertanian milik tuan tanah dan tengkulak lokal;
3. Mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerah pedesaan. Pembukaan investasi pertanian dan pertambangan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa. Dengan begitu, pendapatan mereka akan meningkat dan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan hidup;
4. Membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh kredit usaha yang mudah. Sistem kredit yang ada saat ini, belum memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa dan sering salah sasaran. Karena itu, diperlukan kebijakan baru yang memberikan jaminan kredit usaha yang memadai bagi masyarakat desa;
5. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat desa. Kebutuhan sandang, papan dan pangan perlu dilakukan melalui sebuah mekanisme lumbung desa yang memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat desa, memperoleh sumber-sumber kebutuhan yang disediakan secara terorganisir;
6. Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan

teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai. Teknologi pertanian diperbanyak dan diberikan secara cuma-cuma kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup mereka;

7. Memberikan jaminan kesehatan kepada mayarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit-unit layanan kesehatan kepada masyarakat desa yang miskin dan terbelakang;
8. Memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. Jaminan asuransi dan jaminan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan semangat hidup yang lebih berarti. Sistem asuransi dan jaminan sosial yang ada saat ini, diberlakukan secara diskriminatif, hanya terbatas kepada mereka yang memiliki uang saja. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan asuransi yang memadai kepada masyarakat miskin;
9. Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan. Tatanan pemerintahan yang ada saat ini, memberikan keleluasaan bagi terjadinya praktik korupsi dalam seluruh level pemerintahan. Perbaikan tatanan pemerintahan, menjadi kata kunci untuk membuat program penanggulangan kemiskinan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat miskin;
10. Menendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama, mendorong tekad semua pihak untuk mengakui kegagalan penanggulangan kemiskinan selama ini, membangkitkan kesadaran kolektif agar

memahami kemiskinan sebagai musuh bersama, dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam memberantas kemiskinan.

Secara umum, program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggu-langi kemiskinan di desa adalah;

1. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh penduduk miskin. Karena itu, kebijakan dan program yang memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil (misalnya; pertanian, perikanan, manufaktur, usaha kecil menengah), terutama di sektor informal yang menjadi tulang punggung orang miskin. Agar pertumbuhan ekonomi ini berjalan dan berkelanjutan, maka di tingkat nasional diperlukan syarat; (a) stabilitas makro ekonomi, khususnya laju inflasi yang rendah dan iklim sosial politik dan ekonomi yang mendukung investasi dan inovasi para pelaku ekonomi. Secara garis besar hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah pusat; (b) diperlukan kebijakan yang berlandaskan pradigma keberpihakan kepada orang miskin agar mereka dapat sepenuhnya memanfaatkan kesempatan yang terbuka dalam proses pembangunan ekonomi; (c) memberikan prioritas tinggi pada kebijakan dan pembangunan sarana sosial dan sarana fisik yang penting bagi masyarakat miskin, seperti jalan desa, irigasi, sekolah, air minum, air bersih, sanitasi, pemukiman, rumah sakit, dan poliklinik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa program yang bisa dijalankan dengan menggunakan kebijakan ini adalah;

a. Program penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat miskin (PUSKESMAS, POSYANDU), dan sebagainya;
b. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan pendidikan gratis bagi orang miskin;
c. Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan informal dan keterampilan bagi masyarakat miskin, melalui inisiatif dari pemerintah daerah, juga melalui kerjasama dengan badan pendidikan, perguruan tinggi atau dengan LSM lokal;
d. Program pembentukan modal usaha melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lembaga-lembaga keuangan agar mereka ikut serta dalam program kredit dan tabungan;
e. Program sertifikasi tanah dan tempat usaha bagi orang miskin untuk menjaga asetnya dengan baik;
f. Program pengembangan pusat pasar pertanian dan pusat informasi perdagangan.

2. Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulanganya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Kebijakan dalam memberdayakan kelompok miskin harus diarahkan untuk memberikan kelompok miskin akses terhadap lembaga-lembaga sosial, politik dan hukum yang menentukan kehidupan mereka. Untuk memperluas akses penduduk miskin diperlukan; (a) tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama birokrasi pemerintahan, lembaga hukum, dan pelayanan umum lainnya; (b) dalam tatanan pemerintahan

diperlukan keterbukaan, pertanggungjawaban publik, dan penegakan hukum, serta partisipasi yang luas masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa program yang bisa dilaksanakan adalah;

a. Program penguatan organisasi sosial, kelompok ekonomi, dan organisasi swamasyarakat lainnya seperti kelompok arisan, kelompok petani pangan, pedagang kecil, simpan-pinjam dan sebagainya;
b. Program keterlibatan kelompok miskin dalam proses pendidikan demokrasi, misalnya dalam pengambilan keputusan melalui *public hearing,* peng-gunaan hak tanya dan sebagainya;
c. Program keterlibatan kelompok miskin dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.

3. Kebijakan dan Program yang Melindungi Kelompok Miskin. Kelompok masya-rakat miskin sangat rentan terhadap goncangan internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun goncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi goncangan-goncangan tersebut. Kebijakan dan program yang diperlukan mencakup upaya untuk; (a) mengurangi sumber-sumber resiko goncangan; (b) mening-katkan kemampuan kelompok miskin untuk mengatasi goncangan dan; (c) menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif. Beberapa program yang bisa dilaksanakan untuk kategori ini adalah;

   a. Program lumbung desa yang sudah dikenal sejak lama. Program ini dapat disempurnakan dengan memasukkan metode yang lebih baik;
   b. Program kredit mikro atau koprasi simpan pinjam untuk kelompok miskin yang mudah

diakses, dengan persyaratan atau agunan yang mudah dan syarat pengembalian yang fleksibel;
   c. Program pengembangan modal usaha dan kewiraswastaan untuk mendorong kelompok miskin meningkatkan kemampuan pemupukan modal usahanya secara mandiri dan berkelanjutan;
   d. Program pembentukan lembaga khusus penanggulangan bencana alam dan sosial yang terpadu, efektif dan responsif di daerah.
4. Kebijakan dan Program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi; hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan. Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam kategori ini adalah;
   a. Program pemberian sarana dan berupa beasiswa maupun bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin;
   b. Program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak miskin yang mengikuti pendidikan di sekolah;
   c. Program magang atau menyerap lulusan sekolah kejuruan atau diploma;
   d. Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan produktif;
   e. Program penyuluhan bagi para ibu, bapak dan remaja, tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam berumah tangga.
5. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat desa dapat menanggulangi sendiri kemiskinannya. Kadang-kadang pemerintah menganggap bahwa yang

dibutuhkan masyarakat miskin adalah sumber-sumber material bagi kelangsungan hidup penduduk miskin. Anggapan tersebut, tidak selamanya benar, karena toh dalam kondisi tertentu, masyarakat desa yang miskin dapat keluar dari persoalan kemiskinan tanpa bantuan material pemerintah. Inisiatif dan kreativitas mereka dapat menjadi modal yang berharga untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Otonomi desa merupakan ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk mengelola inisiatif dan kreativitas mereka dengan baik, menjadi sumber daya yang melimpah untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Kebijakan dan program yang bisa dilakukan untuk penguatan otonomi desa adalah;

a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia desa melalui pendidikan formal dan nonformal;
b. Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber biaya pembangunan desa dengan alokasi anggaran yang jelas dari pusat, provinsi dan kabupaten;
c. Menata lembaga pemerintahan desa yang lebih efektif dan demokratis;
d. Membangun sistem regulasi (PERDes) yang jelas dan tegas;
e. Mewujudkan otonomi desa untuk memberikan ruang partisipasi dan kreativitas masyarakat;
f. Mengurangi praktek korupsi di birokrasi pemerintah desa melalui penerapan tatanan pemerintahan yang baik;
g. Menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa;
h. Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan publik;
i. Memberikan ruang yang cukup luas bagi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Bagian Kedelapan

STUDI KASUS: POTRET KEMISKINAN PEDESAAN PADA KEHIDUPAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DI GORONTALO)

Pendahuluan

Berbagai suku bangsa dan golongan, baik penduduk asli maupun yang berasal dari negara disekitar Indonesia yang datang sejak ratusan tahun yang lalu. Diantara suku-suku bangsa tersebut terdapat suku-suku yang telah mengalami kemajuan di bidang sosial, ekonomi dan budaya dan tinggal di daerah-daerah yang maju dan akses yang relatif lebih baik. Namun demikian masih banyak suku yang belum mengalami kemajuan mereka masih tertinggal dalam berbagai aspek dalam kehidupannya seperti di bidang sosial, ekonomi dan budaya bahkan dalam bidang politik. Suku-suku ini tinggal di pedalaman maupun di wilayah perhutanan yang belum tersentuh oleh proses pembangunan baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan non fisk. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya aksebilitas masyarakat keluar dari komunitasnya dalam melakukan istreraksi dengan masyarakat luar.

Keragaman dan kemajemukan suku tersebut telah memperkaya budaya bangsa Indonesia dan merupakan potensi yang luar biasa untuk

ketahanan bangsa. Namun dilain pihak, keragaman suku dan budaya ini apabila tidak dikelola secara arif dan bijaksana akan menjadi bibit perpecahan di antara suku-suku tersebut yang pada akhirnya akan berdampak pada disintegrasi sebuah bangsa[15].

Keberadaan suku-suku tertentu yang relatif tertinggal, terpencil dan terasing belum banyak tersentuh oleh proses pembangunan termasuk komunitas adat Terpencil (KAT), yang banyak terpencar dilereng-lereng gunung maupun di rawa-rawa. Kehidupan tersebut mereka jalani secara turun temurun dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan serta masih melestarikan kearifan lokal yang mereka junjung tinggi dalam kehiduapan masyakatnya. Dari berbagai pandangan baik secara teori maupun empirik masalah "Komunitas Adat Terpencil" (KAT) adalah sebuah respons terhadap kritik-kritik yang tidak menyetujui penggunaan sebuah istilah masyarakat "terasing". Dalam konsep Komunitas Adat Terpencil (KAT) kategori-kategori sosial yang mencakup komuniti-komuniti dengan pola hidup berkelana, setengah berkelana menetap sementara dan menetap (Bulletin 2002)[16]

Karakteristik masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat yang termasuk dalam "Komunitas Adat Terpencil" (KAT) tersebut memiliki kesamaan ciri-ciri dan karakteristiknya

[15] Wiranto Tatag dkk, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Kajian Perbandingan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengembangan Wilayah Terpadu. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.Bappenas, Jakarta, 2004, hal.1

[16] Lihat juga Jurnal Sistem Informasi Komunitas Adat Terpencil ISSN.1412-4270 Edisi tahun 2006 yang diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI Tahun diantaranya membahas bahwa Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki karakteristik atau ciri-ciri antara lain jumlah komunitas yang kecil, sulit terjangkau oleh hubungan antar personal bersifat homogen dalam satu suku, 2006 . hal 5

antara lain: *pertama*; mereka hidup dan bemukim pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau (terpencil, terpencar, dan berpindah-pindah). *kedua*; taraf kesejahteraan ekonominya masih sangat rendah; dan *ketiga*; tertinggal dari berbagai aspek kehidupan dan kemajuan masyarakat saat ini yang sudah banyak bersentuhan dengan perkembangan dari suatu wilayah**.**

Indikator yang dapat dilihat pada masyarakat tersebut adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan ekonomi, kemiskinan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, miskin pendidikan dan ilmu Pengetahuan, miskin dari pelayanan sosial dasar. Kondisi ini membuat adanya kesenjangan sosial mereka yang amat jauh terpisah dari kondisi sosial masyarakat, baik masyarakat desa maupun yang tinggal di daerah perkotaan.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2009, jumlah populasi warga Komunitas Adat Terpencil sebanyak 2.505 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar pada Kabupaten Boalemo, Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango. Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), diantaranya tinggal dan bermukim di hutan-hutan serta lereng-lereng gunung, di rawa-rawa, di pinggir-pinggir atau dipesisir-pesisir pantai yang kesemuanya hidup berkelompok-kelompok antara 5 s/d 6 rumah[17]

Dari hasil pemetaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tinggal lokasi Buluo Desa Pagahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dan lokasi Pualam Desa Bintana Kecamatan Atinggola

[17] Laporan Hasil Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Dalam Rangka Pemutahkiran Data Komunitas Adat Terpencil Tingkat Nasional. Dikeluarkan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemetrian Sosial RI , 2011 hal.119

Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo kurang melakukan kontak sosial dengan masyarakat luar, kurangnya wadah atau sarana seperti faktor komunkasi, tranfortasi serta perhubungan (jalan) antara calon lokasi dengan pusat desa, sehingga masyarakatnya tidak banyak dinamika masyarakat maupun wilayah sekitarnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di sisi lain dengan adanya keterbatasan komunitas dalam melakukan kontak sosial dengan masayarakat luar komunitasnya sangat menghambat pola kehidupannya misalnya masyarakatnya pasrah dengan kenyataan yang ada sehingga tidak memikirkan bagaimana masa depannya terutama masa depan anak-anaknya. Di lain pihak dengan derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, semakin membuat masyarakat terpencil menjadi semakin tertinggal bahkan termarginalkan/terpinggirkan. Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sangat memerlukan usaha bersama antara masyarakat sekitar dengan warga binaan, sebab dalam kehidupan masyarakat yang demikian ini telah tercipta serta tertanan nilia-nilai budaya yang sulit untuk ditinggalkan, sehingga perlu untuk menemukan suatu format guna memberdayakan pola kehidupan masyarakatnya dengan tetap tidak meninggalkan budaya yang telah mereka miliki sejak turun temurun.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI, membuat program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dengan harapan program tersebut dapat membantu maupun merubah pola hidup masyarakat yang memiliki tempat tinggal di daerah-daerah pegunungan, rawa-rawa maupun pesisir-pesisir pantai.

Adapun tujuan utama program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) adalah bagaimana

memberdayakan segala aspek tatanan kehidupan dan penghidupan agar Komunitas Adat Terpencil atau warga dapat hidup secara wajar, baik aspek jasmani, aspek rohani dan sosial sehingga warga dapat berperan aktif dalam persoalan pembangunan untuk kepentingan masyarakat/ warga secara umum.

Dalam Buku Pedoman Teknis (Juknis) Pemberdayaan yang dikeluarkan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dijelaskan stretegi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil PKAT) yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung Komunitas Adat Terpencil untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan terhadap adaptasi terhadap perubahan lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan perubahan politik. Untuk menemukan masalah-masalah yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam memberdayakan komunitas adat terpencil (KAT), maka sangat perlu dilakukan sebuah kajian melalui studi kelayakan. Hal ini dimaksudkan agar dalam memberdayakan masyarakat terpencil benar-benar berguna serta bermakna dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan jumlah populasi masyarakat atau warga yang akan dibina melalui kegiatan Pogram Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2019 sebanyak 46 Kepala Keluarga (KK) mengambil calon Lokasi Bulou Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, 50 Kepala keluarga (KK) calon lokasi Pualan Desa Bintana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Komunitas yang tinggal pada beberapa calon lokasi yang akan diberdayakan tersebut pada umumnya banyak bermukim di lereng-lereng gunung bahkan sebahagian di atas gunung yang sulit dijangkau oleh arus transfortasi dan komunikasi.

Proses Pengkajian Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan studi etnografi dimaksudkan untuk menemukan berbagai masalah sosial budaya dan

bertujuan mendapatkan bahan-bahan informasi akurat untuk dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan bagi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di masing-masing lokasi. Dari kajian maupun kelayakan diharapkan perencanaan selanjutnya dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan berbagai permasalahan yang dihadapi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di wilayah masing-masing. Perlu dikemukakan bahwa sebagai suatu masyarakat, maka keberadaan warga Komunitas Adat Terpencil di Gorontalo hidup dan menetap dilereng-lereng gunung dengan tempat tinggal seadanya, komunitas tersebut tetap memiliki kebudayaan seperti sistem nilai, norma-norma, kebiasaan dan adat-istiadat yang dianut, dipercaya, dan dihargai, dijunjung tinggi sebagai suatu kebiasaan maupun tatanan yang harus di pedomani dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sangat dibutuhkan suatu pemahaman secara benar terhadap kebudayaan komunitasnya, sebab dengan pemahaman tersebut menjadi salah satu pendekatan yang strategis dan tepat untuk mempermudah terjadinya interaksi sosial dalam rangka mengadakan perubahan-perubahan sikap mental terutama dalam kaitannya dengan program pemberdayaan yang dilakukan melalui sentuhan-sentuhan pembangunan secara konkret, baik pembangunan fisik maupun nonfisik.

Studi kelayakan yang dilakukan terhadap warga KAT adalah untuk menjaring informasi aktual yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di kedua wilayah kajian tersebut, baik pada tahap pelaksanaan pembangunan fisiknya maupun pada tahap pembinaan selanjutnya. Oleh karena itu hasil pengkajian yang dilakukan oleh tim peneliti menjadi sebuah dasar untuk menetapkan suatu lokasi tertentu apakah lokasi tersebut cukup layak atau tidak layak untuk dijadikan calon lokasi permukiman dan pengembangan masyarakat

ke depan sesuai dengan jenis profesi, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan mata pencaharian, karakterisik masing-masing kelompok Komumintas Adat Terpencil. Untuk menjamin suatu kelayakan suatu lokasi permukiman terhadap warga KAT, maka ada beberapa pertanyaan pokok tentang kondisi geografis yang perlu menjadi perhatian dalam studi kelayakan ini, antara lain: *Pertama;* apakah calon lokasi tersebut dapat dijadikan sebagai tempat atau sarana penyediaan sumber makanan bagi masyarakat yang dapat dipertahankan secara turun temurun;

Kedua; apakah calon lokasi merupakan tempat tinggal yang aman dari berbagai ancaman bencana alam seperti banjir, gelombang laut (untuk mereka yang tinggal dipingggiran pantai), longsor (bagi mereka yang tinggal dilereng-lereng gunung), dan aman pula untuk mengembangkan keturunan serta mengaktualisasikan diri; *Ketiga;* apakah calon lokasi itu dapat diwujudkan sebagai media sosial guna mengembangkan kesetiakawanan kelompok sosial serta interaksi antara komunitas yang bersangkutan. *Keempat;* apakah calon lokasi itu dapat dikembangkan untuk membangun sarana dan prasarana dasar agar warga Komunitas Adat Terpencil perlahan-lahan dapat mengembangkan sistem jaringan sosial yang lebih luas.

Dilain pihak hasil studi kelayakan di arahkan untuk mendorong, memfasilitasi, mengakomodasi sebuah proses integrasi kelompok-kelompok komunitas dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Melalui sistem lokalitas yang dirancang untuk mengembangkan jaringan hubungan sosial dan budaya yang saling menguntungkan dan harmonis antara kehidpan kelompok komunitas adat terpenil yang ada di wilayah studi dengan kelompok masyarakat lain, sehingga warga memiliki akses yang sama dengan masyarakat lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Konsep Dasar

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), secara konseptual berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. (Suharto, 2006)

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah dan tidak memiliki akses sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam berbagai dimensi kehidupannya. Suharto (2006) melihat dimensi-dimensi tersebut adalah *pertama;* memenuhi kebutuhan bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; *keduia;* menyangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatanya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan *ketiga;* berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang berlangsung dalam tananan kehidupannya serta dapat mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya me-wujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga

tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan serta suatu tuntutan-tuntutan keadilan dalam kehidupannya.

Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap proses pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan ekonomi. Konsep ini yang mencerminkan paradigma baru pem-bangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, dalam Kartasasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu.

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Brown (dalam Suharto, 1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai "*incompatible or antithetical*". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game*" dan "*trade off*". Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa sebuah pemerataan akan tercipta artau terpola landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, dalam Surato 1995). Hal terakhir ini besar artinya bagi negaranegaraberkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neracapembayarannya.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: *Pertama;* bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; *kedua;* pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran;

Ketiga kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan *keempat* pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masya-rakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Prijono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk mem-bebaskan masyarakat situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*). Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidak seimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power.

Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah.

Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. *Kedua*, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan (Suharto, 2006)

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pekerjaan memberdayakan adalah memampukan serta memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemam-puan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan dan pembangunan harus dapat ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasamenyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masya-rakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan

membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memung-kinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dari kerangka pikir tersebut titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1996).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modernseperti kerja keras, hemat, keterbukaan, keber-tanggungjawaban dan lain-lain yangmerupakan bagian pokok dari upaya

pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam studi ini adalah pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikankontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah.

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyata-kan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian
2) Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan

keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

3) Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri mapun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha.
5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya, sebab hal ini menjadi sebuah ukuran dari proses sebuah pemberdayaan.

Secara umum konsep pemberdayaan warga dalam hal ini adalah suatu upaya konkret untuk memberikan dasar-dasar pembinaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bagi kelompok Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang selama ini terabaikan dari perhatian pemerintah. Perubahan dari cara-cara hidup kebiasaan-kebiasaan lama yang ternyata menghambat kemajuan di berbagai bidang kehidupan mereka kepada pola-pola hidup yang baru sesuai dengan sikap dan mentalitas pembangunan yang diharapkan dewasa ini, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai lokal yang komunitas Adat Terpencil miliki.

Mengacu pada hakekat sebuah pemberdayaan dan pembangunan Komunitas Adat Terpencil (KAT), maka pendekatan-pendekatan konsep yang perlu dikembangkan dalam pengkajian ini lebih dititik beratkan pada pendekatan sosial, ekonomi, politik, dan pendekatan budaya lokal yang dimiliki warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Selain dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam rangka memberdayakan Komunitas, maka pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk membentuk kembali kelompok-kelompok *(regrouping)* masyarakat yang hidup teratur dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaa yang tentram dan damai berdasarkan norma-norma, adat-istiadat lokal yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan Negara serta peraturan-peraturan pemerintah daerah yang berlaku.

Pemberdayaan dalam bidang ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan prasarana dan sarana ekonomi yang dapat merangsang tumbuhnya usaha-usaha

komersial di kalangan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar mereka semakin berdaya untuk hidup mandiri, tanpa harus menggantungkan kebutuhan hidup kepada pihak lain termasuk kepada pemerintah dan pihak-pihak lain yang justeru senantiasa mengeksploitasi tenaga kerja mereka.

Di bidang politik, pemberdayaan dimaksudkan agar warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) diberi pencerahan dan pemahaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek terpenting dalam upaya pencerahan bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) tersebut adalah "kesadaran berbangsa dan bernegara". Sebagai masyarakat dan sebagai warga Negara.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) perlu diberdayakan agar mereka sadar bahwa eksistensinya sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Sebagai warga Negara warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki hak-hak yang sama, baik hak-hak politik maupun hak dalam memperoleh berbagai pelayanan sosial dari pemerintah atau Negara. Oleh sebab itu warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) harus diterima dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara pada umumnya.

Dalam bidang kebudayaan, salah satu program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan tradisonal (asli) yang hidup dan dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat atau warga adat lokal. Oleh karena itu dengan program pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), diharapkan kebudayaan dan kearifan lingkungan yang dianut oleh masyarakat lokal dapat digali, dikembangkan dan dipelihara kelestariannya sehingga mampu menjadi asset yang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan pada umumnya. Selain itu pula kebudayaan maupun adat istiadat yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki dan

dilesaikan masyarakat lokal menjadi salah satu pilar utama dalam menyeleksi dan menyaring budaya-budaya dari luar warga Komunitas Adat Terpencil.(KAT)

Keempat konsep pendekatan tersebut di atas, kajian ini diakukan oleh Tim Pokja Komunitas Adat Terpencil (KAT) Provinsi Gorontalo dengan mengkaitkannya dengan aspek ketersediaan sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya manusia dari warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada sebagai sasaran program.pemberdayaan

Proses pencapaian tujuan pemberdayaan tersebut di atas, maka proses pembangunan yang akan dilaksanakan hendaknya memperhatikan kondisi komunitas lokal, agar pencapaian target pembangunan dapat dilanjutkan oleh masyarakat lokal. pembangunan seperti pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) harus dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada tiga konsep pembangunan berkelanjutan yakni:

1. Strategi pembangunan yang berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia; yakni sumberdaya manusia maupun sumberdaya alamnya;
2. Strategi yang menempatkan pembangunan itu sebagai proses dari upaya pemanfaatan dan pelestarian lingkungan; dan
3. Strategi yang menempatkan obyek pembangunan sesuai dengan kondisi budaya dan lingkungan alamnya.

Pembangunan yang berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia, akan banyak memberikan kemudahan dalam usaha pelaksanaannya terutama dalam suatu proses manajemen sumberdaya yang merupakan interaksi dari proses konsolidasi, pembangunan, dan penggunaan sumberdaya. Pembangunan sebagai upaya pelestarian alam dan lingkungan pada dasarnya adalah dua hal yang komplementer. Artinya, pembangunan itu berlangsung secara simultan, di satu sisi pembangunan

secara fisik akan memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya alam (SDA) serta ekosistem, dan pada saat yang bersamaan pula,

Di sini perlu ada manajemen yang tepat terhadap proses pembangunan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelangsungan proses hidup dari wilayah yang bersangkutan. Manajemen sumberdaya ini antara lain mensyaratkan adanya penggunaan sumberdaya secara bijaksana dan tidak hanya bersifat eksploratif. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan nilai dari berbagai sumberdaya yang dimiliki. Demikian juga pelestarian pada dasarnya adalah suatu bentuk tindakan manajemen sumberdaya untuk menjaga keberadaan dan kelangsungan hidup bagi sumberdaya tersebut.

Di sisi lain, perubahan serta pengembangan adalah wajar dan seringkali justru berdampak positif. Oleh karena itu proses perubahan dan modernisasi bukanlah suatu hal yang harus ditolak, karena perubahan dan pengembangan tersebut layak untuk dipertimbangkan. Proses modernisasi masyarakat tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana modernisasi dalam lebih berdampak pada proses perkembangan masyarakat.

Pendekatan pembangunan yang menselaraskan dengan berbagai kondisi budaya, adalah merupakan salah satu bentuk pembangunan aset sumberdaya budaya, dan aset ini tidak hanya bermanfaat sebagai suatu warisan budaya semata, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai aset suatu daerah untuk dikembangkan sehingga dapat mendukung pembngunan di bidan pariwisata misalnya, memberi manfaat ekonomis tinggi.

Secara teoritis, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagagasn tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia melalui proses belajar (sosialisasi). Krober

(1958) memendang bahwa wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide, tangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola, dengan pengertian lain kebudayaan sebagai proses terpadiu dari tiga gejala kebudayaan yaitu (1) *ideas,* (2) *activities* dan (3) *artifacs.*

Koentjaraningrat (1980) mengemukakan bahwa ketiga gejala kebudayaan itu disebut wujud kebudayaan yaitu: (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, perarutan-peraturan dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola manusia serta (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan yang pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak, ide-ide, nilai-nilai, norma-norma yang berkaitan erat dengan sistem sosial *(cultur system).*

Wujud budaya inilah yang dikenal dengan istilah adat atau istiadat dalam bentuk jamaknya. Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial (*social system*) yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, hubungan atau bergaul yang dilakukan menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat dan tata kelakuan dan yang wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik yakni seluruh hasil aktivitas, perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat yang sifatnya konkrit.

Ketiga wujud dari kebudayaan seperti yang dikemukakan di atas, merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu wujud kebudayaan dengan wujud kebudayaan lainnya. Kebudayaan ideal atau adat istiadat seperti ide, nilai, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, norma-norma dan peraturan-peraturan atau hukum yang berfungsi mengatur dan menghasilkan benda-benda yang berhubungan dengan kebudayaan fisiknya.

Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang menjauhkan manusia dari

lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya bahkan juga cara berpikirnya dalam kehidupannya sehari-hari.

Pemberdayaan KAT : Dalam Perspektif Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam dekade belakangan ini sngat banyak diperbincangkan. Perbincangan tersebut sering dikaitkan dengan masyarakat lokal dengan pengertian bervariasi sesuai dengan kearifan lokal pada masing-masing wilayah yang menjadi tradisi masyarakat secara turun temurun oleh adat diberbagai kehidupan masyarakat, sebab nilai-nilai lokal tersebut merupakan jati diri suatu wilayah/komunitas yang bersumber pada nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai peninggalan, nilai-nilai kebiasaan dalam masyarakat yang dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sony Keraf (2002) kearifan tradisional (lokal) merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika manusia yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi kearifan tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan, alam, dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan manusia, alam dan bagaimana relasi diantara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun

Sementara itu, Francis Wahono (2005) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang menjadi pedoman manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh

dengan dinamika pembangunan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan dalam kehidupan komunitas adat terpencil.

Secara faktual masalah pembangunan terutama pembangunan yang berkelanjutan lebih banyak menitikberatkan pada pada proses serta akibat dari setiap kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat terus menerus kepada umat manusia dengan meminimalkan kerugian yang dialami manusia dengan sumber daya alam dan lingkungan secara keseluruhan. Emil Salim (dalam Brata, 1992) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dam sumberdaya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Triarti (2003)[18] Kata menyerasikan disini berpusat pada kesadaran manusia untuk menciptakan keseimbangan dalam interaksi manusia dengan alam, sehingga keduanya akan memiliki ketahanan hidup dalam jangka panjang.

Dalam realitas empirik bahwa kegagalan pembangunan pada umumnya khususnya pembangunan di wilayah daerah-daerah terpencil, antara lain ditandai dengan timbulnya stagnasi ketahanan sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pula peran kekuatan sosial dalam pembangunan sangat lemah, tetapi disisi lain banhwa kekuatan pembangunan terssebut sangat diperlukan. Oleh karena itu pembangunan menurut Korten & Syahrir (1998)[19] harus dipusatkan pada kekuatan rakyat (*people centered development*). Diantara aspek penting dalam mewujudkan pemberdayaan maupun pembangunan berpusat pada rakyat yakni bagaimana penciptaan partisipasi masyarakat dalam segala aspek-aspeknya, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan

[18] Endah Triarti, 2003,Sasi Bentuk Kearifan Lokal Komunitas Adat Terpencil di Maluku, Jurnal Sikat, Edisi II Tahun 2003, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil, Departemen Sosial RI, 2003, jakarta.

[19] Korten, D.C & Syahrir (ed), 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

lokal mereka, seperti pada warga KAT di desa Pangahu, Gorontalo.

Masyatakat Gorontalo terutama yang tinggal di daerah pedesaan, pada warga KAT Pangahu mengenal istilah *"Panggoba"* (yaitu keyakinan yang digunakan dalam hal menentukan hari-hari baik dalam hal menanam) serta kearifan lokal dengan istilah *"Lowanga"* (larangan dalam mengerjakan sesuatu pada hari maupun jam tertentu)[20]. Kedua kearifan lokal ini menjadi sebuah modal kepercayaan yang secara turun temurun dipegang bahkan dipercayai oleh masyarakat Gorontalo, terutama bagi mereka yang bermukim di wilayah terpencil. "Panggoba" merupakan lebih banyak dipercayai petani di desa dalam pemilihan hari-hari menanam. Hal ini sebagaimana diutakan oleh DA (58 tahun) warga KAT Pangahu, *"panggoba debo donggo hepomake laamiyatiya teye, sababu uyiti botiye heepilomake mai lomonggopangggola umomenngi"*. Kearifan lokal ini lebih masih digunakan atau dipertahankan warga KAT Pangahu, dalam bidang pertanian, dan hal ini panggoba tersebut digunakan oleh orang tua mereka sewaktu bertani, misalnya dalam memilih hari maupun jam-jam menanam. Pemanfaatan "panggoba" tersebut dilihat dari munculnya bintang dilangit, misalnya kemunculan bintang dilangit yang berdekatan lima sampai delapan bintang itu dipuutuskan besoknya dapat menanam jagung atau tanaman lainnya. Makna dari banyaknya bintang di langit tersebut di sebut oleh mereka dengan istilah "*Taadaata*" bintang yang banyak dan itu menunjukan tanaman tersebut akan berhasil dengan baik.

Selanjutnya bentuk kearifan lokal *"Lowanga"*, bagi warga KAT Pangahu, Asparaga, Gorontalo, dalam menggunakan simbol ini, yakni pada saat membangun rumah *"Momayango"*, dalam hal membangun rumah, warga

[20] Wawancara dengan RD (tokoh masyarakat yang lebih banyak berhubungan dengan masalah pertanian) 18 Desember, 2014. *"Panggoba"* lebih banyak digunakan petani dalam hal pertanian, sedangkan *"Lowanga"* lebih banyak masyarakat gunakan untuk kepentingan apa saja seperti mau membeli sesuatu barang, seperti sepedesa motor dan lain sebagainya.

memperhatikan hari-hari tertentu, misalnya hari Jum'at dengan harapan rumah tersebut tidak membawa malapetaka, misalnya begitu membangun jatuh dan sebagainya. Oleh karena itu bagi warga komunitas Pangahu sangat mempercayai budaya ini dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya sehari-hari.

Dari uraian tentang kearifan lokal bagi waga komunitas Pangahu tersebut terlihat betapa pentingnya untuk diperhatikan dan dilestarikan, sebab hal itu menjadi modal sosial dari warga untuk mempertahankan nilai-nilai sosial maupun kultural dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu bagi siapa saja baik itu pemerintah, swasta maupun elemen-elemen yang ingin memberdayakan KAT Pangahu, Asparaga, Kabupaten Gorontalo, sangat penting untuk memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal mereka, hal ini dimaksudkan agar pemberdayaannya tidak akan mencabut nilai-nilai sosial dan budaya yang telah mereka miliki secara turun temurun.

Bertahan Hidup: di Tengah Keterbelakangan dan Kerterpinggiran

Komunitas Adat Terpencil di Desa Pangahu, Asparaga, Gorontalo sebagai suatu kelompok komunitas yang tentunya memiliki berbagai macam pranata yang mengatur seluruh roda kehidupannya. Komunitas yang bermukim hutan-hutan, serta dilereng-lereng gunung memandang tanah dan lahan bagi mereka merupakan sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupannya. Dalam pandangan warga KAT di desa Pangahu, lahan pertanian sebagai modal untuk keberlangsungan hidup, dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama sehingga dapat di wariskan ke generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketergantungan yang besar terhadap keberadaan lahan atau tanah, baik dari aspek fungsi sosial maupun ekonomi. Hal ini seperti yang dituturkan DP (48 tahun) warga KAT yang tinggal di dusun Tonala antara lain "*Botiye huta heilengiyo lamiyatiya paralu daa dahaalo ju, sababu boilengi botiye*

uheputumula lamiyatiya ngokeluarga lomaoo". Lahan pertanian bagi warga KAT sangat mereka jaga dengan baik sebab, dengan lahan pertanian dalam menunjang kehidupan keluarga sehari-hari.

Secara teoritik dalam melihat serta memandang dan melakukan analisis pola maupun potret masyarakat pedesaan takterkecuali komunitas adat terpencil di desa Pangahu, maka ada dua arus pemikiran yang mengundang perdebatan di kalangan para ahli perihal tentang dampak pergeseran dalam tatanan kehidupannya. (1) Pemikiran pertama penelitian Geertz (1983)[21] tentang kemiskinan berbagi (*Shaer property*) dan involusi pertanian. Hasil Penelitian Geertz dikukuhkan dengan penelitian yang hampir sama atau sejenis dengan penelitian oleh ekonom pedesaan dari Jepang Hayami dan Kikuchi (1981)[22]. Berdasarkan pemikirannya bahwa masuknya modal menyebabkan berubahnya stratifikasi sosial masyarakat pedesaan. Akan Tetapi perubahan ini tidak membawa rusaknya homogenitas masyarakat desa. Dari kajiannya menemukan bahwa polarisasi sosial di pedesaan tidak terjadi karena adanya ikatan-ikatan tradisional masyarakat desa yang masih kuat terjalin. (2) Arus pemikiran ke dua adalah yang dikemukakan Coller dkk (1996)[23] bahwa; perubahan stratifikasi sebagai akibat pembangunan di pedesaan itu cenderung mengarah kepada polarisasi sosial yang ditandai dengan timpangnya tingkat kesejahteraan ekonomi dan penguasaan aset masyarakat.

---

[21] Cliffort Geerts, *Influsi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonedia*, Brhatara Jakarta,1983, menjelaskan munculnya kemiskinan berbagi dalam involusi sebagai akibat tekanan penduduk dan perubahan lingkungan desa.

[22] Hal yang sama Yusihiro Hayami dan Masao Kikkuchi, dalam karyanya *Asian Village Economy at the Crossroads: An Economic Approach ti Institutional Change*. Zahara (Penterjemah) Dilema Ekonomi desa; Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1981.

[23] Coller,et,el, Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa. Chalia Indonesia, Jakarta 1996.

Hasil kajian ini penulis melihat adanya benang merah yang mungkin tanpa tersambungkan dari dua arus pemikiran; yaitu terlepas apakah komunitas adat terpencil Pangahu bila dikemudian hari akan diberdayakan, bila mereka akan dipindahkan ketempat yang lebih jauh dari pemukiman awal, maka besar kemungkinan akan terjadi pergeseran nilai-nilai kultural, sosial maupun budaya yang mereka miliki, dan bila pemukiman yang mereka tempati tetap berada dalam posisi tempat awal, maka kecil kemungkinan terjadi perubahan dalam tatanan kehidupannya sehari-hari.

Dilain sisi kehidupan komunitas di desa Pangahu tidak melakukan migrasi dan perpindahan, ketika mereka tetap miskin dalam situasi tertinggal, mereka tetap terikat oleh ikatan kekerabatan dan emosional antara patron dan kliennya yang membuat hidup mereka tenang dan bebas dari kelaparan. Justru bila mereka melakukan perpindahan ke luar desa sumber daya mereka tidak siap dan akan terancam oleh ketidakpastian dan hidupnya sehari-hari.

Upaya untuk bertahan hidup bagi komunitas adat terpencil Pangahu walaupun tidak memiliki apa-apa, di dorong oleh adannya (1) sistem kekerabatan yang masih melekat dan kuat dalam dinamika kehidupannya, terlebih-lebih bagi petani masih mengenal sistem *"ungalaa"* di mana pemukiman mereka dalam satu komunitas atau satu wilayah dan diataranya masih memiliki ikatan kekeluargaan yang secara turun pemurun mereka pelihara, (2) Bila mereka melakukan migrasi atau pindah ke tempat lain, komunitas tersebut tidak siap sumber dayanya karena di liputi oleh ketidak pastian dalam kehidupannya terlebih-lebih dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari (3) sulit untuk meninggalkan tempat tinggal atau pemukiman sebab rumah walaupun hanya seadanya yang mereka tempati dan lahan yang mereka oleh merupakan lahan orang tua yang secara turun temurun terlebih-lebih bila orang tua mewasiatkan bahwa lahan pertanian dijaga, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan (4) Penderitaan atau kemiskiman menjadi tanggung jawab dan mereka rasakan

bersama yang penting mereka masih hidup bersama dan melakukan interaksi sosial di antara sesamanya.

Pola Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Desa Pagahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo (Sebuah Contoh Kasus)

Desa Pangahu Kecamatan Asparga Kabupaten Gorontalo secara geografis terletak sebagian dataran rendah dan sebagian berdekatan dengan pegunungan. Jarak antara desa atau jarak tempuh antara dusun dan desa antara desa ke kecamatan yaitu antara dusun memiliki jarak antara 3 km dan antara desa ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 12 km dan jarah dari desa ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 50 km, dan jarak dari desa atau dari lokasi warga Komunitas Adat Terpencil ke Ibu kota Provinsi sekitar 200 km. Batas wilayah sangat menentukan tingkat keamanan dan solidaritas sesama warga, sebab suatu wilayah tidak memiliki batas-batas desa yang jelas, besar kemungkinan akan terjadi rawan konlik atau Berdasarkan data yang tim studi kelayakan peroleh sesama warga.

Berdasarkan data sekunder bahwa Desa Pangahu Kecamatan Asparaga memiliki penduduk 286 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk sebanyak 1120 Jiwa dengan perincian masing-masing 570 Jiwa laki-laki dan 550 jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 20 per kepala Keluarga (KK) perkm. Khusus untuk lokasi Komunitas Adat Terpencil di desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo terdapat didusun Buluo yang memiliki jarak tempuh 3 km di atas ketinggian gunung kurang lebih 90^0. Komunitas yang tinggal di lokasi sebanyak 23 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 76 jiwa. Sedangkan 22 Kepala Keluarga (KK) terdapat di Dusun Tomala (dusun yang berada di kaki gung Nantu) sebanyak 17 Kepala keluarga,(KK) dengan julah jumlah 39 jiwa 5 Kepala Keluarga (KK) dengan

julah jiwa 22 jiwa terdapat didusun Dianga, sedangkan 5 Kepala keluarga (KK) terdapat di dusun Alawahu (sebuah dusun yang berdekatan dengan hutan nantu dan sebahagian hutan lindung)

Mata pencaharian utama dari penduduk Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo sebagian besar bergerak dibidang pertanian atau sebagai petani jagung. (areal perkebunan jagung diolah secara manual tidak dibajak melainkan dijangkul, sebab areal pertaniannya berbukit dan bergunung-gunung). Selain bermata pencaharian sebagai petani ada pula sebagian kecil sebagai tukang.

Tanaman yang menjadi unggulan masyarakat terutama warga Koumitas Adat Terpencil (KAT) adalah tanaman jagung dan sebagian menanam tanaman tahunan seperti kelapa. Pengolahan lahan pertanian misalnya dalam hal menanam jagung masih dilakukan secara tradisional misalnya dalam hal membersihkan lahan warga menggunakan cangkul atau *Popati* dan pula yang menggunakan parang. (Wamilo)[24] sebagai salah satu alat yang dijadikan kominitas untuk melakukan dalam kegiatan pertanian. Selain jagung yang menjadi unggulan warga ada pula yang menanam pisang, cabe dan tomat serta Kelapa. Khusus untuk tanaman cabe pada umumnya warga komunitas adat menjual hasilnya ke pasar tradsional di pusat desa. Akan tetapi untuk tanaman kelapa dan coklat belum menjadi sebuah tanaman unggulan bagi warga Komunitas Adat Terpencil, hal ini didasarkan pada kesulitas warga untuk memasarkannya dan untuk dengan cepat mendatangkan hasil.

[24] Parang *(Waamilo)* terbuat dari besi yang dibuat oleh pandai besi di desa (orang Gorontalo mengenal istilah pandai besi dengan istilah *podudupa)* parang tersebut dibuat sepanjang 40-60 cm berdasarkan kebutuhan penggunaannya biasanya bila parang memiliki panjang 60 cm (*saabele*) digunakan petani untuk pekerjaan penebangan kayu (perkebunan yang dipenuhi semak-semak atau dikenal dengan instilah *motiboto atau polibootiyo*)

Gambar 1 Bentuk parang (wamilo) sebagaimana terpancang di dinding rumah warga KAT (Dokumen Studi Kelayakan Akhir Maret 2018)

Tanaman jagung sebagai ungggulan penghasilan bagi masyarakat atau warga komunitas Adat Terpencil (KAT), alasan warga lebih banyak mimilih atau menanam jagung, disebabkan oleh beberapa hal seperti (1) adanya struktur tanah di atas kemiringan 90^{o}, paling baik untuk ditanami jagung (2) Bibit jagung mudah diperoleh dimana-mana dan harganya masih terjangkau oleh petani dan pemerintah juga banyak memberikan bantuan bibit; (3) tanaman tersebut mudah untuk dipasarkan walaupun belum cukup umur. (4) bagi warga atau petani di Gorontalo pada umumnya khususnya warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) betani jagung sudah menjadi kebiasaan petani di Gorontalo secara turun temurun. Dan yang (5) Selain itu jagung juga dapat digunakan sebagai makanan pokok Petani Gorontalo terutama warga Komunitas Adat terpencil (KAT). Jagung diolah menjadi makanan pokok pada setiap hari bagi warga Komunitas Adat Terpencil pada khususnya dan pada umumnya warga masyarakat pedesaan yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Jagung lebih

banyak diolah melalui gilingan secara manuaal. Orang Gorontalo mengenal dengan istilah "*Illa baaloobinte*"[25].

Gambar 2. Makanan (nasi) dari Jagung atau nasi jagung atau "*illa baalobinte"*, sebagai makanan pokok atau utama bagi warga Komunitas Adat Terpencil di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo (Dokumen Studi Kelayakan Akhir Maret 2018).

Kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah sangat menentukan tingkat kesejahteraanya, sebab bila kondisi ekonomi tidak mendukung, maka daerah tersebut akan mengalami ketertinggalan. Maupun keterbelakangan terutama bagi masyarakat yang tinggal dipedesaan yang jauh dari perkembangan maupun perubahan

Dari hasil penelitian calon lokasi (di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga) secara umum ditemukan bahwa kondisi sosial ekonomi terutama dalam bekerja

[25] Proses pengolahannya melalui sistem giling, jagung terlebih dahulu dikeringkan dan jagung yang digiling adalah tanaman jagung yang sudah cukup umur. Bagi orang Gorontalo kurang lebih 40 tahun yang lalu Proses mengolah jagung sudah melalui gilingan dengan mesin, tetapi lama laun gilingan tersebut sudah berkurang seiring dengan perkembangan masyarakat , akan tetapi bagi warga Komunitas Adat Terpencil gilingan secara manual tersebut masih tetap dipertahankan.sampai sekarang.

dan berusaha masyarakat di wilayah tersebut tergolong masih sangat sederhana bahkan rengah dengan masyarakat di pusat desa, misalnya; *pertama*: masyarakat belum mengenal sistem perbankan terutama dalam menyimpan, menukar uang dalam hal membangkitkan ekonomi masyarakat. *Kedua:* Proses pertukaran uang serta pemanfaatan uang dilakukan melalui pasar-pasar tradisional yang dilaksanakan di pusat desa seminggu sekali. Pada umumnya mereka belum memiliki rumah permanen, rumah yang dimiliki rumah dibangun dari bambu atau kayu dan beratapkan daun rumbia. Dalam kehidupan Komunitas Adat Terpencil ada tempat berupa rumah gubuk *(woombohe)*[26]*, Gubuk atau wombohe.*

Gambar 3. Bentuk gubuk (Wombohe) yang digunakan petani untuk menjaga lahan pertaniannya pada malam hari (Foto Tim Kelayakan Tahun 2018)

Untuk mencapai desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo tidak ada hambatan,

[26] *Wombohe* sebuah gubuk terbuat dari kayu, ada pula dibuat dari bambu (*Wawohu*) beratapkan daun rumbia., dengan ketinggian antara 1-2 M yang dibuat oleh warga KAT, Bantayo dijadikan sebagai tempat peristirahatan sementara pada saat makan atau pada siang hari, dan paling utama adalah tempat tersebut digunakan untuk mengawasi tanaman seperti jagung pada malam hari dari serangan babi hutan *(boyi)* dan kera (*dihe)* dan binatang-binatang lain pada siang hari

fasilitas jalan dari Ibu Kota Kecamatan Asparaga ke desa Pangahu sudah terjangkau dengan fasilitas kenderaan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Dilain sisi lain jalan merupakan faktor yang sangat menentukan maju tidaknya suatu daerah bahkan suatu desa, karena dengan terbukanya jalan, maka warga dengan mudah untuk menjual hasil-hasil pertanianya baik ke pusat desa maupun ke pusat Kecamatan. Prasarana jalan menunuju lokasi tidak dapat ditempuh atau dilalui dengan kenderaan, melainkan dengan jalan kaki.

Gambar 5. Kondisi jalan menuju Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). (Foto Dokumen Kelayakan Tahun 2014)

Sampai saat ini di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo sudah terdapat sarana pendidikan yakni 1 (satu) buah Sekolah Dasar (SD) No. 15 Asparaga dengan bentuk bangunan permanen dengan kapasitas 6 kelas dan sudah menamatkan. Peserta didik atau murid-murid yang belajar di sekolah melalui pendidikan formal di antaranya adalah anak-anak dari warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang akan diberdayakan.

Walaupun di desa tersebut telah memiliki sebuah Sekolah Dasar, akan tetapi sekolah tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh anak-anak sekitar sekolah, sedangkan untuk warga Komunitas Adat Terpencil lokasi sekolah tersebut memiliki jarak antara 4/5 km. Tamatan sekolah Dasar (SD) sebagian yang mau melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dapat memilih sekolah-sekolah sederajat seperti SMP dan Tsanawiyah yang ada di Kecamatan Asparaga dan lain-lain. Tetapi pada umumnya usia sekolah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat lanjutan yang lebih.

Penduduk Desa Pangahu Desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo seluruhnya adalah pemeluk agama Islam, dan sarana keagamaan yang terdapat di desa ini adalah mesjid sudah beratapkan seng. Sarana peribadatan tersebut hanya terdapat di pusat-pusat desa. Bagi warga Komunitas Adat Terpencil yang ingin melakukan ibadah hanrus menempun jalan kaki antara 5-6 kilometer.

Walaupun masyarakatnya sebagai pemeluk agama Islam akan tetapi masih terdapat warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih memiliki kepercayaan pada hal-hal yang gaib terutama dalam menghadapi sesuatu masalah misalnya sakit dan lain sebagainya. Masyarakat lebih percaya bila ada warga yang sakit perut misalnya anggapannya karena digangung oleh roh-roh halus. sehingga untuk berobat lebih banyak ke dukun kampung dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam sekitarnya.

Sarana kesehatan dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar dalam tatanan kehidupnan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal diperkotaan dan pedesaan bahkan pada wilayah-wilayah Komunitas terpencil. Warga yang bermukim di lokasi Buluo lebih banyak menggunakan air dari sungai maupun

dari sumur tanah untuk kepeluan minum, mandi maupun untuk cuci pakaian.

Pelayanan kesehatan secara medis untuk masyarakat Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo selama ini dapat dikatakan sudah ada pusat Kecamatan maupun dipusat desa. Seperti di Puskesmas dan pasilitas kesehatan lainnya. Bagi warga Komunitas Adat Terpencil masalah kesehatan masih kurang diperhatikan maupun belum banyak yang memanfaatkan pengobatan secara medis misalnya berobat ke mantri kesehatan di kampung. Selain itu warga juga lebih banyak berobat ke dukun kampung. Bagi masyarakat maupun warga Komunitas Adat bila ada yang mengalami sakit mereka lebih banyak menggunakan dukun kampung, dan menggunakan tanaman atau obat-obatan herbal seperti kunyit, jahe, daun balacae, pohon turi (dipergunakan untuk orang panas) akan tetapi ada pula sebagian warga membeli obat di kios-kios rumah penduduk.

Kondisi tanah yang ada di lokasi calon persiapan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang akan diberdayakan di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo lebih banyak tanah kemerah-merahan yang terdapat di wilayah maupun lokasi. Kondisi tanah yang demikian ini lebih banyak di-tanami oleh warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) seperti jagung, cabe dan tomat. Tanah pertanian yang diolah warga untuk tanaman tahunan seperti kelapa dan tanaman yang paling cocok untuk tanah seperti ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi areal budidaya coklat.

Selanjutnya keadaan iklim di desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo sama halnya dengan daerah-daerah lain di Gorontalo yang dipengaruhi oleh iklim tropos dan musiman. Musim kemarau atau musim panan berlangsung bulan Juni sampai dengan

Oktober, sedangkan musim hujan berlaku antara bulan Nopember-sampai dengan bulan Mei.

Gambar 7. Struktur Tanah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lokasi Desa Pagahu Kecamatan Asparaga (Dokumen Studi Kelayakan Akhir Mei 2014)

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Sebuah Contok Kasus Desa Bintana Kecamatan Atinggola KabupatenGorontalo Utara)

Desa Bintana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo secara geografis terletak sebagian dataran rendah atau areal perkebunan dan perladangan dan sebagian berdekatan dengan pegunungan. Jarak antara desa atau jarak tempuh antara dusun dan desa antara desa ke kecamatan yaitu antara dusun memiliki jarak antara 3 km dan antara desa ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 5 km dan jarah dari desa ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 70 km, dam jarak dari desa ke Ibu kota Provinsi sekitar 150 km

Masyarakat Bintana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo memiliki penduduk 484 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk sebanyak 1854 Jiwa dengan perincian masing-masing 963 Jiwa laki-laki dan 891 jiwa perempuan dengan

kepadatan penduduk masing-masing 20 per kepala Keluarga (KK) perkm. Khusus untuk calon lokasi Pualan di desa ini terdapat didusun Pualam yang memiliki jarak tempuh 3 km dari pusat Desa trletak di atas ketinggian gunung kurang lebih 90^0. Komunitas yang tinggal di lokasi sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 119 jiwa. Jumlah Komunitas tersebut tidak bermukim dalam suatu wilayah akan tetapi terpencar-pencar di gunung-gung atau dibukit-bukit.

Secara umum mata pencaharian utama dari penduduk Desa Bintana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagian besar sebagai petani jagung. Sebagian kecil sebagai tukang, dagang dan lain sebagainya. Tanaman yang menjadi unggulan masyarakat terutama warga Koumitas Adat Terpencil (KAT) adalah jagung dan sebagian menanam tanaman tahunan seperti duruan dan coklat dan sebagian sebagai petani ladang padi (tuhelo)

Pengolahan pertanian dalam hal menanam jagung masih dilakukan secara tradisional misalnya dalam hal membersihkan lahan warga menggunakan cangkul atau *Popati* dan parang. Selain jagung yang menjadi unggulan warga ada pula yang menanam pisang, cabe dan tomat serta Kelapa, serta Durian. Akan tetapi untuk tanaman tahunan seperti kelapa dan durian belum menjadi tanaman ungggulan bagi warga Komunitas Adat terpencil di Desa Bintana Kecamatan Atinggola kabupaten Gorontalo Utara. Konsentrasi warga masih tetap terfokus pada dua jenis tanaman antara tanaman jagung maupun padi ladang. Untuk lebih jelasnya kondisi kedua tanaman yang menjadi unggulan warga Komunitas Adat Terpencil pada lokasi Pualam desa Bintana terlihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 8. Kondisi tanaman padi ladang Warga di Lokasi Pualam Desa Bintana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo (Dokumen Penelitian Akhir Maret 2014.[27]

Sebagai masyarakat pedesaan, sudah barang tentu dengan segala kearifannya masyarakat selalu memanfaatkan seoptimal mungkin potensi alam, mulai dari bertani, berkebun dan beternak baik beternak sapi, ayam dan itik. Ketergantungan masyarakat petani pada lahan sangat kental nuansa ekonomi maupun sosialnya. Secara ekonomis, lahan dapat menjadi sumber kehidupan dan pendapatan ekonomi keluarga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil penjajagan awal yang dilakukan Tim Pokja KAT Provinsi Gorontalo pada calon lokasi yang akan diberdayakan secara umum ditemukan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut

[27] Bagi Masyarakat Gorontalo tanaman padi ladang dikenal dengan istilah *"Tuhelo"* tanaman padi ladang lebih banyak ditanam diareal-areal atau struktur tanah pegunungan, sebab tanaman padi ladang tidak cocok pada tanah yang lembab. Pengolahan tanaman padi tersebut tidak menggunakan mesin giling, akan tetapi cara pengolahannya dilakukan dengan cara manual yakni dengan cara ditumbuk melalui "*didingga"* (alat tradisional) masyarakat Gorontalo. Karena dengan pengolahan secara manual akan mengahsilkan kualitas beras yang baik dan harum

tergolong sederhana, misalnya masyarakat belum mengenal sistem perbankan dalam hal membangkikan ekonomi masyarakat. Proses pertukaran uang dilakukan melalui pasar-pasar tradisional. belum memilikii rumah permanen,

Aktivitas petani dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan jalan bercocok tanam jagung, padi dan lain-lain. Pengelolahan lahan pertanian dilakukan oleh sebagian besar tidak menggunakan hewan (sapi) sebagai sarana untuk menarik bajak. Bajak dalam kehidupan petani di Gorontalo dikenal dengan istilah *"Popadeo*". Pekerjaan bercocok tanam maupun dalam mengolah lahan pertanian dilaksanakan sekitar pukul 06.00 s/d 12.00 dan dilanjutkan pukul 15.30 s/d 17.30,

Sampai saat ini di Desa Bintana, sudah terdapat sarana pendidikan yakni 1 (satu) buah Sekolah Dasar (SD) permanen dengan kapasitas 6 kelas dan sudah menamatkan. Peserta didik atau murid-murid yang belajar di sekolah melalui pendidikan formal di antaranya adalah anak-anak dari warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang akan diberdayakan.

Tamatan sekolah Dasar sebagian yang mau melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dapat memilih sekolah-sekolah sederajat seperti SMP dan Tsanawiyah yang ada di Kecamatan Atingggola Kabupaten Gorontalo Utara dan lain-lain. Tetapi secara umum sebagian besar usia sekolah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat lanjutan yang lebih.

Penduduk Desa Bintana Kecamatan Atingggola seluruhnya adalah pemeluk agama Islam, dan sarana keagamaan yang terdapat di desa ini adalah mesjid sudah beratapkan seng. Sarana peribadatan tersebut hanya terdapat di pusat desa. Bagi warga Komunitas Adat Terpencil yang ingin melakukan ibadah hanrus menempun jalan kaki antara 1-2 kilometer.

Walaupun masyarakatnya sebagai pemeluk agama Islam akan tetapi masih terdapat warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih memiliki kepercayaan pada hal-hal yang gaib terutama dalam menghadapi sesuatu masalah misalnya sakit dan lain sebagainya. Masyarakat lebih percaya bila ada warga yang sakit perut misalnya anggapannya karena digangung oleh roh-roh halus. sehingga untuk berobat lebih banyak ke dukun kampung.

Sarana kesehatan dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar dalam tatanan kehidupnan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal diperkotaan dan pedesaanbahkan pada wilayah-wilayah Komunitas terpencil. Di lokasi Pualam desa Bintana sebagai persiapan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) belum ada sarana kesehatan dan air bersih. Warga yang bermukim di calon lokasi Pualam Desa Bintana lebih banyak menggunakan air dari sungai maupun dari sumur tanah untuk kepeluan minum, mandi maupun untuk cuci pakaian.

Pelayanan kesehatan secara medis untuk masyarakat Desa Bintana Kecamatan Atinggola selama ini dapat dikatakan sudah ada di pusat Kecamatan maupun dipusat desa. Seperti di Puskesmas dan pasilitas kesehatan lainnya. Bagi warga Komunitas Adat Terpencil masalah kesehatan masih kurang diperhatikan maupun belum banyak yang memanfaatkan pengobatan secara medis misalnya berobat ke mantri kesehatan di kampung. Selain itu warga juga lebih banyak berobat ke dukun kampung. Bagi masyarakat maupun warga Komunitas Adat bila ada yang mengalami sakit mereka lebih banyak meng-gunakan dukun kampung, tetapi ada pula sebagian warga membeli obat di kios-kios rumah penduduk.

Kondisi tanah yang ada di lokasi calon persiapan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang akan diberdayakan di Desa Bintana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara lebih banyak tanah kemerah-merahan yang terdapat di seluruh wilayah

maupun lokasi. Kondisi tanah yang demikian ini lebih banyak ditanami oleh warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) seperti jagung, cabe dan tomat dan coklat. Tanah pertanian yang diolah warga untuk tanaman tahunan seperti kelapa dan tanaman yang paling cocok untuk tanah seperti ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi areal budidaya coklat.

Selanjutnya keadaan iklim di desa Bintana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sama halnya dengan daerah-daerah lain di Gorontalo yang dipengaruhi oleh iklim tropos dan musiman. Musim kemarau atau musim panan berlangsung bulan Juni sampai dengan Oktober, sedangkan musim hujan berlaku antara bulan Nopember sampai dengan bulan Mei.

Kehidupan Sosial Budaya dan Lingkungan

Pembangunan ekonomi (*economic development*) sebagai proses yang menekankan aspek perubahan ekonomi dan perubahan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi berorientasi pada upaya pertumbuhan dan pemerataan. Upaya pertumbuhan dicerminkanoleh perubahan pendapatan.[28]. Desa Pangahu dan Desa bintana meruapakn dua desa yang terdapat di wilayah Provinsi Gorontalo, dimana sebagaian besar penduduknya hidup dan tergantung pada sumber daya alam, yakni lahan pertanian. Sebagai masyarakat pedesaan sudah barang tentu dengan segala kearifannya masyarakat selalu memanfaatkan seoptimal mungkin potensi alammnya mulai dari bertani, berkebun, berternak. Ketrgantungannya pada lahan sangat kental nuansa ekonomi maupun sosialnya. Secara ekonomis lahan bagi masyarakat pedesaan termasuk warga

[28] Nizwar Syafa'at dkk. Pertanian Menjawab Tantangan ekonomi Nasional. Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan. Penerbit Lapera Pustaka Utama, 2005 hal.10

Komunitas Adat terpencil menjadi sumber kehidupan ekonomi keluarganya.

Sebagian besar Komunitas Adat Terpencil, meraka lebih banyak bercocok tanam, jagung, cabe, pisang, coklat, kelapa, berburu serta peramu hasil hutan seperti rotan. Sebelum mata pencaharian sebagai petani, mereka lebih banyak meramu rotan dan pekerjaan ini dilakukan sampai berminggu-minggu.

Hasil ramuan rotan yang dikerjakan oleh warga Komunitas Adat Terpencil dijual kepada warga dari pusat desa atau Kecamatan, atau dengan jalan menukar rotan dengahn kebutuhan sehari-hari seperti sabun, gula, dan lain sebagainya. Dengan kehidupan yang berminggu-minggu dihutan maka mereka membuat gubuk sebagai tempat peristirahatan. Seiring dengan perkembangan masyarakatnya yang semakin hari semakin bertambah, rotan-rotan di hutan mulai berkurang.

Dengan berkurangnya sumber kehidupan mereka di hutan serta makin jauhnya hasil hutan seperti rotan dan pemukiman warga, maka lambat laun warga mulai beralih mata pencaharian misalnya sebagai petani dengan menanam jagung, ketela pohon, ubi jalar dan lain-lain. Pengelolaan lahan pertanian dilakukan secara tradisional, dimana mereka masih menggunakan alat pertanian tradisional seperti, kapak, pacul, skop, parang dan tembilang yang terbuat dari besi serta tugal (*tutuwa*) yang terbuat dari kayu yang ujungnya lancip untuk membuat lubang untuk menanam palawija serta alat-alat lain untuk mengolah maupun menggarap lahan pertaniannya.

Hasil tanaman lebih banyak disimpan untuk kepentingan konsumsi keluarga, namun sudah ada pula yang menjual hasil-hasil perkebunannya ke pusat desa dan hasilnya diperuntuhkan untuk kepentingan lain seperti kebutuhan akan pakaian dan kebutuhan akan penerangan. Sesuai pengamatan melalui studi kelayakan bahwa pranata ekonomi pada masyarakat ini masih

bersifat sederhana, masyarakat belum mengenal Bank, Koperasi dan sebagainya. Proses penjualan hasil hutan seperti rotan dan hasil-hasil perkebunan lainnya dilakukan secara langsung dari mereka ke pembeli. Ada pula yang melakukan dengan cara barter antara hasil perkebunan dengan bahan makanan serta pakaian. Masyarakat yang melakukan pembelian kayu maupun rotan dari warga lebih banyak datang dari pusat Kecamatan bahkan dari Ibu Kota Provinsi. Sehingga tidak dapat dihindari masyakat atau warga Komunitas Adat terpencil menjadi komonditi orang-orang dari luar desa untuk melakukan penebangan liar (*ilegal loging*), untuk kepentingan bisnis bagi masyarakat yang memiliki modal.

Kadang-kadang pula para pembeli yang langsung menjemput hasil-hasil perkebunan. Masyarakat belum begitu mengenal proses nilai barang dengan nilai dengan nilai uang yang dilakukan oleh pembeli. Bagi masyarakat yang penting dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sistem kepemimpinan dalam masyarakat desa masih bersifat tradisional dengan tetap berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Seorang pemimpin dipilih masyarakat dari kelompok kaum tua dan dianggap memiliki pengetahuan yang luas tentang adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan harus mendapat restu dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kepemimpinan yang masih bersifat tradisional ini telah menjadikan masyarakat desa terutama warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Gorontalo agak mengalami ketertinggalan karena tidak adanya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan atas diri seorang pemimpin. Pemimpin dalam bertindak atau mengambil kebijakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat sering melakukan konsultasi dengan tokoh adat, agama, dan tokoh

masyarakat, sehingga bila tidak sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat, maka program yang dicanangkan oleh pemimpin desa tersebut tidak dapat dijalankan.

Disatu sisi pola kepimpinan masyarakat terutama yang ada di lokasi ini lebih banyak mengedepankan kemampuan fisik dan ilmu. Ilmu yang dimaksudkan oleh masyarakatnya bukan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan formal, akan tetapi ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu tentang kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit mampu mengusir roh-roh halus di sekitar rumah bahkan dalam diri manusia. Hal ini sebagimana di tuturkan informan WA (67 tahun) diantaranya ‘‘Masyarakat yang bermukim di kawasan komunitas adat terpencil lebih banyak percaya adanya roh-roh halus. Roh-roh tersebut diyakini masyarakatnya dapat menyembukan berbagai penyakit dan diyakini secara turun temurun[29]

Masyarakat yang tinggal dipedesaan pada umumnya lebih banyak berbgerak disektor pertanian. Oleh sebab itu lahan sangat menentukan maju tidaknya kehidupan setiap petani, sebab lahan merupakan faktor yang paling deterministik dengan kehidupan petani. Tjondronegoro dan Wiradi (1984) menyebutkan bahwa bagi petani, lahan tidak terbatas sebagai sumber ekonomi dan tempat tinggal, tetapi juga terdapat fungsi-fungsi sosial yang memungkinkan mereka melakukan interaksi di antara sesamanya. Selanjutnya penyempitan lahan dan masuknya ekonomi uang ke pedesaan akan membawa

[29] Olahan hasil wawancara dengan informan WA, salah seorang tokoh adat di Desa Bintana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, Juli 2019. Roh yang dimaksudkan dalam yang diyakini oleh masyarakat terpencil tersebut berupa setan yang tidak dapat di lihat wujudnya oleh semua masyarakat melainkan hanya orang-orang tertentu yang memilki ilmu untuk itu, oleh sebab itu bagi mereka yang memiliki ilmu seperti itu sangat disegani bahkan ditakuti di desa bila ada kesalahpahaman diantara sesamanya.

pengaruh kepada pergeseran struktur sosial yang dapat disejajarkan dengan proses individualisasi. Dalam persepektif fungsional struktural, fungsi itu dapat dikategorikan sebagai sumber infirasi dalam kehidupan untuk mengembangkan nilai-nilai, sehingga mengubah fungsi lahan berarti mengubah sumber-sumber kehidupan dalam mengembangkan nilai-nilai tersebut (Parsons, 1986).

Pada umumnya sistem kepemilikian dan penguasaan wilayah bagi masyarakat desa khususnya yang menjadi lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di wilayah Provinsi Gorontalo masih bersifat tradisional. Tanah yang ada di desa dimiliki oleh warga masyarakat secara turun-temurun dengan tanpa ada status hukum dan sertifikasi kepemilikan yang jelas. Walaupun ada sebagian kecil tanah yang dimiliki oleh masyarakatnya yang dekat dengan pusat desa. Umumnya tanah yang ada di pedesaan adalah milik negara, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa yang menjadi lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) antara lain "Kebanyakan penduduk di desa, tanah-tanah yang mereka garap sebagai areal pertanian lebih banyak tanah-tanah negara walaupun tanah ini sudah lama meraka olah"

Walaupun penguasaan atas lahan pemukiman dan pertanian yang secara turun temurun dan tanpa didasari oleh kekuatan hukum dan sertifikasi kepemilikan tanah tersebut, tidak mengakibatkan saling bentroknya antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, walaupun batas tanah antara kelompok masyarakat dengan masyarakat lain hanya dibuktikan dengan pohon.

Masyarakat Gorontalo termasuk komunitas yang berada pada lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Gorontalo menganut agama Islam. Namun dalam kehidupan mereka sehari-hari di lokasi calon yang akan diberdayakan tetap memiliki kepercayaan terhadap sesuatu yang gaib. Permasalahan adalah wadah seperti

masjid jauh dari pemukiman meraka, disisi lain kurangnya para tokoh agama yang memberikan pembinaan pada meraka, bahkan kadang-kadang pembinaan keagamaan kepada masyarakat nanti pada Bulan Puasa, pada saat-saat peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid, Isra Mi'raj dan seba-gainya, itu pun tidak sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, karena kurangnya komunikasi antara sesama masyarakat yang hidup terpencar-pencar dan bermukim serta tinggal di daerah pegunungan, sehingga menga-kibatkan berbagai informasi sulit diterima warga binaan.

Walaupun masyarakatnya menganut agama Islam, tidak sedikit diantara mereka yang masih percaya kepada ilmu-ilmu gaib, atau pada hal-hal yang bersifat mistik. Kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistik ini terlihat pada kegiatan upacara orang sakit dan upacara bercocok tanam.

Adanya kepercayaan masyarakat akan kekuatan gaib berakibat pula pada sistem pengetahuan mereka tentang kesehatan. Bila ada anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, maka mereka tidak akan langsung berobat ke petugas kesehatan melainkan berobat ke orang yang dianggap pintar atau dukun. Mereka masih percaya bahwa dukun memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang dan mampu menyembuhkan segala penyakit. Masyarakat percaya bahwa segala gangguan yang merasuki manusia adalah akibat adanya roh jahat dan hanya mampu diusir oleh dukun.

Praktek dukun kampung yang menjadi kepercayaannya dalam menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat yakni melalui mantera-mantera, pemberian sesajian seperti nasi putih, kuning, merah dan hijau. Sesajian ini diberikan pada kekuatan-kekuatan gaib, maupun setan agar tidak mengganggu manusia. Selain dari dukun yang dapat menyembuhkan penyakit masyarakat berdasarkan pandangannya penyembuhan

penyakit yang diderita dapat pula disembuhkan melalui bahan-bahan tanaman seperti bawang merah, bawang putih cengkeh, kunyit maupun kemenyan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, sebab melalui pendi-dikan masyarakat dapat memahami, mengerti segala perubahan yang berlangsung di alam sekitarnya. Berdasarkan data secara umum tentang studi kelayakan yang telah dilakukan pada 2 (dua) lokasi persiapan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Gorontalo Tahun 2014, umumnya tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah (tidak lulus Sekolah Dasar). Sebagian besar masyarakat memiliki pendidikan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar bahakan adan yang sudah wajib masuk Sekolah Dasar belum pernah mengecam pendidikan. Hal yang demikian ini berawal dari pendapat orang tua mereka bahwa bila *pertama;* Bila anak sudah dewasa lebih baik membantu orang tua untuk bekerja di kebun atau meramu rotan di hutan serta mencari kayu di hutan untuk cepat memperoleh uang. *Kedua;* adalah tidak ada fasilitas Sekolah sebagai tempat mereka untuk sekolah. Jarak antara sekolah dengan pemukiman sekitar antara 4 s/d 5 kilometer, dan hal yang demikian ini pula berdampak pada motivasi orang tua untuk menyekolahlkan anak-anaknya.

Dalam sistem kekerabatan, kita mengetahui aturan yang membatasi antara orang yang sekerabat dengan orang yang tidak sekerabat. Adanya penggolongan ini munculah kelompok-kelompok kekerabatan. Selain itu pula pengaruh adapt istiadat setempat yang berlaku turun temurun yang sudah menjadi peraturan melahirkan prinsip-prinsip keturunan.

Suparlan (dalam Manorek, Tata Krama Suku Gorontalo 2000) memandang Sistem kekerabatan adalah serang-kaian aturan-aturan yang mengatur pengolongan orang-orang yang sekerabat yang melibatkan adanya berbagai tingkat, hak dan kewajiban diantara orang-orang

yang sekerabat, yang membedakankan dengan hubungan-hubungan mreka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat.

Prinsip keturunan pada masyarakat Gorontalo sifatnya bilateral dan parental. Dalam prinsip ini antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga wanita (antara pihak suami isteri) terjadi hubungan kerabat yang sama. Namun dalam hal-hal tertentu pihak laki-laki yang lebih diutamakan, misalnya dalam harta warisan. Suku Gorontalo memiliki hubungan kekerabatan tertentu dengan ciri-ciri khas yang membedakannya dengan kelompok kerabat lainnya.

Umumnya desa-desa yang menjadi lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Gorontalo, penduduknya terdiri dari beberapa keluarga yang masih memiliki hubungan pertalian darah atau hubungan keturunan. Di lokasi ini hanya terdapat beberapa marga sebagai simbol keluarga yang saling berhubungan keturunan antara satu dengan lainnya.

Seperti hal masyarakat yang tinggal di pusat desa, hubungan keturunan yang ada pada masyarakat atau Komunitas Adat Terpencil di lokasi tersebut telah menciptakan kelompok kekerabatan tersendiri diantara mereka yang dalam bahasa Gorontalo disebut dengan *Ungala'a*. Ungala'a ini terdiri dari beberapa keluarga yang telah memiliki anak dan cucu yang disebut *ngala'a* dan umumnya mereka memiliki identitas marga sendiri. Hubungan kekerabatan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) ini terlihat pula pada sistem pemukiman penduduk. Pada umumnya tempat tinggal dari keluarga-keluarga kecil mengitari rumah atau tempat bermukimnya orang yang dituakan diantara mereka yang juga dianggap sebagai ujung pangkal keluarga. Orang tua bagi warga Komunitas Adat Terpencil menjadi panutan dalam setiap aktivitasnya sehari-hari. Misalnya dalam hal mengolah hasil pertanian terutama pada hari menanam, warga masih tetap percaya bahwa yang dituakan

dianggap mengetahui permasalah lingkungan alam sekitarnya bahkan ada hari-hari tertentu untuk menanam jagung lain sebagainya.

Hubungan sosial dan jaringan antara masyarakat yang ada di desa dengan warga Komunitaas Komunitas Adat Terpencil (KAT), umumnya masih tetap terjaga dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya saling tolong menolong diantara mereka. Saling tolong menolong ini terlihat apabila ada seseorang atau satu keluarga sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan terutama dalam mengolah perkebunan atau memperbaiki rumah.

Dalam mengerjakan perkebunannya, tidak semua diantara mereka yang mengunakan sapi untuk membajak untuk mengolah areal pertaniannya, sebagian besar diantara mereka yang masih menggunakan pacul sebagai alat untuk mengolah perkebunan atau ladang. Dari kegiatan mereka di perkebunan atau diareal pertanian inilah telah menciptakan hubungan saling tolong menolong diantara sesamanya.

Masyarakat yang ada disekitar keluarga yang sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tanpa diundang mereka datang membantu keluarga yang sedang menger-jakan sesuatu pekerjaan tersebut. Saling tolong menolong dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan istilah *huyula* (kerja sama). *Konsep Huyula (kerjasama)* Bagi kehidupan masyarakat Gorontalo lebih termanifesasikan dalam beberapa bentuk. Seperti *Pertama; Ambu.* yaitu tolong menolong untuk kepentingan bersama misalnya membuat jalan baru di desa dan sebagainya yang lebih berfokus ada kerja bakti, *Kedua; Hileya*; yaitu tolong menolong secara spontan misalnya bila ada yang mengalami musibah seperti ada orang kedukaan, orang-orang yang datang ke tempat kedukaan di samping menghibur, juga membawa makan-an dan tinggal beberapa hari. serta *ketiga; Tiayo;* yaitu aktivitas tolong menolong antara sekelompok orang untuk mengerjakan pekerjaan seseorang.

Dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, bentuk *huyula* dalam wujud *ambu* dilakukan masyarakat dalam wujud kerja bakti seperti membersihkan Kantor desa membersihkan saluran-saluran air serta jalan-jalan desa, dan hal yang demikian ini diikuti oleh seluruh warga masyarakatnya tanpa mengenal tingkat pendidikan, status sosial maupun status ekonomi.

Selain *huyula* dalam wujud *ambu*, maka bentuk *huyula* dalam wujud *hileya* dilakukan oleh masyarakat bila ada keluarga atau tetangga yang mengalami musibah berupa kedukaan, maka orang-orang datang ke tempat kedukaan untuk menghibur orang yang berduka, dan membawa makanan untuk tinggal beberapa hari. Mereka memasak makanan sehingga orang yang berduka tidak perlu memasak dan terhibur hatinya.

Selanjutnya bentuk *huyula* dalam wujud *tiayo* kegiatan ini terjadi antara sekelompok orang untuk mengerjakan pekerjaan seseorang. Biasanya orang yang dibantu hanya menyediakan makanan dan berkewajiban membalasnya bila yang pernah menolongnya akan mengerjakan sesuatu pekerjaan pula, misalnya pada hari pertama membuat pundasi rumah, mengolah tanah pertanian misalnya membajak dengan menggunakan sapi atau kerbau, pembuatan tambahan rumah *(bantayo)* yang dipergunakan untuk pelasanaan hajatan berupa pesta.

KEPUSTAKAAN

Abdussamad, Kadir, dkk. 1992. *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo,* Jakarta. Yayasan 23 Januari 1942 dan Aksara Indira Harapan

Asian Development Bank, 2005, *Meningkatkan Perjuangan Melawan Kemiskinan Di Asia Dan Pasifik, Strategi Pengurangan Kemiskinan,* Asian Development Bank

Aziz Ali dkk. Ed. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi.* Pelangi Aksara. Yogyakarta.

Abraham, 1982. (b) *Perspective on Modernization: Toward a General Theory of Third World.* Karim Rusli (penterjemah), Modernidsasi Dunia Ketiga, Suatu Teori Umum Pembangunan. 1991 Tiara Wacana. Yogyakarta.

Alvin Y.So, Suwarsono, 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.

Amin. Samir, dalam Magnus Blomstrom & Bjorn Hettne, *Development Theory in Transition, The Dependency Debat and Beyond: Third World Responses*, (London: Zed Books, 1984)

Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial,2002., *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002,* Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial,1999.(*Poor Popu-lation*) Berita Resmi Statistik Penduduk Miskin,N0,04/ Th. II/ 9. July. CBS. Jakarta.

Bodenheimer, 1970. Dependency and Impperialism: The Roots Of Latin American Underdevelepment. North American Congress in Latin America (NACLA) Newsletter.

Beilharz Peter,2005. *Teori-Teori Sosial. Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Blomstrom. Magnus & Bjorn Hettne, *Development Theory in Transition, The Dependency Debat and Beyond: Third World Responses*, (London: Zed Books, 1984)

Budiman Arief, 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PR.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Cardoso, FH. 1982. *Dependency and Development in Latin America in*

Introduction to The Sociology of Developing Countries. Monthly Review Express. New York.

Dalle Daniel Sulekale, 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Ekonomi Rakyat* Artikel-Th. II- No. 2 April 2003, *www.ekonomirakyat.org*

Etzioni, halevy, Eva dan Amitai Etzioni, (ed.).1973, *Social Change: Sources, Patterns, and Consequence,* Edisi Kedua. New York. Basic, Book.

Frank, AG. 1969. *The Development of Underdevelopment in Latin America;Underdevelopment or Revolution*. Monthly Review Express. New York. 1984. *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi.* Pustaka Pulsar. Jakarta.

Galtung, J. 1980. *A Structural Theory of Imperialism in Dialectics of third World Development*. Montelair. New York.

Gunawan Sumodiningrat, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pembedayaan Masyarakat,* Bina Rena Pariwara, Jakarta. Cetakan.2

Hoogvelt Ankie,1995. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. Penyadur.Alimudin. Grafingi Persada. Jakarta.

Jauch, R., Lawrence dan William F. Glueck 1988. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan.* Jakarta: Erlanga.

Josef Gugler dan Gilbert Alan. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga.* Tiara Wacana. Yogyakarta.

Kanto Sanggar, 2006. *Modernisasi dan Perubahan Sosial. Suatu Kajian Dari Perspektif Teori dan Empirik.* Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.

Koentjaraningrat, 1994. Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia Persada Utama, Jakarta.

KBI GEMARI, 2006, *Membangun Manusia Indonesia Entaskar*. *Kemiskinan*, Edisi Desember 2006, *http://www.kbi. gemari.or.id*

----------,2006, *Paradigma Pembangunan Untuk Atasi Kemiskinan,*Edisi De-sember 2006, *http://www.kbi. gemari.or.id*

Lauer, Robert, 1993, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimanda SU, Rineka Cipta, Jakarta

Light, Donald, Suzane Keller dan Craig Calhoun, 1989. *Sociology*, Edisi Kelima Alfred A. Knopf. New York.

Lirner, Daniel, 1983., *Memudarnya Masyarakat Tradisional* (terjemahan Muljarto Tjokroaminoto) Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Midgly, James, 2003. *Imperialisme Profesinalisme: Pekerjaan Sosial Di Dunia Ketiga*, Heinemann-London

Mubyarto dkk, 1984. *Nelayan dan Kemiskinan (Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai)* Rajawali. Jakarta.

----------, 1999, *Reformasi Sistem Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta

----------. 2001, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.

----------, 2001, *Penangulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam Era Otnomi Daerah.*www.ekonomirakyat.org.

Musthopa Chabib,2007, Studi Pembangunan, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, Surabaya

Nasikun, 1995, *Kemiskinan di Indonesia Menurun, dalam Perang-kap* Kemiskinan, *Problem, dan Strategi Pengentasaunya,* (Bagong Suyanto, ed), Airlangga Univercity Press.

Roxbourgh, I. 1986. *Teori-Teori Keterbelakangan*. LP3ES. Jakarta. Santos, TD. 1970. *The Structure of Dependence*. American Economic Review, Volume 60, Nomor 2

Ritzer, George, 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, Alimandan (penterjemah) Sosiologi Berparadigma Ganda, 2002 Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sahdan, Gegorius 2005. *Menganggulangi Kemiskinan Desa. A*rtikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan. Yogyakarta.

Schoorl,J.W, 1984, *Modernisasi. Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang.* Di Indonesiakan oleh Sokadijo. Gramedia, Jakarta.

Soemardjan Selo, 2009. *Perubahan Sosial di Yokyakarta*. Komunitas Bambu, Beji Timur Depok.

Suriasumatri Jujun, 1995. Ilmu Dalam Perspektif. Yayasan Obor. Jakarta.

Suharto, Edi (2006), *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial.* Rafika Aditama. Bandung.

----------2006, *Konsep Kemiskinan Dan Strategi Penanggu-langannya*,http://www.policy.hu/suharto/modul-a/makindo-l2.

----------,2005,*Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat,* Refika Aditama Bandung

-------- (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran,* Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS

--------. dkk., (2004), *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia,* Bandung: STKS Press

Sumodiningrat Gunawan, 1999. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.* Bina Rena Pariwara. Jakarta.

Scott C. James, 1981. *Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES, Jakarta.

Sunartiningsih, 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Aditya Media.UGM Yogyakarta

Steiner, A., George dan John B. Miller, 1997, *Kebijakan dan Strategi Manajemen.* Jakarta : Erlangga.

Suyanto Bagong,(ed), 2005. *Perangkap Kemiskinan. Problem & Strategi Pengentasanya.* Airlangga University Press. Surabaya.

Sztompoka,Piotr, 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media. Jakarta.